

LAPORAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	iv

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2.3 Rencana Strategis	2
2.3.1 Tujuan dan Sasaran	2
A. Tujuan	3
B. Sasaran	3
2.3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024	5
2.3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
2.3.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
2.3.5 Rencana Anggaran Tahun 2024	13
2.3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama	16
2.3.7 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis	22
2.3.8 Akuntabilitas Keuangan	29
2.3.9 Analisis Pencapaian Per Sasaran Strategi	34
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	34 41
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel	71
Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	88
Tujuan 4 : Meningkatkan Kelayakhunian Kota	103
Kesimpulan	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026	4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2026	7
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	12
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)	14
Tabel 2.6	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)	14
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024	15
Tabel 2.8	Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal	17
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	17
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	18
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	23
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	25
Tabel 2.13	Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	27
Tabel 2.14	Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 (Sebelum Audit BPK-RI)	29
Tabel 2.15	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK RI)	29
Tabel 2.16	Pagu dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023	30
Tabel 2.17	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	31
Tabel 2.18	Tingkat Efisiensi terhadap Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	32
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024	34
Tabel 2.20	Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Target Akhir RPJMD Kota Bandung Tahun 2024	36
Tabel 2.21	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024	37
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Tahun 2024	48
Tabel 2.23	Analisis Pencapaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah	50
Tabel 2.24	Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah	54
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Standar Layak Hidup Tahun 2024	56
Tabel 2.26	Perkembangan Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia 2020-2024	60
Tabel 2.27	Perkembangan Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024	61
Tabel 2.28	Rekapitulasi Data Warga yang Tercantum dalam DTKS Per Kecamatan Tahun 2022-2024	65
Tabel 2.29	Rekapitulasi Bantuan Sosial pada Tahun 2024	69
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Tahun 2024	71
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota Tahun 2024	88
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota Tahun 2024	91
Tabel 2.33	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPD Kota Bandung Tahun 2024	92
Tabel 2.34	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Kota Bandung Tahun 2026	98
Tabel 2.35	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota, Agustus 2023 - Agustus 2024	99
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya Tahun 2024	103
Tabel 2.37	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Pendidikan Kota Bandung 2024	104
Tabel 2.38	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Kesehatan Kota Bandung 2024	106
Tabel 2.39	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Ketentraman Kota Bandung 2024	108
Tabel 2.40	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Sosial Kota Bandung 2024	110

Tabel 2.41	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Tahun 2024	112
Tabel 2.42	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Tata Ruang Kota Bandung 2024	114
Tabel 2.43	Data Persetujuan Bangunan Gedung yang Terdaftar melalui Aplikasi SIMBG	116
Tabel 2.44	Data Persetujuan Bangunan Gedung melalui Aplikasi SIMBG	116
Tabel 2.45	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Lingkungan Kota Bandung 2024	120
Tabel 2.46	Target dan Capaian IKLH Kota Bandung 2024	121
Tabel 2.47	Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada Tahun 2024	126
Tabel 2.48	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Transportasi Kota Bandung 2024	128
Tabel 2.49	Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2024	129
Tabel 2.50	Jumlah Penumpang Kendaraan Umum dan Pribadi	115
Tabel 2.51	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Infrastruktur dan Utilitas Kota Bandung 2024	118
Tabel 2.52	Kondisi Jalan Kota Bandung	119
Tabel 2.53	Data Lokasi Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2024	121
Tabel 2.54	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020 (per Kecamatan)	125
Tabel 2.55	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2024 Kota Bandun	127
Tabel 2.56	Data Sambungan Langganan Tahun 2024	131
Tabel 2.57	Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2024	131
Tabel 2.58	Rekapitulasi Pekerjaan Kerja Sama B to B PT Adaro	133
Tabel 2.59	Rekapitulasi RTH di Kota Bandung Sampai dengan Tahun 2024	136
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi Tahun 2024	143
Tabel 2.61	Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Ekonomi Kota Bandung 2024	144

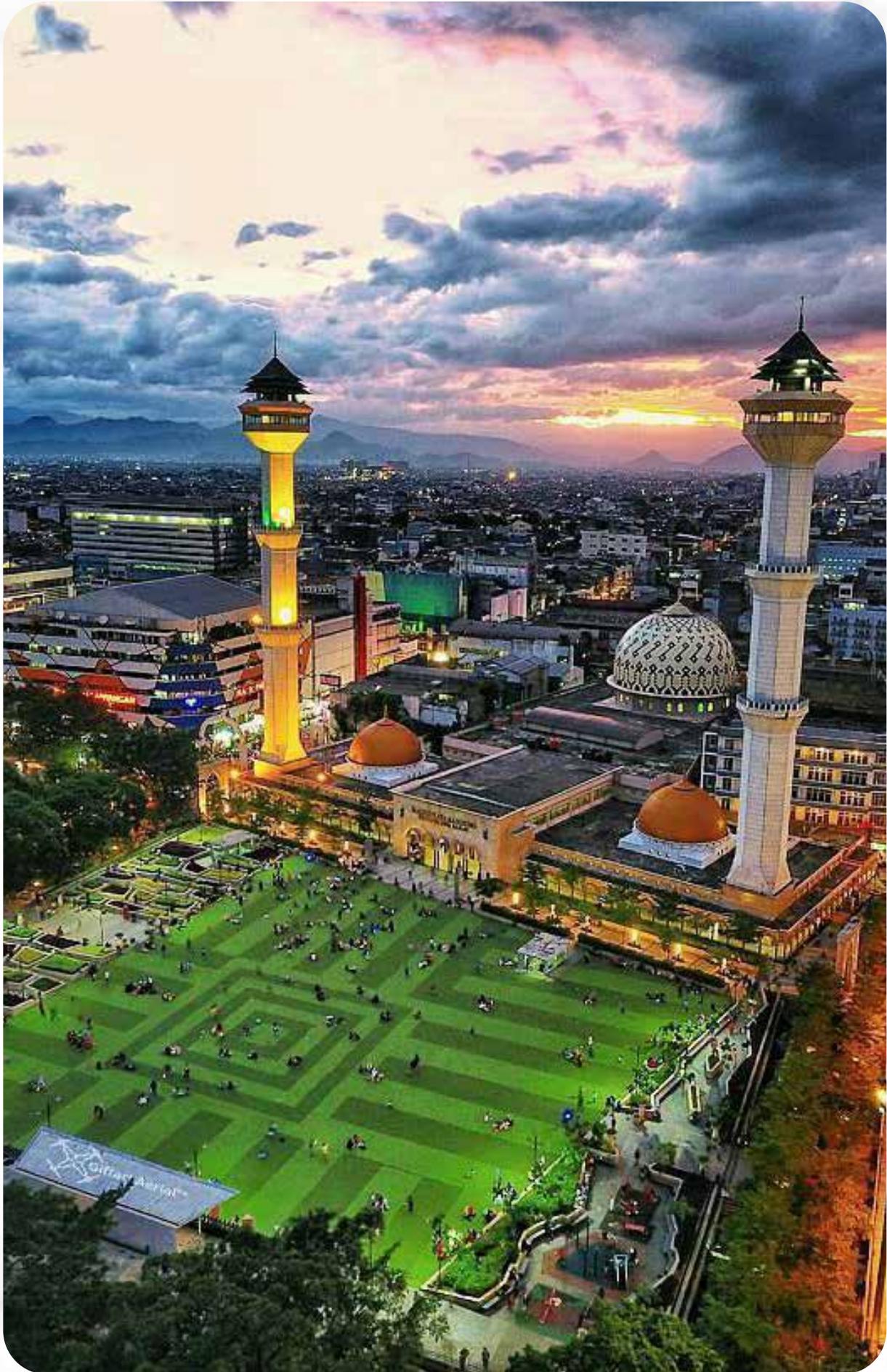


DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	20
Grafik 2.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024	24
Grafik 2.3	Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019-2024	36
Grafik 2.4	Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah	51
Grafik 2.5	Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah	54
Grafik 2.6	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Bandung 2020-2024	57
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bandung 2020-2024	58
Grafik 2.8	Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2024	60
Grafik 2.9	Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2024	61
Grafik 2.10	Warga yang Tercantum dalam DTKS Tahun 2022-2024	66
Grafik 2.11	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2024	72
Grafik 2.12	Perkembangan PDRB ADHK Kota Bandung Tahun 2020-2024	89
Grafik 2.13	Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2020-2024	93
Grafik 2.14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	95
Grafik 2.15	Perbandingan Jumlah Pengaguran Tahun 2024-2026	95
Grafik 2.16	Perbandingan Jumlah Pengaguran Tahun 2023-2024	96
Grafik 2.17	Perkembangan Luas RTH Kota Bandung 2018-2024	138

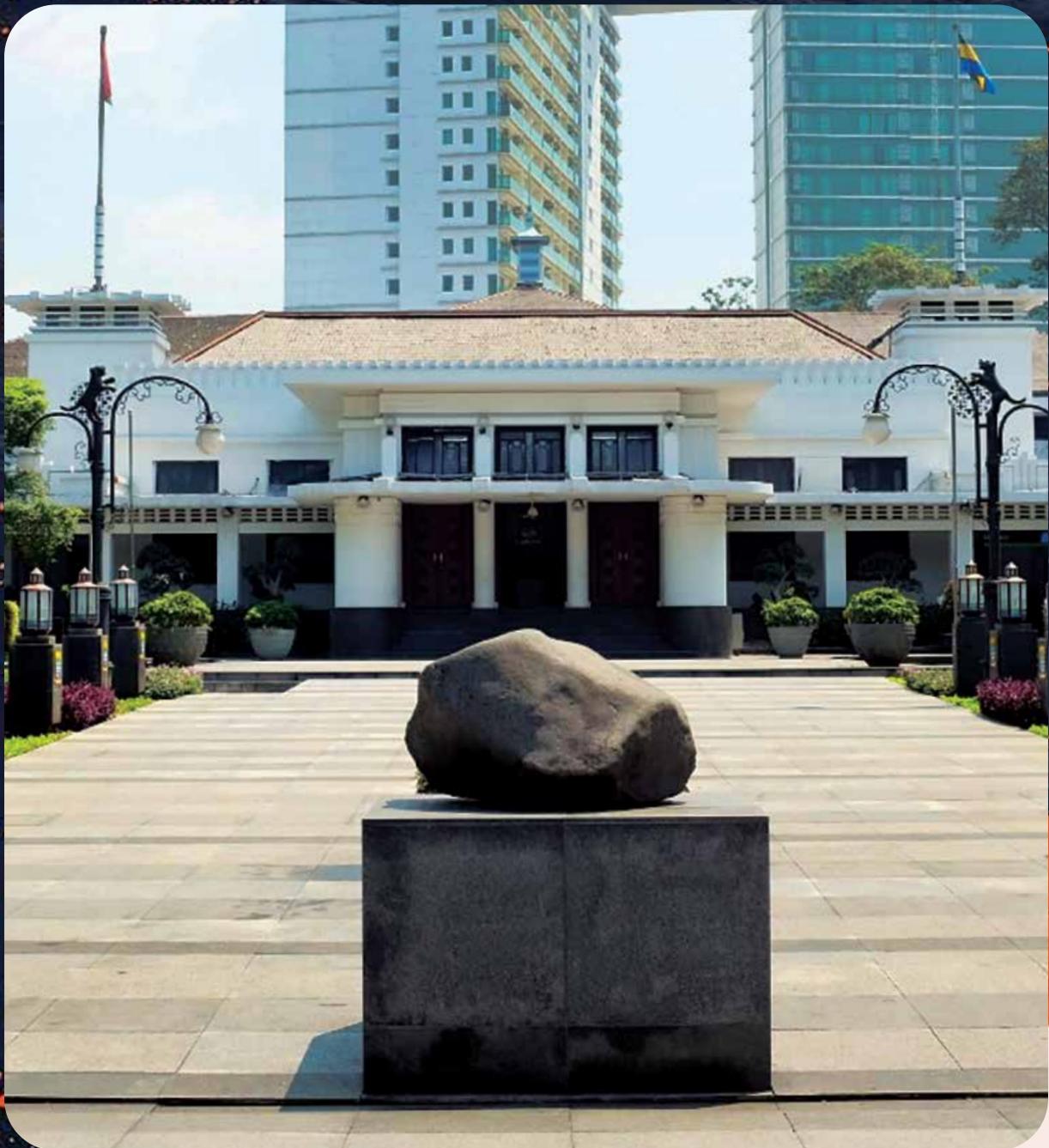
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tema/ Fokus Pembangunan Kota Bandung Tahun 2024-2026	5
Gambar 2.2	Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	16
Gambar 2.3	Juara I Kreativitas Musik Tradisional	49



BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



2.3 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan yang strategis dalam menjembatani antara pelaksanaan Pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung tahun 2024-2026 dilakukan Bersama dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota dalam RPD diturunkan kedalam rencana operasional yang dimuat didalam Renstra PD seluruh Perangkat Daerah Kota Bandung. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sampai dengan 2026. Rencana Pembangunan Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.



2.3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPD merupakan kondisi yang akan dicapai sampai akhir periode tahun 2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran pembangunan merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung pada periode 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan secara spesifik terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok tahap ke-5 RPJPD. Pembangunan tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian Visi RPJPD di akhir tahun 2025 yaitu : Kota Bandung Bermartabat (Bandung Dignified City).

Perumusan tujuan dan sasaran RPD memperhatikan isu strategis RPD. Lima sasaran pokok RPJPD menjadi input untuk rumusan empat isu strategis kota, dan diperkaya dengan input lain yaitu permasalahan kota, telaahan RTRW kota, isu aktual nasional, telaahan RPJMN, dan telaahan rancangan RPD Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan antara sasaran pokok RPJPD, isu strategis RPD, dan tujuan RPD.

A. TUJUAN

Pembangunan Kota Bandung periode tahun 2024-2026 diarahkan pada 4 (empat) tujuan sebagai berikut :

Tujuan pertama yaitu ‘Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia’, mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya.

Tujuan kedua yaitu ‘Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel’, mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan ketiga yaitu ‘Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, merata dan berkeadilan.

Tujuan keempat yaitu ‘Meningkatkan Kelayakhunian Kota’ memiliki makna terciptanya kota layak huni atau liveable city yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas.

B. SASARAN

Pembangunan Kota Bandung periode tahun 2024-2026 diarahkan pada 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

- 1.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 1.2. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat
- 1.3. Meningkatkan Standar Hidup Layak

2. Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel

- 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi



3. Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

3.1 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Kota

3.2 Meningkatkan Pemerataan Perekonomian Kota

4. Tujuan : Meningkatkan Kelayakhunian Kota

4.1 Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya

4.2 Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

4.3 Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup
	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Perkapita Angka Kemiskinan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatkan Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks Livable City Aspek Sosial Budaya
	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur
	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Indeks Livable City Aspek Ekonomi

Sumber: RKPD Kota Bandung

2.3.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema atau fokus pembangunan Kota Bandung mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada gambar di bawah:

Gambar 2.1

Tema/ Fokus Pembangunan Kota Bandung Tahun 2024-2026



Strategi dan arah kebijakan yang dipilih merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program. Pelaksanaan lebih teknis dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran RPD digambarkan melalui program prioritas. Program prioritas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.

Penentuan program prioritas dalam RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memerhatikan arah kebijakan sesuai strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran strategis RPD. Program prioritas dipilih dari nomenklatur program yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021. Program-program dipilih dengan memerhatikan outcome yang akan dihasilkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program prioritas dalam melaksanakan pembangunan Kota Bandung pada periode tahun 2024-2026 dimuat pada LAMPIRAN 2. Pada tabel tersebut, setiap sasaran akan dilengkapi dengan program-program perangkat daerah yang diprioritaskan pelaksanaannya guna mencapai target sasaran RPD. Untuk mendukung pencapaian sebuah sasaran, dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) urusan atau perangkat daerah. Khusus sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota pada tujuan ke-4, pencapaiannya didukung oleh sasaran-sasaran lain pada tujuan ke-1 dan ke-3. Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota diukur dengan indikator Indeks Livable City.

Indeks Livable City meliputi 9 (sembilan) aspek, yaitu (1) Aspek tata ruang; (2) Aspek Lingkungan; (3) Aspek Transportasi; (4) Aspek Fasilitas Kesehatan; (5) Aspek Fasilitas Pendidikan; (6) Aspek Infrastruktur dan-Utilitas; (7) Aspek Ekonomi; (8) Aspek Keamanan; dan (9) Aspek Sosial. Pengukuran skor indeks menggunakan penilaian pada level kecamatan. Nilai Indeks Livable City Kota Bandung diperoleh berdasarkan rata-rata

nilai yang diperoleh masing-masing kecamatan di Kota Bandung.

Beberapa aspek Indeks Livable City di atas telah menjadi bagian pada tujuan lain di RPD. Sasaran: 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dan 2) Meningkatnya Pendidikan Masyarakat mendukung pencapaian indikator Indeks Livable City dari aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Sementara sasaran 1) Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota dan 2) Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota mendukung pencapaian indikator Indeks Livable City dari aspek ekonomi.

Sehubungan dengan keterkaitan sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota diukur dengan indikator Indeks Livable City, dengan beberapa sasaran lainnya, maka program di sasaran lainpun menjadi pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota. Untuk itu, program-program yang mendukung pencapaian sasaran terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara langsung juga mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota, walaupun tidak dimuat pada sasaran tersebut. Untuk menghindari pengulangan penyajian program, maka program prioritas pada sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota hanya akan memuat sebagian program yang belum disajikan pada sasaran lain.



2.3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Bandung dipilih dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPD yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU dalam RPD ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah pada tingkatan yang paling tinggi. IKU pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki kinerja ultimate outcome atau kinerja dampak (impact).

Adapun IKU Pemerintah Kota Bandung pada periode tahun 2024-2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Indikator Kinerja Tujuan		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen
4	Gini Ratio	Poin
5	Indeks Liveable City	Indeks
Indikator Kinerja Sasaran		
1	Umur Harapan Hidup	Tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun
4	Pengeluaran perkapita	Rupiah/orang/tahun
5	Angka Kemiskinan	Persen
6	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
8	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks
9	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks
10	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks

Sumber: RPD Kota Bandung, BAB VII halaman 2

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Keinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kota Bandung.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			
1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun

1.2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
		Harapan Lama Sekolah	Tahun
1.3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/Orang/Tahun
		Angka Kemiskinan	Persen
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel			
2.1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota			
3.1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah
3.2	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota			
4.1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks
4.2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks
4.3	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks

Sumber: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 050/kep.1059 Bappelitbang/2024



Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 050/kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung serta BAB VIII Tabel 8.1 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

2.3.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen



dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,22
1.2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,06
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25
1.3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/Orang/Tahun	18.216
		Angka Kemiskinan	Persen	4,20
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel				
2.1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,11 (BB)
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota				
3.1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah	236.687.605
3.2	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,27
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota				
4.1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7,81
4.2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7,66
4.3	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks	7,15

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,22
1.2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,06
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25
1.3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/Orang/ Tahun	18.216
		Angka Kemiskinan	Persen	4,20
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel				
2.1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,11 (BB)
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota				
3.1	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah	236.687.605
3.2	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,27
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota				
4.1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7,81
4.2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7,66
4.3	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks	7,15



2.3.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan Pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.8.133.180.000.136,00 dengan capaian realisasi Rp Rp.7.067.211.608.536,00 atau 86,89% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2024
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Operasi	6.989.901.172.551,79	6.285.557.823.998,00	89,92
2	Belanja Modal	1.002.885.797.904,21	781.389.294.527,00	77,91
3	Belanja Tidak Terduga	113.490.559.680,00	264.490.011,00	0,23
4	Belanja Transfer	26.902.470.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		8.133.180.000.136,00	7.067.211.608.536,00	86,89

Sumber: BKAD Kota Bandung 2024

Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp26.902.470.000,00. Anggaran transfer tersebut diperuntukkan bagi siswa yang rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sesuai kewenangan maka untuk SMA dan SMK, penyaluran dana dilakukan melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melalui belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2024 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah; dan
5. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp6.989.901.172.551,79 dengan capaian realisasi Rp6.285.557.823.998,00 atau 89,92% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2024
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	2.742.015.351.387,04	2.533.766.065.534,00	92,41
2	Belanja Barang dan Jasa	3.721.100.196.877,75	3.251.568.938.521,00	87,38
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah	443.879.573.718,00	421.758.760.693,00	95,02
5	Belanja Bantuan Sosial	80.906.050.569,00	76.464.059.250,00	94,51
JUMLAH		6.989.901.172.551,79	6.285.557.823.998,00	89,92

Sumber: BKAD Kota Bandung 2024

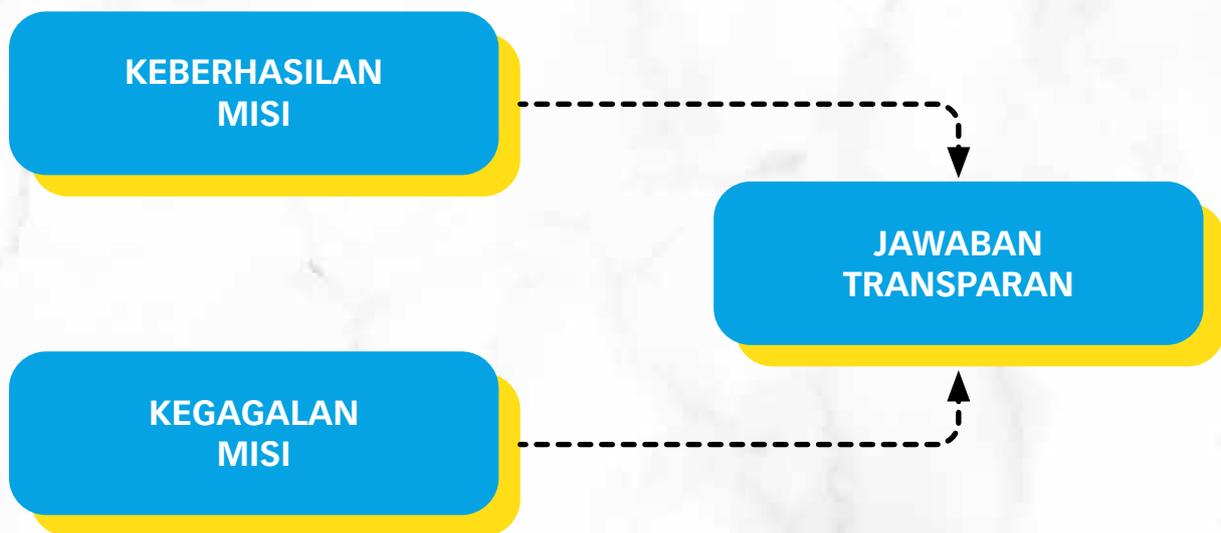
Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Umur Harapan Hidup	2.008.566.397.726	1.164.053.070.472	58%
2	Rata-rata Lama Sekolah	852.099.294.504	746.191.861.013	88%
3	Harapan Lama Sekolah	172.733.809.780	158.014.616.668	91%
4	Pengeluaran Per Kapita	5.326.182.006	5.257.036.533	99%
5	Angka Kemiskinan	401.754.954.778	293.270.890.514	73%
6	Indeks Reformasi Birokrasi	1.757.901.559.274	1.428.879.829.100	81%
7	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	142.677.987.948	135.571.036.688	95%
8	Tingkat Penangguran Terbuka	131.450.287.147	124.365.520.835	95%
9	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	597.968.509.414	534.305.418.855	89%
10	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	1.497.573.317.009	1.258.710.589.788	84%
11	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Pelaksanaan Program pada Indikator Indeks Liveable City Aspek Ekonomi tercantum pada Sasaran 1.3, Sasaran 3.1 dan Sasaran 3.2	-	-
JUMLAH		7.481.812.805.579	5.804.168.827.975	78%

2.3.6 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bandung menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja.

Gambar 2.2
Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2024



Secara umum, Akuntabilitas Kinerja artinya jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal itu, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga: Perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.8
Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Abu-abu

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) Indikator yang tertuang dalam

BAB VIII Tabel 8.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2021.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.22	75,83	100,81%
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.06	11,07	100,09%
		2.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.25	14,25	100,00%
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	3.1	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/Orang/Tahun	18.216	18,795	103,18%
		3.2	Angka Kemiskinan	Persen	4,2	3,87	107,86%
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77.11 (BB)	87,30	113,21%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	5.1	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah	236.687.605	233.053.790	98,46%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	6.1	Tingkat Penangguran Terbuka	Persen	9.27	7,4	120,17%
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	7.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7.81	8,33	106,66%

8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	8.1	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7.66	7,78	101,57%
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	9.1	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks	7.15	6,73	94,13%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- A. **Tujuan 1** : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pertama tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran ‘Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat’, ‘Meningkatnya Pendidikan Masyarakat’ dan ‘Meningkatnya Standar Hidup Layak’.
- Umur Harapan Hidup, dengan capaian 100,81.%
 - Rata-Rata Lama Sekolah, dengan capaian 100,09%
 - Harapan Lama Sekolah, dengan capaian 100%
 - Pengeluaran perkapita, dengan capaian 103,18%
 - Angka Kemiskinan, dengan capaian 107,86%
- B. **Tujuan 2** : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel, mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran ‘Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel’.
- Indeks Reformasi Birokrasi, dengan capaian 113,21.%
- C. **Tujuan 3** : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan ketiga tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran ‘Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota’ dan ‘Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota’.
- PDRB ADHK, dengan capaian 98,46%
 - Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan capaian 120,17%
- D. **Tujuan 4** : Meningkatkan Kelayakhunian Kota, memiliki makna terciptanya kota layak huni atau liveable city yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan keempat tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu: ‘Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya’, ‘Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur’, dan ‘Meningkatnya Kelayakhunian Kota

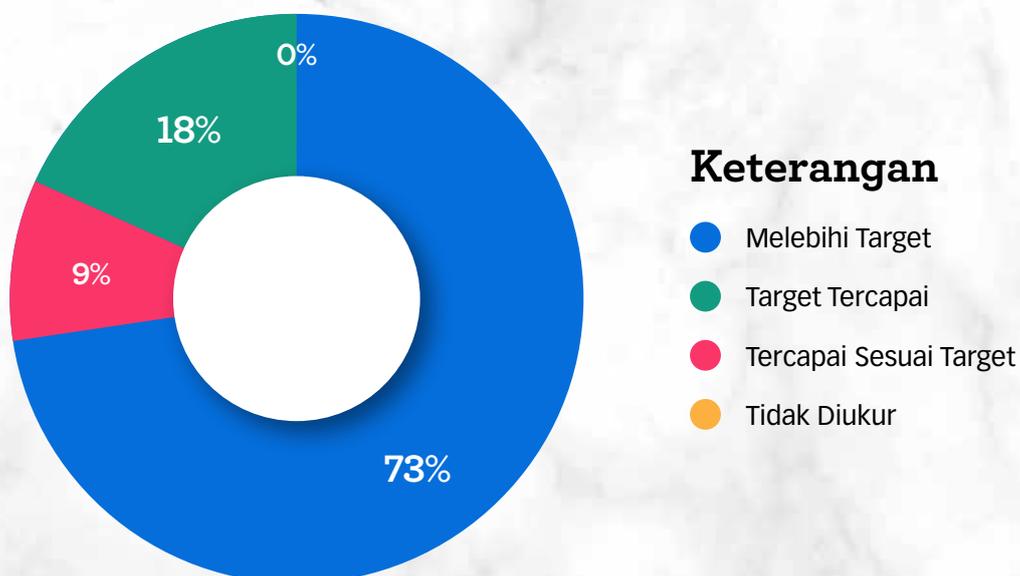


Aspek Ekonomi'. Adapun rincian ketiga sasaran strategis RPD menggambarkan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan kota yang layak huni, diuraikan sebagai berikut:

- Indeks Livable City Aspek Sosial Budaya, dengan capaian 106,66.%
- Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, dengan capaian 101,57%
- Indeks Livable City Aspek Ekonomi, dengan capaian 94,13%

Grafik 2.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024**



Predikat	Kode Warna	Jumlah Indikator
Melebihi Target	Blue	8
Tercapai Sesuai Target	Red	1
Tidak Tercapai	Green	2
Tidak Diukur	Orange	0
Total		11

Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Program-program pembangunan 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bandung 2024-2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Pemerintah Kota Bandung sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Tujuan pada RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Berkenaan dengan Tujuan Pemerintah Kota Bandung, tercatat ada 4 (empat) Tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.



2.3.7 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan pencapaian Tujuan secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandung Tahun 2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1	Sasaran	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
2	Sasaran	2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Sebanyak	2	Indikator
3	Sasaran	4	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Sebanyak	2	Indikator
4	Sasaran	6	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Sebanyak	1	Indikator
5	Sasaran	7	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Sebanyak	1	Indikator
6	Sasaran	8	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Sebanyak	1	Indikator
7	Sasaran	9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Sebanyak	1	Indikator
8	Sasaran	10	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sebanyak	1	Indikator
9	Sasaran	11	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Sebanyak	1	Indikator

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran, dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome) yang telah ditetapkan dalam RPD dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut :

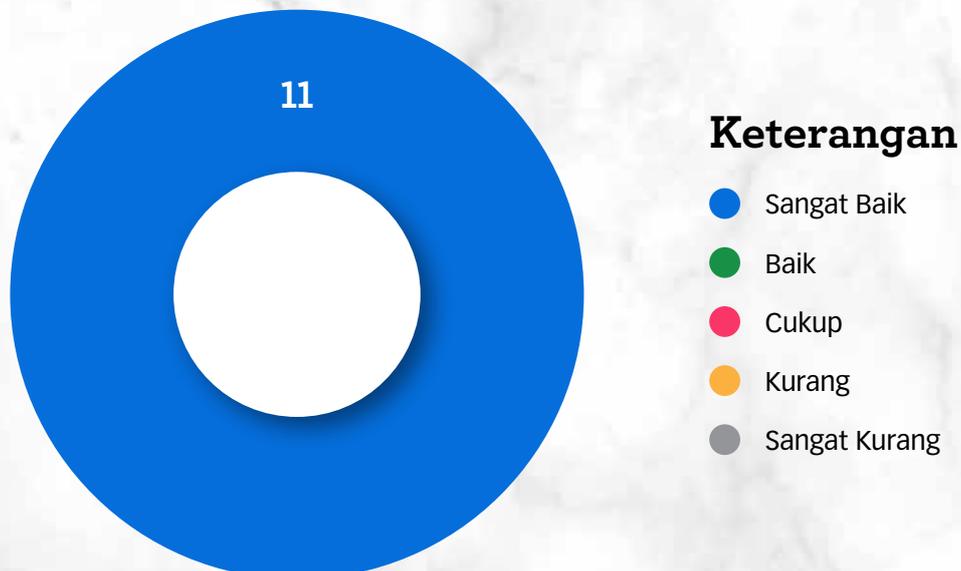
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.22	75,83	100,81%
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.06	11,07	100,09%
		2.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.25	14,25	100,00%
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	3.1	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah/Orang/Tahun	18.216	18,795	103,18%
		3.2	Angka Kemiskinan	Persen	4,2	3,87	107,86%
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77.11 (BB)	87,30	113,21%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	5.1	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Juta Rupiah	236.687.605	233.053.790	98,46%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	6.1	Tingkat Penangguran Terbuka	Persen	9.27	7,4	120,17%
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	7.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7.81	8,33	106,66%
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	8.1	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7.66	7,78	101,57%

9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	9.1	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Indeks	7.15	6,73	94,13%
---	---	-----	------------------------------------	--------	------	------	--------



Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Grafik 2.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024



Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Predikat	Kode Warna	Jumlah Indikator
Sangat Baik	 	11
Baik	 	0
Cukup	 	0
Kurang	 	0
Sangat Kurang	 	0
Total		11



Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	KRITERIA				
				0 - 49.9 (Sangat Kurang)	50.00- 64.99 (Kurang)	65.00- 74.99 (Cukup)	75.00- 89.99 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,81%					Sangat Baik

2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	100,05%					Sangat Baik
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	2	105,52%					Sangat Baik
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel								
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	1	113,21%					Sangat Baik
Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota								
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	1	98,46%					Sangat Baik
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	1	120,17%					Sangat Baik
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota								
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	1	106,66%					Sangat Baik
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	1	101,57%					Sangat Baik
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	1	94,13%					Sangat Baik



Tabel 2.13
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUM-LAH INDI-KA-TOR	PERSEN-TASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
				MELAMPAUI TARGET		SESUAI TARGET		BELUM MEN-CAPAI TARGET	
				>100%		100%		<100%	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia									
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,81%	1	100,81%				
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	100,05%	1	100,09%	1	100%		
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	2	105,52%	2	105,52%				
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel									
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	1	113,21%	1	113,21%				
Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota									
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	1	98,46%					1	98,46%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	1	120,17%	1	120,17%				
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota									
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	1	106,66%	1	106,66%				
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	1	101,57%	1	101,57%				
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	1	94,13%					1	94,13%



2.3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik, dengan demikian seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.8.133.180.000.136,00 dengan capaian realisasi Rp.7.067.211.608.536,00, atau 86,89% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Realisasi Belanja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023
(Sebelum Audit BPK-RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Operasi	6.989.901.172.551,79	6.285.557.823.998,00	89,92
2	Belanja Modal	1.002.885.797.904,21	781.389.294.527,00	77,91
3	Belanja Tidak Terduga	113.490.559.680,00	264.490.011,00	0,23
4	Belanja Transfer	26.902.470.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		8.133.180.000.136,00	7.067.211.608.536,00	86,89

Sumber: BKAD Kota Bandung Tahun 2024

Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp26.902.470.000,00. Anggaran transfer tersebut diperuntukkan bagi siswa yang rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sesuai kewenangan maka untuk SMA dan SMK, penyaluran dana dilakukan melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melalui belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2023 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah; dan
5. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp6.989.901.172.551,79 dengan capaian realisasi Rp6.285.557.823.998,00 atau 89,92% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2023
(Sebelum Audit BPK RI)

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	2.742.015.351.387,04	2.533.766.065.534,00	92,41
2	Belanja Barang dan Jasa	3.721.100.196.877,75	3.251.568.938.521,00	87,38
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah	443.879.573.718,00	421.758.760.693,00	95,02
5	Belanja Bantuan Sosial	80.906.050.569,00	76.464.059.250,00	94,51
JUMLAH		6.989.901.172.551,79	6.285.557.823.998,00	89,92

Sumber: BKAD Kota Bandung Tahun 2024

Tabel 2.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Umur Harapan Hidup	2.008.566.397.726	1.164.053.070.472	58%
2	Rata-rata Lama Sekolah	852.099.294.504	746.191.861.013	88%
3	Harapan Lama Sekolah	172.733.809.780	158.014.616.668	91%
4	Pengeluaran Per Kapita	5.326.182.006	5.257.036.533	99%
5	Angka Kemiskinan	401.754.954.778	293.270.890.514	73%
6	Indeks Reformasi Birokrasi	1.757.901.559.274	1.428.879.829.100	81%
7	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	142.677.987.948	135.571.036.688	95%
8	Tingkat Penangguran Terbuka	131.450.287.147	124.365.520.835	95%
9	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	597.968.509.414	534.305.418.855	89%
10	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	1.497.573.317.009	1.258.710.589.788	84%
11	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	Pelaksanaan Program pada Indikator Indeks Liveable City Aspek Ekonomi tercantum pada Sasaran 1.3, Sasaran 3.1 dan Sasaran 3.2	-	-
JUMLAH		7.481.812.805.579	5.804.168.827.975	78%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2024. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUM-LAH INDI-KATOR SASAR-AN	PERSEN-TASE RA-TA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN		TING-KAT EFEKTI-FITAS
				REALISASI (Rp)	%	
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,81%	1.164.053.070.472	58%	173,95%
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	100,05%	904.206.477.681	90%	111,75%
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	2	105,52%	298.527.927.047	86%	122,91%
Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel						
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	1	113,21%	1.428.879.829.100	81%	139,28%
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota						
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	1	98,46%	135.571.036.688	95%	103,63%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	1	120,17%	124.365.520.835	95%	127,02%
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota						
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	1	106,66%	534.305.418.855	89%	119,37%
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	1	101,57%	1.258.710.589.788	84%	120,84%
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	1	94,13%	-	-	-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Bandung.



Analisa Efisiensi

Data yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 9 (Sembilan) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7 (Tujuh) sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.18
Tingkat Efisiensi terhadap
Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	JUM- LAH INDI- KATOR SASAR- AN	PERSEN- TASE RATA-RATA CAPAIAN KI- NERJA SASARAN	PERSEN- TASE REALISASI ANGGAR- AN	TINGKAT EFISIENSI
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,81%	57,95%	42,86%
2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	100,05%	89,52%	10,52%
3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	2	105,52%	85,85%	19,67%

Tujuan 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel					
4	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	1	113,21%	81,28%	31,93%
Tujuan 3 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota					
5	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	1	98,46%	95,02%	3,45%
6	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	1	120,17%	94,61%	25,56%
Tujuan 4 Meningkatkan Kelayakhunian Kota					
7	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	1	106,66%	89,35%	17,30%
8	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	1	101,57%	84,05%	17,52%
9	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	1	94,13%	-	-



2.3.9 ANALISIS PENCAPAIAN PER SASARAN STRATEGIS

TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

SASARAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Sasarannya berupa Umur Harapan Hidup. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 1 (satu) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Umur Harapan Hidup	75,22	75,83	100,81	75,78
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,81			

Sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “Umur Harapan Hidup” yaitu dari target tahun 2024 yaitu 75,22 tercapai melebihi target yaitu 75,83 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,81%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 75,78 tahun maka capaian kerjanya 100,07%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Umur Harapan Hidup** Provinsi Jawa Barat 75,16 dan merupakan yang tertinggi ke 2 diantara 27 Kabupaten/Kota setelah Kota Bekasi yaitu 76,14 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka harapan Hidup dihitung oleh BPS berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian.

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk.

Umur Harapan Hidup dijadikan indikator sasaran dan Indikator Kinerja pada Sasaran RPD karena UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat



kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja nyata UHH adalah sebesar 75.04 dari target 74.98 yang direncanakan. Data ini diperoleh dari : <https://bandungkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mzg3MyMx/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-bandung--uhh-splf2020---20202024.html>.

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG
Beranda Rencana Terbit Produk Layanan Informasi Publik

Terakhir Diperbarui : 22 Januari 2025

← Kembali
Unduh
</> JSON
Bagikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung (UHH SPLF2020), 2020-2024
Bandung City Human Development Index (HDI) (UHH SPLF2020), 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
UHH (SP2020LF) (tahun)	74,82	74,98	75,26	75,53	75,83
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,2	14,21	14,23	14,24	14,25
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,75	10,99	11	11,06	11,07
Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	16887	16916	17639	18236	18795
IPM (UHH SPLF 2020)	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

UHH 75.83 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 75.83 tahun. Realisasi UHH dibandingkan dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini dapat terlihat secara lebih jelas pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.3
Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019-2024



Sumber: Data Olahan Substansi Program Data dan Informasi Tahun 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 sampai dengan tahun 2024. UHH mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2024 adalah sebesar 0.79. Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana telah direncanakan dalam Target akhir RPJMD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Pencapaian Indikator Sasaran 1
Dibandingkan Target Akhir RPJMD Kota Bandung
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2024	RENCANA SESUAI DENGAN RPD TAHUN 2026	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENGJANGAN
1	Umur Harapan Hidup	%	75.83	75,78	100.06	0.05

Sumber: Data Olahan Substansi Program Data dan Informasi Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel diatas maka pencapaian Sasaran 1 sampai dengan tahun 2024 telah melebihi Target akhir RPD yang ditetapkan. Perbandingan capaian indikator kinerja UHH Kota Bandung dengan Kabupaten Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2024

No	Wilayah Jawa Barat	Angka Harapan Hidup					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat		72.85	73.04	73.23	73.52	73.80	75,16
1	Bogor	71.01	71.17	71.36	71.65	71.92	74,9
2	Sukabumi	70.73	70.97	71.21	71.54	71.83	74,85
3	Cianjur	69.91	70.13	70.32	70.58	70.79	74,8
4	Bandung	73.4	73.53	73.72	74.01	74.27	75,23
5	Garut	71.22	71.41	71.59	71.85	72.07	74,87
6	Tasikmalaya	69.21	69.47	69.67	69.95	70.19	74,06
7	Ciamis	71.57	71.83	72.02	72.3	72.57	75,26
8	Kuningan	73.35	73.59	73.78	74.03	74.29	75,22
9	Cirebon	71.82	71.99	72.18	72.47	72.76	74,98
10	Majalengka	69.97	70.27	70.46	70.76	71.05	74,98
11	Sumedang	72.29	72.43	72.62	72.91	73.19	75,29
12	Indramayu	71.37	71.63	71.84	72.15	72.46	74,82
13	Subang	72.13	72.35	72.58	72.92	73.24	75,08
14	Purwakarta	70.8	70.99	71.18	71.47	71.74	74,92
15	Karawang	71.98	72.15	72.33	72.62	72.90	75,16
16	Bekasi	73.56	73.68	73.81	74.04	74.30	75,33
17	Bandung Barat	72.18	72.34	72.52	72.79	73.10	75,06
18	Pangandaran	71.12	71.4	71.6	71.89	72.17	75,11
19	Kota Bogor	73.41	73.61	73.82	74.13	74.45	75,8
20	Kota Sukabumi	72.26	72.42	72.58	72.85	73.11	75,11
21	Kota Bandung	74.14	74.28	74.46	74.75	75.04	75,83
22	Kota Cirebon	72.13	72.26	72.44	72.74	73.08	75,48
23	Kota Bekasi	74.89	75.01	75.19	75.48	75.79	76,14
24	Kota Depok	74.31	74.44	74.62	74.92	75.23	75,82
25	Kota Cimahi	73.89	74.03	74.21	74.5	74.80	75,55
26	Kota Tasikmalaya	71.93	72.15	72.34	72.63	72.92	75,31
27	Kota Banjar	70.79	70.99	71.19	71.49	71.80	74,99

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODc1ZlI=/umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-hasil-long-form-sp2020.html>

Dari table di atas dapat dilihat bahwa realisasi UHH Kota Bandung pada Tahun 2024 (75.83) telah melebihi realisasi UHH Provinsi Jawa Barat (75.16) . Kota Bandung menempati urutan kedua capaian UHH tertinggi setelah Kota Bekasi (76.14).

Pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) dari bidang kesehatan didukung antara lain oleh :

A. Meningkatnya Perilaku Sehat

Sasaran Meningkatnya Perilaku Sehat memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase PHBS dan Persentase Pembudayaan Hidup Sehat. Adapun capaian kinerja untuk indikator persentase PHBS sebesar 110,73 % dengan realisasi sebesar 77,06 % telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 69,59 %. Pencapaian ini didorong oleh ketersediaan anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Sementara itu realisasi untuk indikator persentase pembudayaan hidup sehat sebesar 88,18 % telah melebihi target 84,61 % sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 104,22 %. Pencapaian ini didorong oleh adanya peningkatan kegiatan pelaksanaan germas dalam setiap implemetasi germas untuk mendukung pembudayaan hidup sehat.

B. Meningkatnya Capaian SPM Lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh indikator Persentase SPM Lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat. Tahun 2024 realisasi untuk indicator ini sebesar 91,58 %, telah melebihi target yang ditetapkan 88,35%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,66%. Pencapaian kinerja ini di dorong oleh adanya dukungan anggaran, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, kolaborasi dan dukungan lintas sektor dslam melakukan upaya2 meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar dan lansia





C. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya sumber daya kesehatan didukung oleh beberapa indikator antara lain Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Terstandarisasi Lingkup Dinas Kesehatan dengan realisasi 25% telah melebihi target yang ditetapkan 20%, ketercapaian kinerjanya sebesar 125.0%. Untuk realisasi kinerja indikator Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 99.87% dengan target 100, capaian kinerja sebesar 99.87%. Cakupan Prasarana Kesehatan yang terstandarisasi lingkup dinas kesehatan memiliki realisasi 25.0% melebihi target 20%, sehingga capaian kinerja sebesar 125.0 %. Sementara itu untuk indikator Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan IRTP sesuai standar lingkup dinas kesehatan sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Dan untuk indikator Cakupan Kebijakan Regulasi Kesehatan sebesar 100% telah sesuai dengan target 100%. Pencapaian realisasi untuk semua target telah melebihi target, hal ini didorong oleh tersedianya SDM yang kompeten, tersedianya bahan sebagai dasar materi muatan kebijakan Kesehatan, adanya dukungan dan arahan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan serta kerjasama lintas program dan lintas sektor.

D. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat. Adapun realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan sebesar 88.99 nilai telah melebihi target 88.31 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100.77%. Adapun faktor pendorong pencapaian indikator adalah adanya dukungan dari atasan/ pimpinan terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Alur pelayanan sudah berjalan sesuai SOP, adanya tindak lanjut langsung oleh puskesmas terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat. Sementara itu untuk indikator Indeks Keluarga Sehat dengan realisasi 0,21 telah melebihi target 0.20 Indeks sehingga capaian kinerjanya sebesar 105.0 %. Walaupun realisasi kinerja telah melebihi target, namun hasil pendataan ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bandung masih

termasuk dalam kategori keluarga tidak sehat. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan PIS PK masih ditemui adanya hambatan, antara lain kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan intervensi terhadap keluarga yang telah di data dan pendataan terhadap keluarga yang belum didata, kerjasama lintas program dan lintas sector belum optimal, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIS PK belum optimal.

E. Terkendalinya Penyakit

Sasaran terkendalinya penyakit terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 100%, telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Adapun untuk indikator Cakupan SPM Lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2024 ini realisasi sebesar 100%, telah melebihi target 97%, sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 103.09 %. Pencapaian kinerja didukung oleh tersedianya dukungan anggaran, tersedianya SOP, dukungan dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama lintas program dan lintas sektor.

F. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Lingkup UPTD Puskesmas

Dalam mendukung sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan perorangan dan Masyarakat lingkup UPTD Puskesmas terdiri dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD Puskesmas dengan realisasi sebesar 88.87 Indeks telah melebihi target 87.25 Indeks sehingga capaian kinerja indikator tersebut sebesar 101.86%. Selanjutnya untuk indikator Persentase PHBS Lingkup UPTD Puskesmas dengan realisasi sebesar 77.06 dengan target 69.59 %, dengan capaian kinerja sebesar 110.73%. Sementara itu untuk indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup UPTD Puskesmas realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%.

G. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Lingkup UPTD Laboratorium

Pada sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat lingkup UPTD laboratorium terdapat 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD Laboratorium dan indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup UPTD Laboratorium. Realisasi untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD Laboratorium sebesar 88.76 indeks telah melebihi target 88.31 indeks, dengan capaian sebesar 100.51 %. Sedangkan untuk indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup UPTD Laboratorium realisasinya sebesar 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

H. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Lingkup UPTD P2KT

Sasaran meningkatnya pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat lingkup UPTD P2KT memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD P2KT dan indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup UPTD P2KT. Adapun realisasi untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD P2KT sebesar 88.31 Indeks telah sesuai dengan target yang ditetapkan 88.31 %, sehingga capaian kinerja 100%.

I. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Kesehatan

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan kesehatan didukung oleh indikator antara lain Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dengan realisasi

59.85 % telah sesuai dengan target 100%, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 100%. Untuk realisasi indikator Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Dinas Kesehatan sebesar 100% telah sesuai dengan target. Adapun untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 90 nilai, sesuai dengan target yang ditetapkan, dan untuk indikator Cakupan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terstandarisasi lingkup sekretariat ketercapaian kinerjanya sebesar 100%. Ketercapaian kinerja didukung oleh tersedianya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan, serta kerjasama lintas sektor dan lintas program

J. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Bandung. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki :

- a. 3 RS milik Pemerintah yaitu RSKIA, RSUD, RSKGM dan 41 RS Milik Swasta
- b. 82 UPT terdiri dari 80 UPT Puskesmas yang tersebar di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, 1 UPT P2KT dan 1 UPT Laboratorium Kesehatan

K. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan.

Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dari 7 indikator diperoleh 3 indikator (42.86%) melebihi/melampaui target, 2 indikator (28.57%) sesuai target, dan 2 indikator (28.57%) tidak mencapai target. Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator tersebut sebagai berikut :

A. Angka Kematian Ibu. faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Penyediaan alat bantu diagnosis berupa mesin Ultra Sonography (USG) di Puskesmas sebagai dukungan pelaksanaan skrining kesehatan Ibu hamil sehingga faktor risiko kehamilan dapat diketahui dan ditatalaksana sedini mungkin;
- b. Mendorong pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah terkait termasuk aparat kewilayahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengkampanyekan pemanfaatan Buku KIA serta pelaksanaan webinar kelas ibu sebagai panduan pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga balita untuk mendorong kesadaran yang pada akhirnya dapat memunculkan perubahan perilaku dari Masyarakat;
- c. Perbaikan pencatatan dan pelaporan dari Fasyankes melalui Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notifications) dan pemanfaatan AMP-SR.

B. Prevalensi Stunting, faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Alat antropometri sudah terstandar pada semua posyandu sehingga hasil pengukuran lebih akurat;
- b. Input hasil pengukuran sudah terlaksana secara rutin pada aplikasi e- penting dan e-ppgbm;
- c. Beberapa intervensi sudah dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting yaitu berupa pemberian Tablet Tambah Darah serta Aksi Bergizi pada remaja putri, skrining anemia remaja putri, pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin, kelas ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, pemberian PMT kepada ibu hamil, pemberian PMT kepada balita dengan status gizi kurang, berat badan kurang dan balita T (tidak naik berat badan), kelas ibu balita, pemeriksaan perkembangan balita, edukasi gizi, pelacakan kasus, serta konseling dan penyuluhan dalam dan luar gedung;



- d. Telah dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka percepatan penurunan stunting;
- e. Peningkatan akses sanitasi dan ODF
- f. Akses Sanitasi Layak : 100%;
 - Kelurahan ODF : 151 (komitmen ODF 2023);
 - Kelurahan STBM : 5 kelurahan (3,31%);
 - Akses Air Minum : 95,82% (TW III 2024);
- g. Kader sudah mendapatkan pelatihan antropometri, walaupun masih memerlukan pelatihan dan pendampingan untuk melakukan pengukuran balita menggunakan alat antropometri yang terstandar (700 kader terlatih 5,64%);
- h. Pemberdayaan Masyarakat, terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kader melalui perubahan perilaku (merokok di dalam rumah, PHBS dll).

C. Angka Kejadian Penyakit (AKP). Faktor pendorong tercapainya target cakupan pengendalian penyakit menular (TBC), tidak menular (Hipertensi) dan Kejadian Luar Biasa adalah:

- a. Deteksi dini dan temuan kasus yang meningkat terutama kasus Hipertensi, DM dan TB
- b. Peningkatan layanan Perawatan Dukungan Pengobatan HIV
- c. Peningkatan peran LSM dan Kader dalam deteksi dini Penyakit
- d. SDM sudah terlatih
- e. Terdapat regulasi dan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan program
- f. Penambahan pelaporan Hipertensi dan Diabetes Melitus dari Klinik dan RS yang sudah aktif
- g. Pencatatan dan pelaporan terstandarisasi

D. Persentase Unit Kerja Dinkes Memiliki Indeks Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Adapun faktor pendorong tercapainya kinerja untuk indikator Persentase Unit Kerja Dinkes Memiliki Indeks Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik di Triwulan IV adalah:

- a. Persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sudah sesuai dengan yang ada di Puskesmas
- b. Pemahaman tentang Kemudahan prosedur pelayanan di setiap unit sudah dimengerti oleh pasien
- c. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sudah sesuai standar
- d. Biaya/ tarif dalam pelayanan sudah sesuai dengan Perda Kota Bandung
- e. Kesesuaian jenis pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
- f. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan tupoksi
- g. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah bagus dan 5S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun) sudah diterapkan
- h. Penanganan pengaduan selalu ditindaklanjuti
- i. Sarana dan prasarana sudah memadai

Adapun dalam pencapaian Umur Harapan Hidup masih ditemukan beberapa **faktor penghambat** pencapaian indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya tenaga Kesehatan secara kualitas dan kuantitas serta belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan di Puskesmas
2. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi
3. Masih adanya kasus balita gizi buruk dan stunting di Kota Bandung
4. Masih tingginya penyakit menular, penyakit tidak menular, dan munculnya penyakit baru (Triple burden disease)
5. Belum meratanya Akses Layanan Kesehatan di seluruh kecamatan, terutama di wilayah yang padat penduduk



6. Belum optimalnya sarana prasarana Kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
7. Masih adanya anggapan bahwa masalah kesehatan merupakan tugas Dinkes saja padahal untuk menyelesaikan permasalahan Kesehatan perlu adanya sinergi berbagai sektor. Dinkes tidak bisa bekerja sendiri. dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah ini secara bersama-sama

Berdasarkan hal diatas, ada beberapa **rekomendasi perbaikan** terhadap pencapaian Indikator Umur Harapan Hidup di Tahun 2025 sebagai berikut :

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja nyata AHH adalah sebesar 75.04 dari target 74.98 yang direncanakan sehingga Persentase capaian kinerjanya adalah 100.08%. AHH 75.04 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 75.04 tahun.

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut. yaitu:

a. Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang dan peranan terbesar yaitu sebesar 40% . Lingkungan sangat bervariasi. umumnya digolongkan menjadi dua kategori. yaitu :

Lingkungan Fisik baik natural atau buatan manusia misalnya sampah, air, udara dan perumahan, dan sosiokultur (ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain).

Lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, tanah, iklim, perumahan, dan sebagainya. Lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi buruk dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit. Hal ini jelas membahayakan kesehatan masyarakat kita. Terjadinya penumpukan sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik, polusi udara, air dan tanah juga dapat menjadi penyebab. Upaya menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk itulah perlu kesadaran semua pihak. Dinas Kesehatan, memiliki Puskesmas dimana Puskesmas sendiri memiliki program kesehatan lingkungan yang berperan besar dalam mengukur, mengawasi, dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakat, namun dilematisnya di puskesmas jumlah tenaga kesehatan lingkungan sangat terbatas padahal banyak penyakit yang berasal dari lingkungan kita seperti diare, demam berdarah, malaria, TBC, cacar dan sebagainya. Adanya sanitasi lingkungan yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Lingkungan sosial merupakan hasil interaksi antar manusia seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga interaksi individu satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan baik. Kondisi lingkungan sosial yang buruk dapat menimbulkan masalah kejiwaan. Selain itu lingkungan sosial berkaitan juga dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu/masyarakat maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik maka akan semakin sulit, misalnya manusia membutuhkan makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup, jika individu/masyarakat berada pada garis kemiskinan maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi seimbang. Demikian juga dengan tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat maka pengetahuan untuk hidup sehat akan semakin baik, lingkungan sosial berkaitan juga dengan tingkat Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan individu maupun masyarakat maka

pengetahuan akan cara hidup sehat semakin baik.

b. Perilaku (Life Styles)

Perilaku (30%) merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya: dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Misalnya: pada masyarakat tradisional di mana sarana transportasi masih sangat minim maka masyarakat terbiasa berjalan kaki dalam beraktivitas, sehingga individu/masyarakat senantiasa menggerakkan anggota tubuhnya (berolah raga). Pada masyarakat modern di mana sarana transportasi sudah semakin maju, maka individu/masyarakat terbiasa beraktivitas dengan menggunakan transportasi seperti kendaraan bermotor sehingga individu/masyarakat kurang menggerakkan anggota tubuhnya (berolah raga). Kondisi ini dapat beresiko mengakibatkan obesitas pada masyarakat modern karena kurang berolah raga ditambah lagi kebiasaan masyarakat modern mengkonsumsi makanan cepat saji yang kurang mengandung serat. Fakta tersebut akan mengakibatkan transisi epidemiologis dari penyakit menular ke penyakit degeneratif.

c. Pelayanan Kesehatan (Health Care Services)

Pelayanan kesehatan (20%) merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat dijangkau atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan.

Kondisi pelayanan kesehatan juga menunjang derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas sangatlah dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan posyandu, puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya untuk membantu dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan. Terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang memang banyak dibutuhkan masyarakat. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan juga mesti ditingkatkan.

Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat besar perannya, sebab di puskesmaslah akan ditangani masyarakat yang membutuhkan edukasi dan perawatan primer.

d. Genetik / Keturunan (Heriditas)

Faktor keturunan/genetik (10%) ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia

Berpedoman pada teori tersebut di atas, keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan semata namun merupakan tanggung jawab bersama antara



unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar di tahun-tahun mendatang angka harapan hidup meningkat, maka pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat perlu bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Upaya peningkatan Kesehatan Lingkungan yang perlu dilakukan adalah :

- i. Perbaikan kualitas lingkungan fisik bertujuan untuk menghindari Lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi buruk yang dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat .
- ii. Perbaikan kualitas lingkungan social bertujuan untuk memperbaiki :
 - Kondisi perekonomian suatu masyarakat karena Semakin miskin individu/ masyarakat maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit.
 - Tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat maka pengetahuan untuk hidup sehat akan semakin baik.

b. Peningkatan Perilaku Sehat

Upaya peningkatan perilaku sehat yang perlu dilakukan adalah dengan penerapan program Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup perilaku individu & keluarga dalam rangka meningkatkan kesehatannya serta perilaku kelompok dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Sebagai indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) setiap rumah tangga harus terpenuhi 10 kriteria terdiri dari :

- Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan
- Memberi bayi ASI eksklusif
- Menimbang bayi dan balita
- Menggunakan air bersih

- Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- Menggunakan jamban sehat
- Memberantas jentik di rumah
- Makan buah dan sayur setiap hari
- Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- Tidak merokok di dalam rumah.

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar yang perlu dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan sumber daya dan prosedur pelayanan yang meliputi : sumber daya manusia (petugas kesehatan yang profesional), sumber daya sarana dan prasarana (bangunan dan sarana pendukung) serta sumber daya dana (pembiayaan kesehatan) yang memadai .

d. Peningkatan Upaya Pencegahan Resiko Penyakit Genetik

Agar masyarakat dapat terhindar dari Resiko Penyakit Genetik genetik diperlukan intervensi pendidikan kesehatan disertai upaya pendekatan kepada pengambil keputusan (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penguasa wilayah). Intervensi berupa pendidikan kesehatan melalui konseling genetik, penyuluhan usia reproduksi, persiapan pranikah dan pentingnya pemeriksaan genetik dapat mengurangi resiko munculnya penyakit atau masalah kesehatan pada keturunannya.



SASARAN Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Pendidikan Masyarakat. Sasaran-sasarannya berupa Angka **Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,06	11,07	100,09	11,17
2	Harapan Lama Sekolah	14,25	14,25	100	14,27
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,05			

Sasaran **Meningkatnya Pendidikan Masyarakat** dapat dilihat dari sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) **“Rata-rata Lama Sekolah”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 11,06 tercapai melebihi target yaitu 11,07 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,09%.

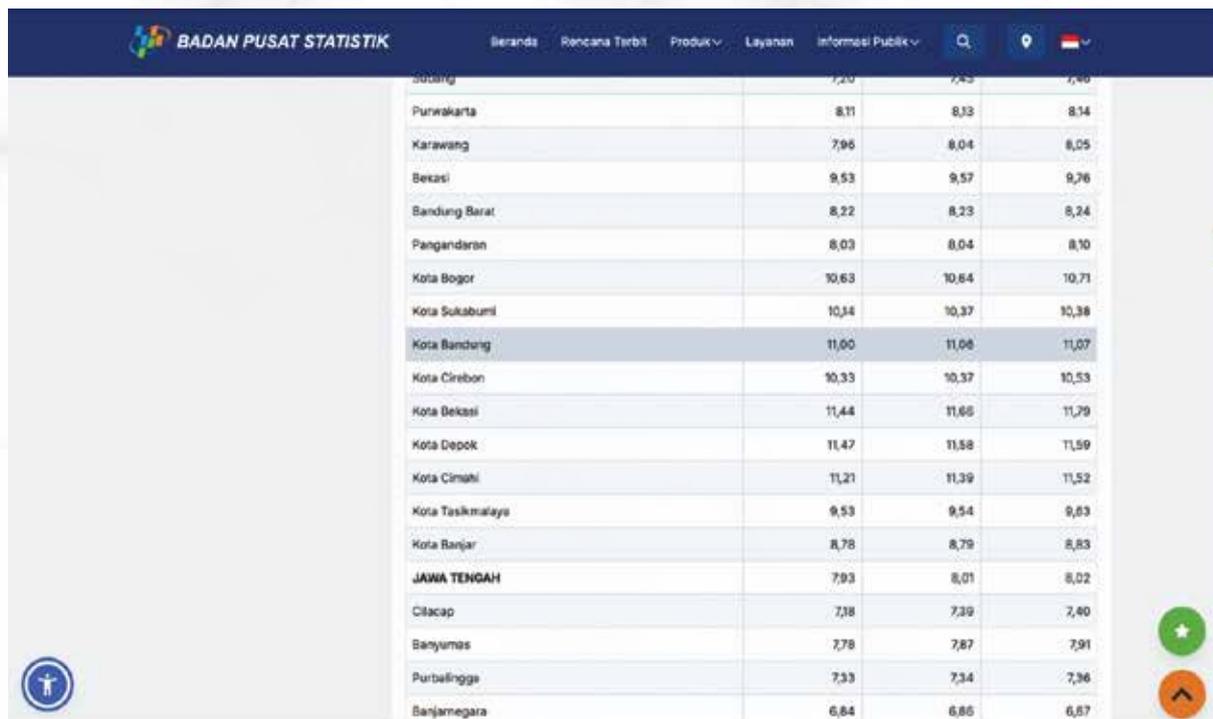
Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 11,17 tahun maka capaian kerjanya 99,10%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Rata-rata Lama Sekolah** Kota Bogor tahun 2024 sebesar 10,71 tahun.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) **“Harapan Lama Sekolah”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 14,25 tercapai sesuai target yaitu 14,25 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 14,27 tahun maka capaian kerjanya 99,86%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Harapan Lama Sekolah** Kota Bogor tahun 2024 sebesar 13,51 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.



Provinsi	2020	2021	2022
Purwakarta	8,11	8,13	8,14
Karawang	7,96	8,04	8,05
Bekasi	9,53	9,57	9,76
Bandung Barat	8,22	8,23	8,24
Pangandaran	8,03	8,04	8,10
Kota Bogor	10,63	10,64	10,71
Kota Sukabumi	10,14	10,37	10,38
Kota Bandung	11,00	11,06	11,07
Kota Cirebon	10,33	10,37	10,53
Kota Bekasi	11,44	11,66	11,79
Kota Depok	11,47	11,58	11,59
Kota Cimahi	11,21	11,39	11,52
Kota Tasikmalaya	9,53	9,54	9,63
Kota Banjar	8,78	8,79	8,83
JAWA TENGAH	7,93	8,01	8,02
Cilacap	7,18	7,39	7,40
Banyuwangi	7,78	7,87	7,91
Purbalingga	7,33	7,34	7,36
Banjarnegara	6,84	6,86	6,87

Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2.3
Juara I Kreativitas Musik Tradisional



Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{P15+} \sum_{i=1}^{P15+} xi$$

Keterangan:

- MYS : Rata-rata lama sekolah
 P15+ : Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
 Xi : Lama sekolah penduduk ke i

Tabel 2.23
Analisis Pencapaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
		Tar-get	Real-isasi										
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,76	10,99	102,13	10,77	11,00	102,14	10,78	11,06	102,60	11,06	11,07	100,09

Capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 yaitu dari target 11,06 tahun tercapai melebihi target yaitu 11,07 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,09%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 11,06 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2024 sebesar 11,17 maka capaian kerjanya 99,10%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian RLS Kota Bogor tahun 2024 sebesar 10,71 tahun. Dengan semakin tingginya RLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah diukur oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berikut grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2024:

Grafik 2.4
Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah



Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

2. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai sasaran Kota Meningkatnya Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah kota Bandung memiliki dua strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas Pendidikan dengan meningkatnya APK PAUD dan Pendidikan Dasar serta APM Pendidikan Dasar dan terwujudnya mutu pembelajaran dengan meningkatkan angka kelulusan pendidikan dasar dan kesetaraan. Untuk meningkatkan indicator startegi tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Rata-Rata Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
- Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP

3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
4. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

Koordinasi dengan kewilayahan terkait verifikasi, validasi data anak tidak sekolah dan membuat program pengentasan anak tidak sekolah di Kota Bandung

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Provinsi	2019	2020	2021
Sorling	12,99	13,01	13,02
Indramayu	12,27	12,29	12,32
Subang	11,78	11,91	12,11
Purwakarta	12,13	12,18	12,25
Karawang	12,10	12,20	12,21
Bekasi	13,11	13,17	13,18
Bandung Barat	11,89	11,91	12,00
Pangandaran	12,11	12,30	12,31
Kota Bogor	13,43	13,45	13,51
Kota Sukabumi	13,59	13,60	13,62
Kota Bandung	14,23	14,24	14,25
Kota Cirebon	13,14	13,16	13,17
Kota Bekasi	14,11	14,12	14,14
Kota Depok	13,94	13,96	14,11
Kota Cimahi	13,82	13,84	13,85
Kota Tasikmalaya	13,47	13,49	13,50
Kota Banjar	13,25	13,27	13,28
JAWA TENGAH	12,81	12,85	12,88
Cilacap	12,86	12,67	12,69
Banyumas	13,21	13,26	13,34

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

- EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
 E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
 P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$);
 FK : Faktor koreksi

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2011-2023. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,24 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang 14,23 tahun.

Tabel 2.24
Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
		Tar-get	Real-isasi										
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,21	14,21	100,00	14,22	14,23	100,07	14,23	14,24	100,07	14,25	14,25	100,00

Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 yaitu dari target 14,25 tahun tercapai melebihi target yaitu 14,25 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,00%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 14,24 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 14,27 maka capaian kerjanya 99,86 %. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bogor tahun 2024 sebesar 13,51 tahun. Dengan semakin tingginya HLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berikut grafik perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2024:

Grafik 2.5
Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah



Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator Harapan Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Program Pengembangan Kurikulum
Kegiatan:
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan:
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai sasaran kota meningkatnya Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah Kota Bandung memiliki tiga strategi yaitu **Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan dengan meningkatnya APK PAUD dan Pendidikan Dasar serta APM Pendidikan Dasar, Pendidikan Bermutu dengan meningkatkan angka kelulusan pendidikan dasar dan kesetaraan dan Berkurangnya anak sekolah dengan memberikan jaminan Pendidikan.** Untuk meningkatkan indikator startegi tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Harapan Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP
3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
4. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi :

Koordinasi dengan kewilayahan terkait verifikasi, validasi data anak tidak sekolah dan membuat program pengentasan anak tidak sekolah di Kota Bandung.

SASARAN Meningkatnya Standar Layak Hidup

Meningkatnya Standar Layak Hidup. Sasaran-sasarannya berupa **Pengeluaran Per Kapita dan Angka Kemiskinan.** Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Standar Layak Hidup
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Pengeluaran Per Kapita	18.216	18.795	103,18	18.807
2	Angka Kemiskinan	4,2	3,87	107,86	3,957
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		105,52			

Sasaran **Meningkatnya Standar Layak Hidup** dapat dilihat dari sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) **“Pengeluaran Per Kapita”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 18.216 tercapai melebihi target yaitu 18.795 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 103,18%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 18.807 maka capaian kerjanya 99,94%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Pengeluaran Per Kapita** Provinsi Jawa Barat, maupun Pengeluaran Perkapita pada tingkat nasional, Pengeluaran Perkapita Kota Bandung masih lebih tinggi. Demikian pula pada sisi peningkatan Pengeluaran Perkapita Kota Bandung yang sebesar Rp.559.000,00 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengeluaran Perkapita Provinsi sebesar Rp.462.000,00 maupun pada tingkat nasional yang naik sebesar Rp.532.000,00. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) **“Angka Kemiskinan”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 4,2 tercapai melebihi target yaitu 3,87 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 107,86.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 3,957 tahun maka capaian kerjanya 102,20%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, maupun **Angka Kemiskinan** pada tingkat nasional, Angka Kemiskinan Kota Bandung menunjukkan angka yang lebih rendah. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menurunkan angka kemiskinan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun demikian, penurunan Angka Kemiskinan Kota Bandung sebesar **0,09%** jauh lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar **0,16%** maupun pada tingkat nasional yang turun sebesar **0,33%**.

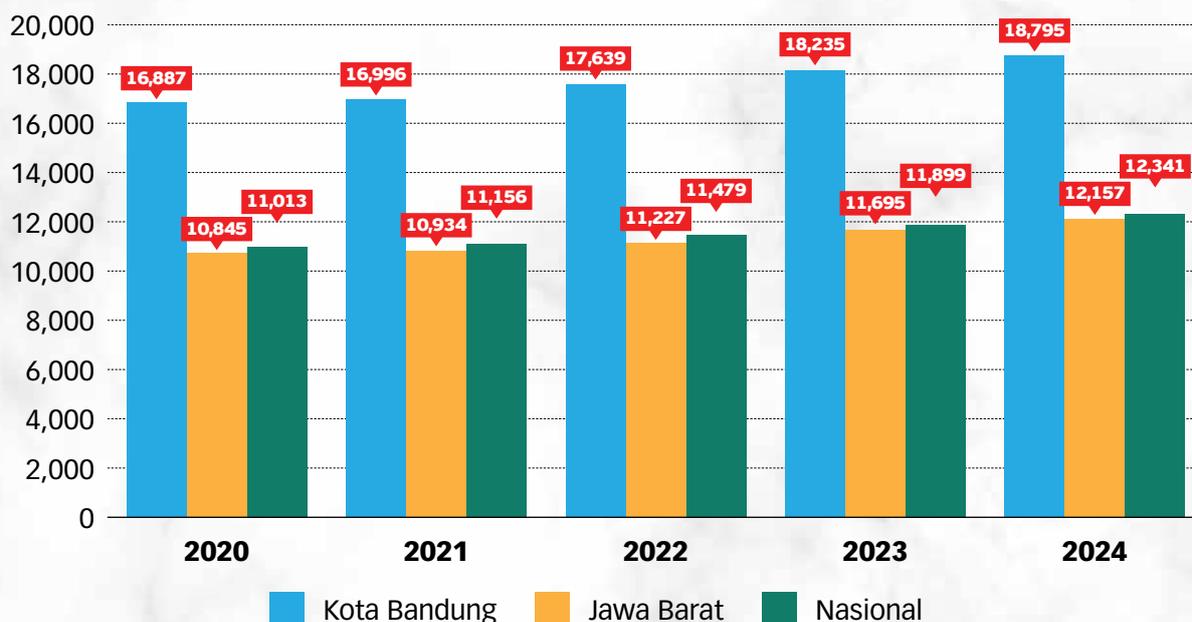
Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah/tahun) menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 sebesar Rp.18.795.000,00, telah mencapai target tahun 2024 pada RPD Kota Bandung 2024-2026 setinggi Rp.18.216.000,00 dengan capaian kinerja tahun sebesar 103,01%. Bila dibandingkan dengan Target akhir RPD di tahun 2026 yaitu Rp.18.807.000,00 maka capaiannya sebesar 99,94%.

Dibandingkan dengan Pengeluaran Perkapita Provinsi Jawa Barat, maupun Pengeluaran Perkapita pada tingkat nasional, Pengeluaran Perkapita Kota Bandung masih lebih tinggi. Demikian pula pada sisi peningkatan Pengeluaran Perkapita Kota Bandung yang sebesar Rp.559.000,00 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengeluaran Perkapita Provinsi sebesar Rp.462.000,00 maupun pada tingkat nasional yang naik sebesar Rp.532.000,00. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perkembangan capaian Pengeluaran Perkapita dari tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik berikut.

Grafik 2.6

Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Bandung 2020-2024



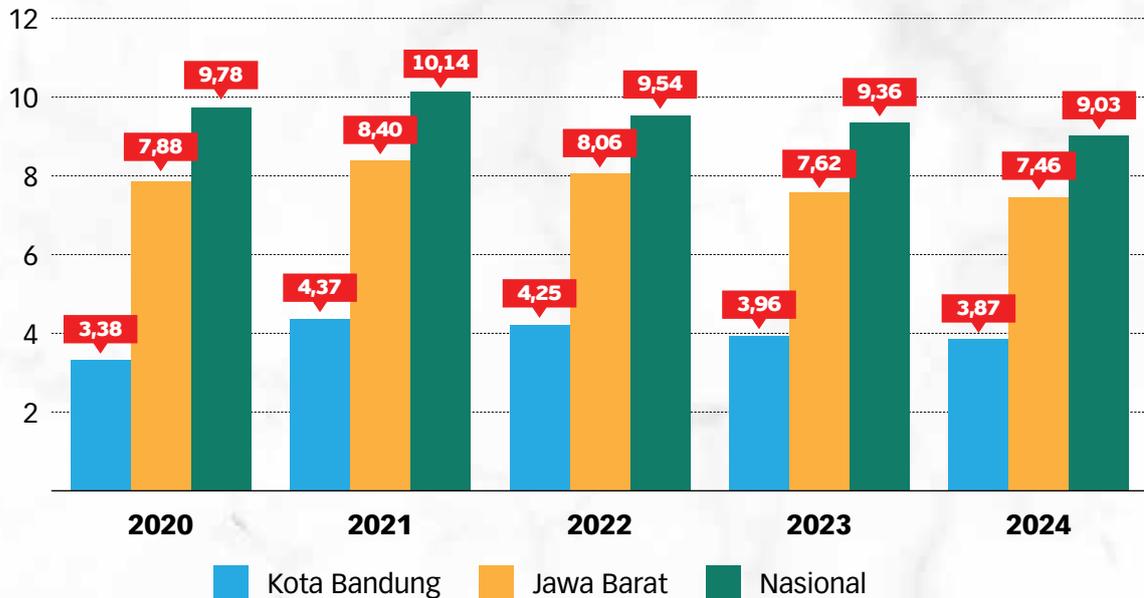
Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak yang diukur melalui indikator Angka Kemiskinan menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 sebesar 3,87%, telah mencapai target tahun 2024 pada RPD Kota Bandung 2024-2026 sebesar 4,20% dengan capaian kinerja tahun sebesar 107,86%. Bila dibandingkan dengan Target akhir RPD di tahun 2026 yaitu 4,15% maka capaiannya sebesar 107,95%.

Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, maupun Angka Kemiskinan pada tingkat nasional, Angka Kemiskinan Kota Bandung menunjukkan angka yang lebih rendah. Ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menurunkan angka kemiskinan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun demikian, penurunan Angka Kemiskinan Kota Bandung sebesar 0,09% jauh lebih rendah

dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang turun sebesar 0,16% maupun pada tingkat nasional yang turun sebesar 0,33%. Perkembangan capaian penurunan Angka Kemiskinan dari tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik berikut.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Bandung 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2025

Meningkatnya Standar Hidup Layak dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Indikator upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin adalah dengan mengusahakan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan ketercapaian 100%.

Upaya lain dilakukan dengan mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat kurang mampu yakni dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan (beras). Penerima manfaat adalah diprioritaskan warga miskin yang telah terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako. Bantuan beras yang diberikan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Bandung dengan kualitas harga premium. Bantuan beras diberikan kepada setiap keluarga sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024. Selama tahun 2024, telah disalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras untuk masyarakat miskin sebanyak 20,6 ton untuk 240 KK.

2. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin

Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan dengan sasaran Terlaksananya Bantuan Reguler, Bantuan Khusus, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Berkebutuhan Khusus dengan indikator :

- a. Persentase Ketepatan Sasaran Warga miskin menerima bantuan reguler dengan target capaian 100% dan tercapai 100%.



- b. Jumlah Warga Miskin Kelompok Berkebutuhan Khusus menerima bantuan dan Rehabilitasi Sosial target capaian 100% dan tercapai 100%.
- c. Jumlah Warga Miskin Memiliki Jamkesmas target capaian 87.402 dan tercapai 100%.
- d. Persentase Ketepatan Sasaran Warga Miskin Menerima Bantuan Khusus dari target 100% tercapai 100%.

Upaya lain dilakukan dengan Meningkatkan Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dari target 86% tercapai 100%.

Disamping bantuan beras yang secara rutin diberikan dalam rangka mewujudkan kecukupan pangan masyarakat miskin, juga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem salah satunya berfokus pada sektor budidaya perikanan. Pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan dilakukan dalam upaya untuk memberikan kesadaran, kemampuan, keahlian serta kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh para pembudidaya perikanan, dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi pembentukan kelompok sesuai potensinya. Indikator sasaran Pembudidaya Ikan untuk Mendapat Pelatihan serta Bantuan Sarana Perikanan menjadi indikator penting dalam upaya Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Bandung.

Cara Pengukuran Indikator Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan Sarana Perikanan maupun Pelatihan Perikanan yaitu dengan menyediakan data by name by address yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (P3KE) dibuktikan dengan hasil verifikasi ke lapangan dengan pendampingan dari unsur kewilayahan setempat. Pada Tahun 2024, telah terpenuhi target pemberian bantuan sarana perikanan serta pelatihan perikanan kepada Masyarakat yang tergolong P3KE berjumlah 20 orang. Rincian sarana perikanan yang diberikan yaitu:

- Aquarium sebanyak 24 buah;
- Pompa Aquarium sebanyak 12 buah; dan
- Pakan ikan sebanyak 40 karung.

3. Menurunnya wilayah kantong kemiskinan masyarakat miskin

a. Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

Menurunnya wilayah kantong kemiskinan masyarakat miskin berkaitan dengan pemenuhan sanitasi dan kelayakhunian rumah. Sejak tahun 2019, konsep air minum layak yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Tabel 2.26

Perkembangan Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia 2020-2024

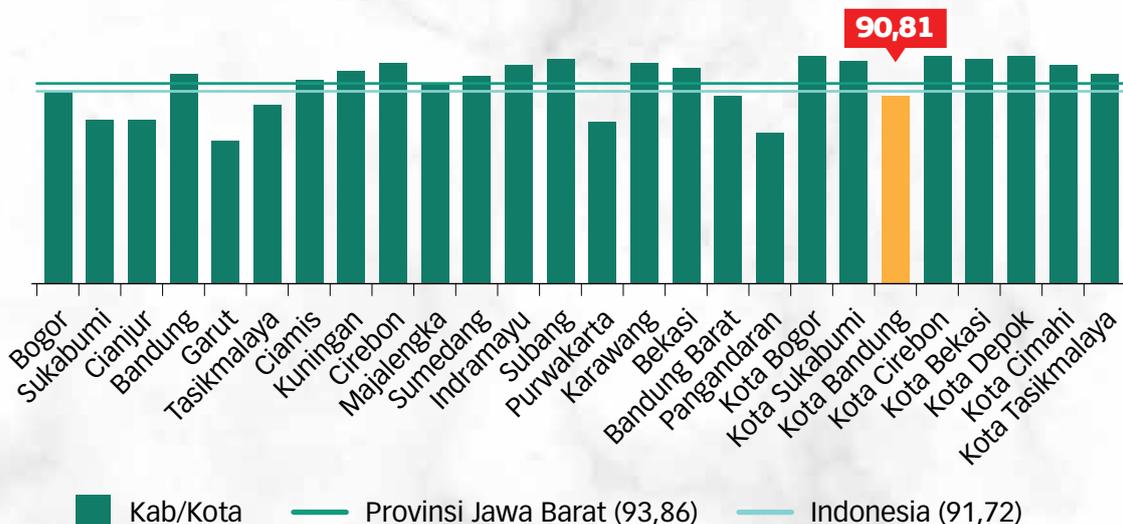
Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	n/a	79,24	83,01	82,13	90,81
Provinsi Jawa Barat	92,13	91,83	93,04	93,86	94,90
Indonesia	90,21	90,78	91,05	91,72	92,64

Sumber: BPS, 2024 dan DPKP, 2024

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Kota Bandung pada tahun 2024 adalah sebesar 90,81%.

Grafik 2.8

Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2024



Sumber: BPS, 2024 dan DPKP, 2024

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai capaian Kota Bandung, pada tahun 2024 sebanyak 90,81% rumah tangga sudah mengakses air minum layak, dimana terdapat 9,19% rumah tangga yang belum dapat mengakses air minum layak di Kota Bandung.

b. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sejak tahun 2019 konsep sanitasi layak yang digunakan mengacu pada metadata SDGs terbaru dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di pedesaan.

Tabel 2.27

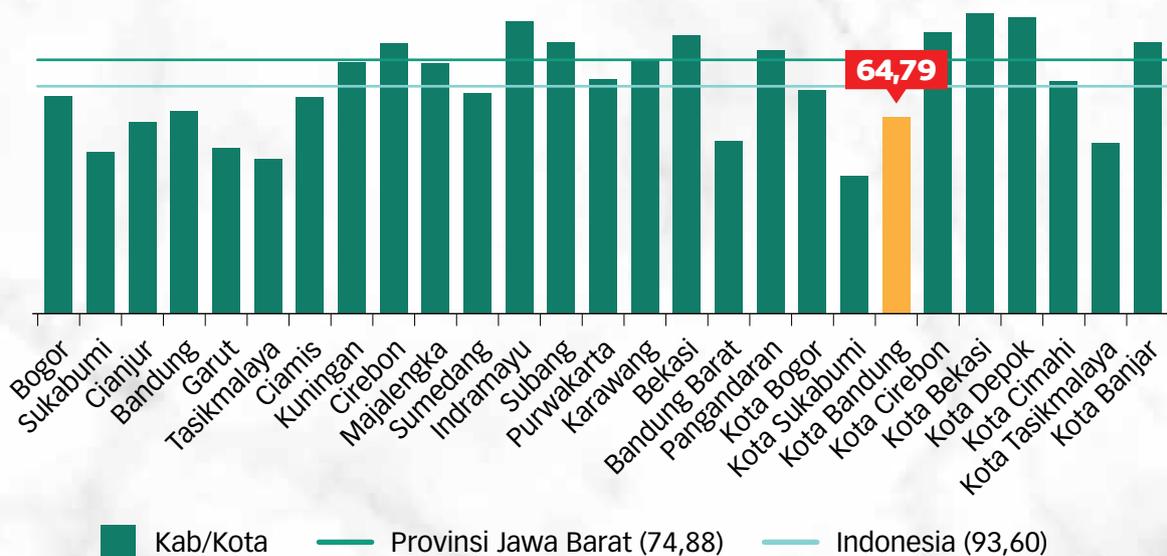
Perkembangan Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	n/a	77,05	68,58	70,36	64,79
Provinsi Jawa Barat	71,4	71,66	74,02	74,88	75,10
Indonesia	79,53	80,29	80,92	83,60	83,60

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak Kota Bandung pada tahun 2024 adalah sebesar 64,79%.

Grafik 2.9

Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2024



Sumber: BPS, 2024 dan DPKP 2024



Pada akhir tahun 2024, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Bandung sebesar 64,79% artinya masih ada 35,21% rumah tangga yang belum dapat mengakses sanitasi layak. Sanitasi menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan.

c. Hunian Layak

Selain akses terhadap air minum dan sanitasi layak, infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah hunian yang layak. Meningkatnya Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni, dengan capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2024 dilakukan dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni. Capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 7,14% dari target 3,25%. Jumlah rumah masyarakat miskin layak huni yang telah diperbaiki sebanyak 999 unit bersumber dari APBD Kota Bandung.

Jumlah rumah masyarakat miskin layak huni pada tahun 2023 sebanyak 4.038, sehingga total sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 5.037 unit. Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah masyarakat miskin di Kota Bandung adalah sebanyak 70.552 unit sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dapat dihitung sebesar 7,14%.

Faktor Pendukung

1. **Capaian Target yang Melebihi Ekspektasi:** Pengeluaran per kapita Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai Rp. 18.795.000,00, melebihi target RPD tahun 2024 yang sebesar Rp. 18.216.000,00. Ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi kota Bandung sudah sesuai bahkan sedikit lebih baik dari yang diharapkan.
2. **Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil:** Capaian persentase kinerja sebesar 103,01% menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mendukung ekonomi Kota Bandung, seperti perdagangan, industri, dan pariwisata, berkembang dengan baik.
3. **Perbandingan yang Positif dengan Provinsi dan Nasional:** Pengeluaran per kapita Kota Bandung yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat dan nasional menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki daya beli dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi, yang mencerminkan perekonomian yang sehat dan berkembang.
4. **Kebijakan yang Efektif:** Kebijakan daerah yang mendukung pembangunan ekonomi, serta investasi yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan pembangunan infrastruktur kota, turut mendukung capaian ini.

Faktor Penghambat

1. **Ketergantungan pada Sektor Tertentu:** Meskipun capaian baik, ketergantungan pada sektor tertentu seperti perdagangan atau jasa dapat menjadi penghambat bila terjadi ketidakstabilan di sektor-sektor tersebut (misalnya, krisis global atau penurunan daya beli masyarakat).
2. **Ketimpangan Antar Wilayah:** Meski capaian per kapita lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dan nasional, masih ada kemungkinan ketimpangan antar wilayah dalam Kota Bandung itu sendiri. Beberapa daerah dalam kota mungkin mengalami kondisi ekonomi yang lebih lemah, yang dapat mempengaruhi pengeluaran per kapita secara keseluruhan.



3. **Tantangan Eksternal:** Fluktuasi ekonomi global atau nasional, seperti inflasi yang tinggi atau perubahan kebijakan ekonomi, bisa berpengaruh pada daya beli dan pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bandung.
4. **Tantangan Pembangunan Infrastruktur:** Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Bandung mengalami perkembangan, jika tidak didukung dengan kebijakan yang tepat atau investasi yang optimal, akan ada pembatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata.

Rekomendasi atau Solusi

1. **Diversifikasi Ekonomi:** Untuk menjaga agar pencapaian pengeluaran per kapita tetap stabil, penting untuk mendiversifikasi sektor ekonomi Kota Bandung agar tidak bergantung terlalu banyak pada sektor tertentu. Mengembangkan sektor seperti teknologi, industri kreatif, dan pariwisata bisa memperkuat perekonomian.
2. **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas:** Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas antar wilayah, akan membantu meningkatkan efisiensi ekonomi serta mempermudah distribusi barang dan jasa.
3. **Pengentasan Ketimpangan Ekonomi:** Mengurangi ketimpangan antar wilayah dalam Kota Bandung dengan memperkenalkan kebijakan yang fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kota. Ini bisa mencakup program pemberdayaan ekonomi di kawasan yang kurang berkembang.
4. **Stabilitas Makroekonomi:** Menjaga kebijakan yang dapat memastikan stabilitas makroekonomi daerah, misalnya melalui pengendalian inflasi, kebijakan fiskal yang tepat, dan peningkatan daya beli masyarakat.
5. **Memperhatikan Pembangunan Berkelanjutan:** Mengarahkan kebijakan pembangunan agar berfokus pada keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, agar capaian kinerja pengeluaran per kapita tidak hanya mencapai target, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
6. **Meningkatkan Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Kota Bandung bisa memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan menciptakan peluang lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita warga kota.

Angka Kemiskinan

Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa kriteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m²/orang); dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

Tabel 2.28
Rekapitulasi Data Warga yang Tercantum dalam DTKS
Per Kecamatan Tahun 2022-2024

NO	KECAMATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%
1	ANDIR	15.537	4,56	15.167	4,58	13.675	4,64
2	ANTAPANI	7.088	2,08	6.741	2,04	6.341	2,15
3	ARCAMANIK	9.219	2,71	8.758	2,65	7.665	2,60
4	ASTANAANYAR	9.572	2,81	9.249	2,80	8.366	2,84
5	BABAKAN CIPARAY	23.312	6,85	22.755	6,88	20.294	6,88
6	BANDUNG KIDUL	7.944	2,33	7.757	2,34	7.139	2,42
7	BANDUNG KULON	19.769	5,81	19.568	5,91	18.142	6,15
8	BANDUNG WETAN	3.276	0,96	3.224	0,97	2.866	0,97
9	BATUNUNGGAL	19.306	5,67	19.175	5,80	17.651	5,99
10	BOJONGLOA KALER	24.324	7,15	23.376	7,06	20.194	6,85
11	BOJONGLOA KIDUL	12.637	3,71	12.148	3,67	10.745	3,64
12	BUAHBATU	11.649	3,42	11.518	3,48	10.425	3,54
13	CIBEUNYING KALER	8.044	2,36	8.006	2,42	7.077	2,40
14	CIBEUNYING KIDUL	15.444	4,54	15.247	4,61	14.415	4,89
15	CIBIRU	11.709	3,44	11.032	3,33	10.004	3,39
16	CICENDO	12.184	3,58	11.732	3,55	9.702	3,29
17	CIDADAP	6.613	1,94	6.571	1,99	5.973	2,03
18	CINAMBO	3.617	1,06	3.542	1,07	3.267	1,11

19	COBLONG	15.221	4,47	14.664	4,43	12.164	4,13
20	GEDEBAGE	4.431	1,30	4.294	1,30	3.913	1,33
21	KIARACONDONG	21.253	6,24	20.350	6,15	17.942	6,08
22	LENGKONG	6.919	2,03	6.610	2,00	5.922	2,01
23	MANDALAJATI	11.032	3,24	10.792	3,26	9.292	3,15
24	PANYILEUKAN	4.120	1,21	3.948	1,19	3.439	1,17
25	RANCASARI	7.721	2,27	7.569	2,29	6.856	2,33
26	REGOL	9.303	2,73	8.967	2,71	8.396	2,85
27	SUKAJADI	14.783	4,34	14.422	4,36	12.574	4,26
28	SUKASARI	7.543	2,22	7.321	2,21	6.233	2,11
29	SUMUR BANDUNG	3.193	0,94	3.197	0,97	3.191	1,08
30	UJUNG BERUNG	13.651	4,01	13.172	3,98	10.995	3,73
JUMLAH		340.414	100	330.872	100	294.858	100

Sumber: DTKS Tahun 2022 – 2024

Grafik 2.10
Warga yang Tercantum dalam DTKS Tahun 2022-2024



Sumber: DTKS Tahun 2022-2024



INSTRUMEN ATAU CARA PENGUKURAN ANGKA KEMISKINAN

I. Penduduk Miskin

Konsep:

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

II. Garis Kemiskinan (GK)

Konsep:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK : Garis Kemiskinan
GKM : Garis Kemiskinan Makanan
GKNM : Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

III. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

FAKTOR PENDUKUNG

Walaupun target penurunan angka kemiskinan Tahun 2023 di Kota Bandung tidak dapat tercapai, namun demikian jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,29 poin dikarenakan adanya pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandung yang terselenggara dengan baik. Hal ini dikarenakan komitmen dan dukungan pimpinan daerah serta lembaga legislatif dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci suksesnya program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

FAKTOR PENGHAMBAT

Salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian target angka kemiskinan ialah pengeluaran per kapita yang masih rendah. Hal ini dikarenakan Belum adanya alokasi anggaran untuk layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Bandung dan adanya keterlambatan realisasi program bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. seperti BPNT dan PKH.

SOLUSI

Dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin di Kota Bandung, maka pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Bantuan Sosial non-reguler bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penduduk yang terdampak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu solusi guna meminimalisir kendala tersebut ialah Mengalokasikan Anggaran untuk layanan Perlindungan Sosial berupa Bansos yang bersumber dari APBD Kota Bandung.

Berikut kami sajikan data bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2.29
Rekapitulasi Bantuan Sosial pada Tahun 2024

No	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Bantuan (Per KK)	Sumber	Jumlah KPM		Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kriteria	Frekuensi Bantuan
				Target	Realisasi				
1	Bantuan Pangan Daerah	Beras (5 Kg), Telur (1 Kg), Daging Ayam (1 Kg), Tempe (4 papan), Tahu Kuning (12 Pcs), dan Sayur mayur (1 set).	APBD Kota	329	329	100,00	788.593.260	DTKS	Setiap Bulan
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp. 200.000	APBN	101.496	100.028	98,55	210.805.000.000	DTKS	Setiap Bulan
3	Program Keluarga Harapan	Variatif	APBN	50.603	50.250	99,30	126.543.667.639	Penerima PKH	Setiap Bulan

Pj. WALI KOTA BANDUNG Ir. A. KOSWARA M.P.



Adapun Bantuan Sosial Reguler yang setiap tahun diterima oleh warga miskin yang terdaftar dalam DTKS yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan bagi 50.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial Pangan yang ditargetkan bagi 101.496 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terealisasi sebanyak 100.028 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan sebesar Rp. 200.000,- /KPM. Selain Bantuan Sosial Reguler, Pemerintah Kota Bandung memberikan Bantuan Pangan Daerah berupa Beras (5 Kg), Telur (1 Kg), Daging Ayam (1 Kg), Tempe (4 papan), Tahu Kuning (12 Pcs), dan Sayur mayur (1 set) yang diberikan setiap bulan selama satu Tahun.

Dalam menunjang penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.326.182.006,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.257.036.533 atau mencapai 98,70%. Alokasi anggaran tersebut guna menunjang pencapaian pada 1 (satu) program dengan 2 (dua) indikator program, sebagian besar target indikator program dapat tercapai sesuai target bahkan terdapat capaian yang melebihi target indikator program, sehingga capaian indikator program pada Dinas Sosial Tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan capaian atas indikator program tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian target indikator program lebih besar bila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran. Dengan kata lain Dinas Sosial telah secara efisien menggunakan anggaran guna mencapai indikator program, dengan tingkat efisiensi sebesar 101,32%.

TUJUAN 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel

SASARAN Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel

Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel. Sasaran-sasarannya berupa **Indeks Reformasi Birokrasi**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi	77,11	87,30	113,21	80,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		113,21			

Sasaran **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “**Indeks Reformasi Birokrasi**” yaitu dari target tahun 2024 yaitu 77,11 tercapai melebihi target yaitu 87,30 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 113,21%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 80,22 (A) maka capaian kerjanya 108,83%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Bandung tahun 2024 sebesar 87,06.

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamikakompleksitasdantantanganbirokrasiyangsemakinmeningkat.Seiringtingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Reformasi Birokrasi diarahkan kedalam 2 (dua) fokus utama yaitu , Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

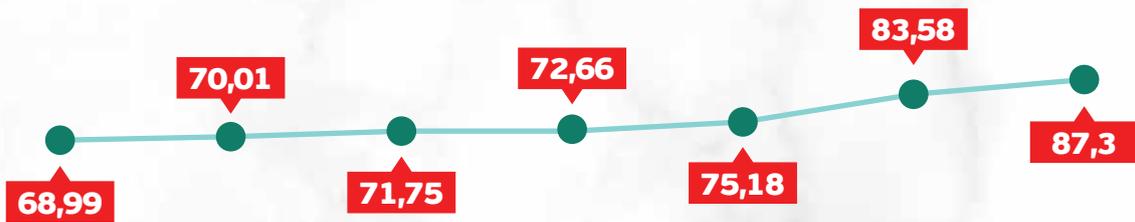
Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan

sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map RB setelah penajaman.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep Reformasi Birokra Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya problem solving-debottlenecking dalam tata kelola pemerintah.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung tahun 2024 adalah 87,30 atau kategori A, melebihi target 77,11 yang dicanangkan pada target RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Atas capaian tersebut maka Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung tahun 2024 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024 adalah 87,30 melebihi target atau 113,21%.

Grafik 2.11
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2018-2024



TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAPAIAN	68,99	70,01	71,75	72,66	75,18	83,58	87,30
SELISIH		1,02	1,74	0,91	2,52	8,4	3,72
PREDIKAT	BB	BB	BB	BB	BB	A-	A

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dari pada tahun 2018 s.d 2024 terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/43/RB.04/2025 Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024, hasil evaluasi sementara menunjukkan Pemerintah Kota Bandung memperoleh Nilai 87,30 atau Predikat A. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada beberapa catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi General

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,67	2,67	.Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024)... Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.	.Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024)...Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.Melakukan reuiu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	58	3,61		
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	4	2,4		Segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tingkat Maturnitas SPIP	4	2,87	2,3	Penetapan Tujuan a) Sasaran strategis, program, kegiatan, sub kegiatan tidak berorientasi hasil; b) Indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak berorientasi hasil, tidak spesifik dan relevan, dan tidak cukup menggambarkan sasaran; c) Target kinerja kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan tidak SMART Struktur dan Proses 1) Struktur Manajemen Risiko belum berjalan optimal dan masih bergantung pada peran Inspektorat; 2) Belum ada bukti bahwa kegiatan pengendalian yang direncanakan telah efektif menurunkan level risiko; 3) Belum dilakukan monitoring atas pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko;	Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Pj. Wali kota Bandung agar: 1. Menetapkan mind map/logical framework/RB tematik dalam kebijakan dan memedomani dalam proses penyusunan perencanaan, 2. Menginternalisasikan mind map/logical framework/RB tematik keseluruhan OPD terkait supaya memiliki pemahaman yang sama dalam pencapaian tujuan; 3. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat. 4. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
				<p>4) Inspektorat telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko namun masih pada keberadaan dokumen risk register belum pada kualitas rumusan pernyataan risiko, penyebab dan RTP; 5) Peningkatan pembinaan manajemen risiko masih berfokus pada SDM Inspektorat dan Subbag Program Perangkat Daerah, belum menjangkau pada Pimpinan dan SDM teknis; 6) Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara memadai; 7) Pengelolaan manajemen risiko belum menggunakan Sistem Informasi. 1) Peraturan Wali kota terkait pengelolaan kecurangan belum ditetapkan; 2) Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait fraud; 3) Saluran pelaporan internal belum dikelola secara memadai; 4) Laporan Audit Investigatif telah ditindaklanjuti berupa pemulihan kerugian dan pengenaan sanksi. Namun atas laporan tersebut belum ada rekomendasi berupa perbaikan pengendalian untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama. Dari hasil penilaian atas pencapaian tujuan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: a) Masih adanya sasaran strategis, program, kegiatan pada Pemerintah Kota Bandung yang belum berjalan secara efektif;</p>	<p>a) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada tingkat Pemda maupun OPD; b) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM melalui pendidikan dan pelatihan terkait manajemen risiko bagi seluruh Struktur Pengelola Risiko baik tingkat Pemda maupun OPD; c) Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis; d) Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR; e) Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat; f) Menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan manajemen risiko. 5. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan: a) Menetapkan kebijakan pengendalian kecurangan; b) Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi mencakup tiga prinsip pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, dekteksi dan respon; c) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan; d) Memberikan rekomendasi atas hasil laporan audit investigatif tidak hanya pemulihan kerugian dan sanksi, tetapi juga perbaikan pengendalian untuk</p>

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
				<p>b) Masih adanya permasalahan yang material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset; c) Masih adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP fokus penilaian pada Penurunan Prevalensi Stunting dan Sektor Ketahanan Pangan: Namun masih terdapat kelemahan, yaitu: a) Logical framework belum ditetapkan melalui kebijakan; b) CSF belum diidentifikasi sampai dengan kondisi teknis/operasional; c) Belum ada analisis atas CSF prioritas yang paling mempengaruhi atas target kinerja yang ditetapkan; d) Belum ada kebijakan penurunan prevalensi stunting; e) Belum seluruh risiko terkait sektor sesuai dengan konteks sasaran strategis pemerintah daerah telah teridentifikasi dalam dokumen risk register; f) Inspektorat Daerah telah melakukan melaksanakan pengawasan berupa audit kinerja atas sektor Penurunan Prevalensi Stunting dan audit ketaatan atas sektor ketahanan pangan, tingkat pemerintah daerah dan OPD terkait, namun belum seluruh konteks sasaran strategis pemerintah.</p>	<p>mencegah terulangnya kejadian yang sama. 6. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah. 7. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai dasar penyusunan pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.</p>
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,5	0,5	0,5		
Nilai SAKIP	4	81,4	3,26	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	77,7	1,94	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	4	2	Masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti beberapa tidak lanjut belum substantif	Perlu menyelesaikan aduan memperbaiki kualitas tindak lanjut
Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	71,5	1,79	a. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik telah dilakukan pada sebagian proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; b. Beberapa bukti dukung dalam setiap proses kebijakan masih perlu diperjelas/disempurnakan.	1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. 2. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan; b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan; c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan. e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analisis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan. 3. Menyempurnakan bukti dukung sesuai catatan validasi LAN.

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Indeks Reformasi Hukum	2,5	87,44	2,19	Kategori A (sangat baik)	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel
Indeks Pembangunan Statistik	2,5	3,04	1,52	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Bandung sudah ada kebijakan SDI berupa Peraturan Walikota Bandung Nomor 11 tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk. Kebijakan tersebut sudah diterapkan dan dilakukan oleh seluruh produsen data. Penerapan Aspek Relevansi terkait relevansi data terhadap pengguna dan proses identifikasi kebutuhan data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/018- Diskominfo tentang Survei dan Akuisisi Data. Penerapan Aspek Akurasi terkait penilaian akurasi data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/019- Diskominfo tentang Pelayanan Pengolahan dan Analisa Data dan sesuai dengan Modul Pengelolaan Data pada Bagian Perancangan, Implementasi, dan Pengolahan Data. Penerapan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Penjaminan Aktualitas Data dan Peman-tauan Ketepatan Waktu Diseminasi telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/055-Diskominfo tentang Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi dan sesuai dengan Modul Pengelolaan Data pada bagian Perancangan, 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk, dan mencantumkan jadwal rutin pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam dokumen kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, dan aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi dengan mengacu pada Bisnis Proses Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terstandar (GSBPM), dan mencantumkan jadwal rutin pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam dokumen kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang mengacu pada Bisnis Proses Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terstandar (GSBPM), dan mencantumkan jadwal rutin pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam dokumen kebijakan tersebut.

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
				<p>Implementasi, dan Pengolahan Data, dan juga Modul Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi pada bagian Diseminasi mengenai Manajemen Rilis. Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan Akses Media Penyebarluasan Data, serta Penyediaan Format Data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/020-Diskominfo tentang Pelayanan Publikasi dan Data Terbuka dan SOP Prosedur Upload Data ke Portal Data Bandung. Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data dan Konsistensi Statistik telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 11 tentang Satu Data Kota Bandung dan SOP Nomor 065/055-Diskominfo tentang Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi. • Penerapan Aspek Perencanaan Data dan Pengumpulan Data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/018-Diskominfo tentang Survei dan Akuisisi Data. Penerapan Aspek Pemeriksaan Data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/019-Diskominfo tentang Pelayanan Pengolahan dan Analisa Data.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait Profesionalitas Kelembagaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dan mencantumkan jadwal rutin pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam dokumen kebijakan tersebut. • • Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait Sosialisasi dan Literasi Data Statistik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan terkait Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan mengacu pada Panduan Ringkas Penggunaan Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online, serta mencantumkan jadwal rutin pelaksanaan reviu dan evaluasi dalam dokumen kebijakan tersebut.

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
				<p>Data Terstandar dan Terintegrasi. • Penerapan Aspek Profesionalisme yang terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 11 tentang Satu Data Kota Bandung dan SOP Nomor 065/055-Diskominfo tentang Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi dan Modul Pengelolaan Data (modul 7), sedangkan terkait Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan sesuai dengan SOP Nomor 065/019-Diskominfo tentang Pelayanan Pengolahan dan Analisa Data dan SOP Nomor 065/076-Diskominfo tentang Prosedur Monitoring dan Evaluasi Data. • Sudah ada standar yang mengatur aspek pemanfaatan data statistik terkait Sosialisasi dan Literasi Data Statistik yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 11 tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung dan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 11 tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung dan SOP Nomor 065/055-Diskominfo tentang Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi.</p>	

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	82,72	2,07	1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%; 4) Terdapat transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%; 6) Pencatatan e-Kontrak di atas 70%; 7) Keterisian JF PPBJ belum memenuhi 100% namun sudah di atas 60%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).	1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan; 4) Pertahankan kinerja realisasi toko daring; 5) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing; 6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak; 7) Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain; 8) Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.
Indeks Sistem Merit	4	359,5	3,51	2022	
Indeks Pelayanan Publik	2	4,68	1,87		
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	93	1,86		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Indeks SPBE	9	4,59	8,27	Predikat Memuaskan	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
Capaian IKU Makro	4	91,34	3,65	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
Capaian IKU Non Makro	6	100	4,89	Seluruh IKU Non Makro berhasil memperoleh capaian kinerja lebih dari 90% (>90%) dari target yang diperjanjikan	Tetap pertahankan dan tingkatkan kinerja yang sudah baik.
Opini BPK	5	2	3,33	WDP	
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	84,92	3,4		

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Indeks BerA- khlak	4	82,86	3,31	Kategori Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
Survei Penilaian Integritas	10	69,14	6,91	Internal: 73.74; Eksternal: 88.54; Eksper: 64.32	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kota Bandung mendapat skor SPI sebesar 69.14. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Bandung dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Bandung sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,28	7,06		0
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	3	1,5	Instansi sudah menyusun Peta Rencana SPBE sesuai standar	Instansi perlu melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi

b. Reformasi Birokrasi Tematik

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,56	0,56	1. Masih ditemukan sebagian kecil indikator Sasaran maupun rencana aksi yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,74	0,74	1. Masih ditemukan sebagian kecil indikator Sasaran maupun rencana aksi yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,72	0,72	1. Masih ditemukan sebagian kecil indikator Sasaran maupun rencana aksi yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,85	0,85	Tingkat Capaian output belum 100%	Memastikan capaian output sudah 100%
Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0	0	1. Masih ditemukan sebagian kecil indikator Sasaran maupun rencana aksi yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART
Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,62	1,62	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS	
Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2,06	2,06	Data Realisasi Investasi yang digunakan Triwulan III 2023	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1,97	1,97	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,97	2,97	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada Kepmen-PANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2481	
Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	

Sumber: TPN Kementerian PAN RB Tahun 2025 (Hasil Nilai Sementara, sebelum proses sanggah/banding selesai)

Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 yaitu mengoptimalkan peran dan tugas tim pelaksana reformasi Birokrasi yang tersusun dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 060/Kep.1239-ORG/2024 tentang Tim Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.



Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024 diperoleh dari beberapa hal yang sudah dilakukan dalam menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 060/Kep.1239-ORG/2024 tentang Tim Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 060/Kep.1239-ORG/2024
TENTANG

TIM STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu dibentuk tim strategi dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- b. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.536-ORG/2024 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.536-ORG/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- c. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.535-ORG/2024 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.535-ORG/2024
TENTANG
RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- d. Menyusun LHEI on going atau pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW IV Tahun 2023
- e. Menyusun LHEI ex ante atau perencanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024
- f. Menyusun LHEI on going atau pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024
- g. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025

Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan penjabaran kinerja Pohon Kinerja / Cascading sampai ke unit terendah yang digunakan sebagai ukuran kinerja individu, dan juga belum memastikan unsur fokus Reformasi Birokrasi General dan Tematik dalam perencanaan kinerja (RPD Tahun 2024-2026) sebagai bahan penyusunan RPJMD / Renstra PD pada periode Kepala Daerah terpilih Tahun 2025
- b. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan program dan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik selaras dengan perencanaan kinerja (RPD dan Renstra PD), sehingga dapat memberikan dampak perbaikan pada peningkatan kinerja khususnya yang menjadi fokus Tema Reformasi Birokrasi Tematik
- c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal
- d. Evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian reward and acknowledgement
- e. Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu :

- a. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi sampai ke perangkat daerah
- b. Melakukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi agen perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya
- c. Melakukan pemantauan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi kebijakan pengawasan internal dan integrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

TUJUAN 3 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

SASARAN Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Kota

Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota. Sasaran-sasarannya berupa **Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	236.687.605	233.053.790	98,46	268.154.064
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		98,46			

Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator **“Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 236.687.605 tidak tercapai atau kurang dari target yaitu 236.687.605 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 98,46%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 268.154.064 maka capaian kerjanya 86,91%. Angka capaian PDRB/ADHK tahun 2023 sebesar 221.250.670 ada kenaikan sebesar 11.803.120 atau 5,33 persen.

PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan) adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu, dengan menggunakan harga yang tetap atau konstan (tidak dipengaruhi oleh inflasi).

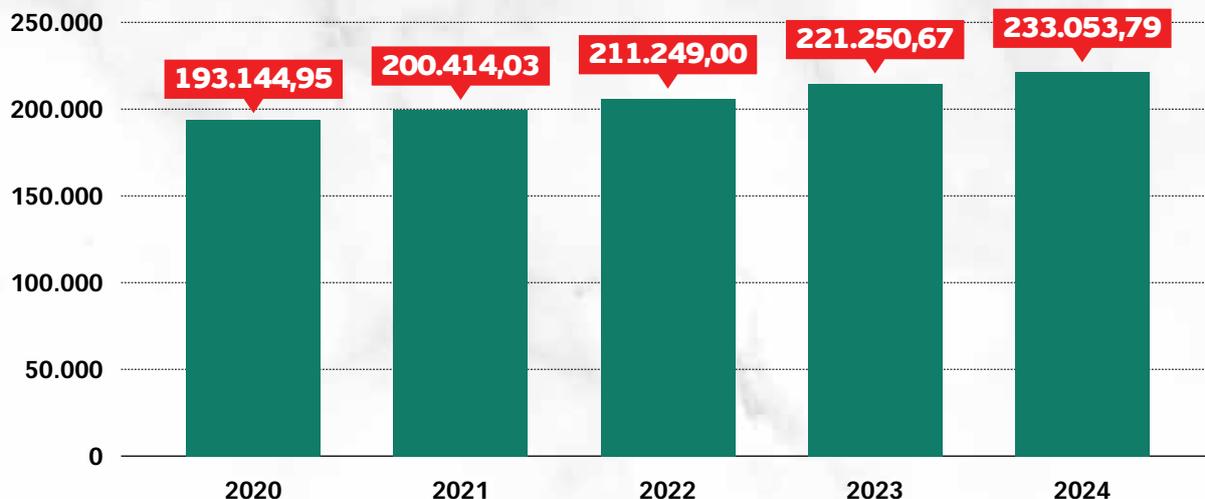
PDRB ADHK berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Ini penting agar bisa mengukur sejauh mana perekonomian daerah berkembang berdasarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, bukan karena perbedaan harga yang terjadi.

Secara sederhana, PDRB ADHK adalah PDRB yang dihitung dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah.

Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Kota, dengan Indikator Kinerjanya adalah PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan). Adapun capaian kinerja PDRB ADHK sebesar 233.053.790 lebih kecil dari targetnya sebesar 236.687.605. Sementara jika dibandingkan dengan PDRB/ADHK tahun 2023 sebesar 221.250.670 ada kenaikan sebesar 11.803.120 atau 5,33 persen.

Tabel Perkembangan PDRB ADHK Kota Bandung selama 5 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.12
Perkembangan PDRB ADHK Kota Bandung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2025

Berikut adalah analisis faktor pendukung, faktor penghambat, serta rekomendasi terkait dengan capaian kinerja PDRB ADHK yang lebih kecil dari target namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Faktor Pendukung:

1. **Kenaikan PDRB ADHK Tahun 2023:** Capaian PDRB ADHK pada tahun 2023 sebesar 221.250.670 dengan kenaikan 5,33% menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini mencerminkan bahwa sektor-sektor ekonomi tertentu berhasil tumbuh meskipun ada kekurangan dibandingkan target.
2. **Sektor Ekonomi yang Berkembang:** Beberapa sektor yang mungkin mengalami pertumbuhan signifikan, seperti sektor industri, perdagangan, atau pertanian, bisa menjadi faktor pendukung terhadap kenaikan PDRB meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan.
3. **Stabilitas Ekonomi Makro:** Jika tingkat inflasi dan suku bunga relatif terkendali, ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum, meskipun masih ada kesenjangan dengan target PDRB.

b. Faktor Penghambat:

1. **Kendala Eksternal:** Krisis global, pandemi, atau gangguan dari faktor internasional seperti fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi perekonomian dan menghambat pencapaian target PDRB ADHK.
2. **Tantangan Infrastruktur:** Infrastruktur yang belum optimal atau terhambatnya proyek-proyek pembangunan dapat mengurangi kapasitas produksi dan distribusi barang serta jasa, yang berkontribusi pada capaian ekonomi yang lebih rendah dari target.
3. **Fluktuasi Sektor Tertentu:** Jika beberapa sektor ekonomi utama mengalami penurunan atau stagnasi (misalnya, pertanian atau manufaktur), ini dapat mempengaruhi keseluruhan PDRB ADHK.
4. **Keterbatasan Investasi dan Sumber Daya:** Terbatasnya investasi, baik domestik maupun asing, serta kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan teknologi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

c. Rekomendasi:

1. **Meningkatkan Diversifikasi Ekonomi:** Fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat, misalnya sektor teknologi dan industri kreatif, untuk meningkatkan kontribusi PDRB.
2. **Optimalisasi Infrastruktur:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti perbaikan jalan, transportasi, dan penyediaan energi yang lebih efisien.
3. **Peningkatan Investasi:** Upaya menarik lebih banyak investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui kebijakan yang lebih ramah investasi dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi.
4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):** Fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sektor-sektor produktif dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja:** Melakukan pemantauan secara lebih terperinci terhadap sektor-sektor yang masih lemah dan memberi perhatian lebih pada kebijakan yang bisa mengoptimalkan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pencapaian PDRB ADHK yang lebih mendekati target.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dan mencapainya target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun mendatang.



SASARAN Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota

Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota. Sasaran-sasarannya berupa **Tingkat Pengangguran Terbuka.** Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Tingkat Penangguran Terbuka	9.27	7.40	120.17	8,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		120,17			

Sasaran **Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” yaitu dari target tahun 2024 yaitu 9,27% tercapai melebihi target yaitu 7,40% dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 120,17%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 8,99% maka capaian kerjanya 117,69%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka** mengalami penurunan 1,43 persen point, bila dibandingkan dengan daerah Bandung Raya seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang TPT Kota Bandung masih tinggi Kecuali dengan Kota Cimahi pengangguran terbuka di Kota Cimahi 8,97 persen Kota Bandung 7,40 atau lebih rendah 1,57 Persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Badan Pusat Statistik (2023) pengangguran merupakan Masyarakat yang aktif dalam mencari pekerjaan, masyarakat yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, masyarakat yang tidak mencari pekerjaan karena dirasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta masyarakat yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai pekerjaan tersebut.

Menurut Mankiw dalam Yuniarti & Imaningsih (2022) pengangguran merupakan posisi dimana seseorang sedang menunggu untuk melakukan pekerjaan maupun seseorang yang telah diberhentikan dari tempat kerjanya terdahulu. Oleh karena itu indikasi besarnya persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (Badan Pusat Statistik, 2024) jumlah **pengangguran** terhadap jumlah angkatan kerja kondisi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

FORMULASI PENGUKURAN

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) * 100\%.$$

Tabel 2.33

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPD Kota Bandung Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,27	7,40	120,17

Sumber: BPS Kota Bandung

Selanjutnya Indikator sasaran ketiga capaian ISU 3 Tingkat Pengangguran terbuka, berdasarkan tabel di atas Capaian Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung pada tahun 2024 sebesar 7,40 persen, dari target 9,27 persen capaian kinerja 120,17 persen Artinya Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 16,19 persen atau 1,43 persen poin dari Tahun 2023. Mampunya menekan jumlah pengangguran atau menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dilansir dari berita RRI.co.id Menurut Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara “penurunan angka pengangguran tersebut merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Ketenagakerjaan dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pembentukan wirausaha baru. ada dua strategi utama Pemkot Bandung untuk mengatasi pengangguran.

Strategi pertama adalah pengembangan wirausaha baru. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan telah menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat yang tertarik berwirausaha. “Pembentukan wirausaha baru ini tidak hanya dilakukan sekali pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan dukungan hingga usaha mereka dapat berkembang dan mandiri. Ini salah satu langkah penting untuk membuka lapangan kerja baru secara berkelanjutan,”

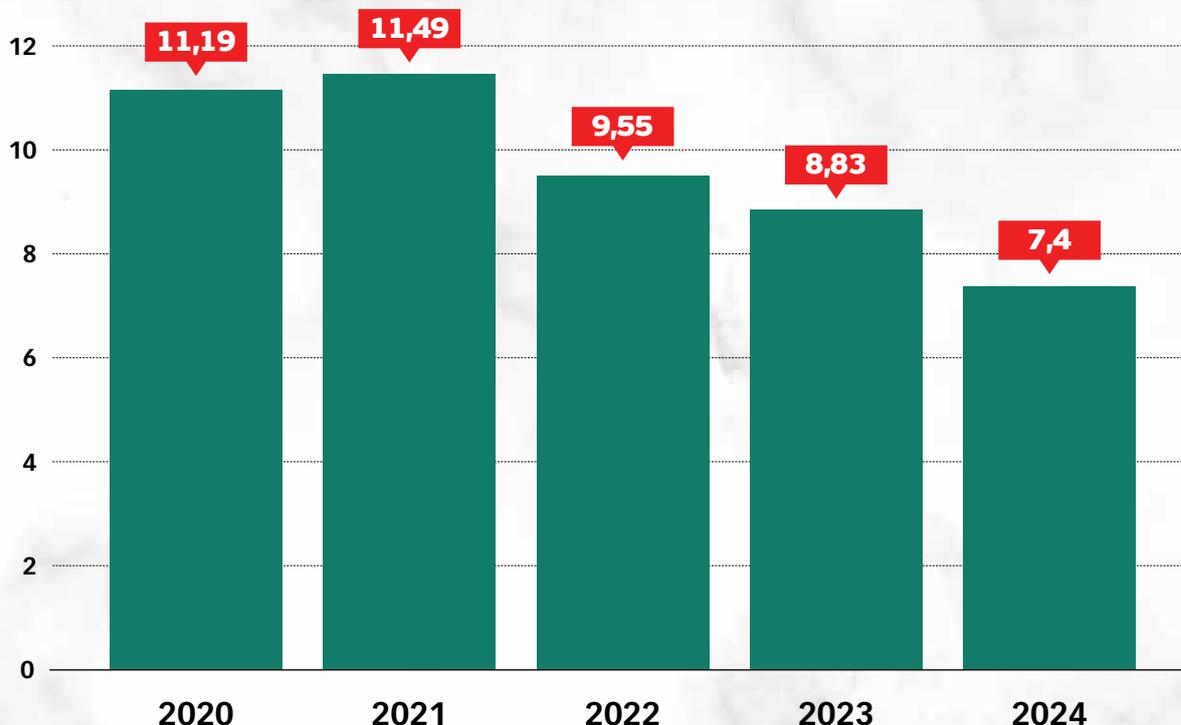
Strategi kedua adalah memperluas lapangan kerja melalui dukungan bagi pengusaha lokal dan menarik investasi baru agar ekonomi Kota Bandung semakin berkembang. Jika ekonomi tumbuh, maka peluang kerja pun akan semakin terbuka lebar,” Dengan pertumbuhan usaha di Kota Bandung, semakin banyak pula lowongan yang dapat terbentuk,”.

Selain itu adanya penyelenggaraan job fair sebanyak 2 (dua) kali sebagai upaya pemerintah Kota Bandung untuk berkontribusi dalam upaya menurunkan pengangguran. Tren pengangguran Kota Bandung seperti grafik dibawah ini ;

Grafik 2.13

Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2020-2024

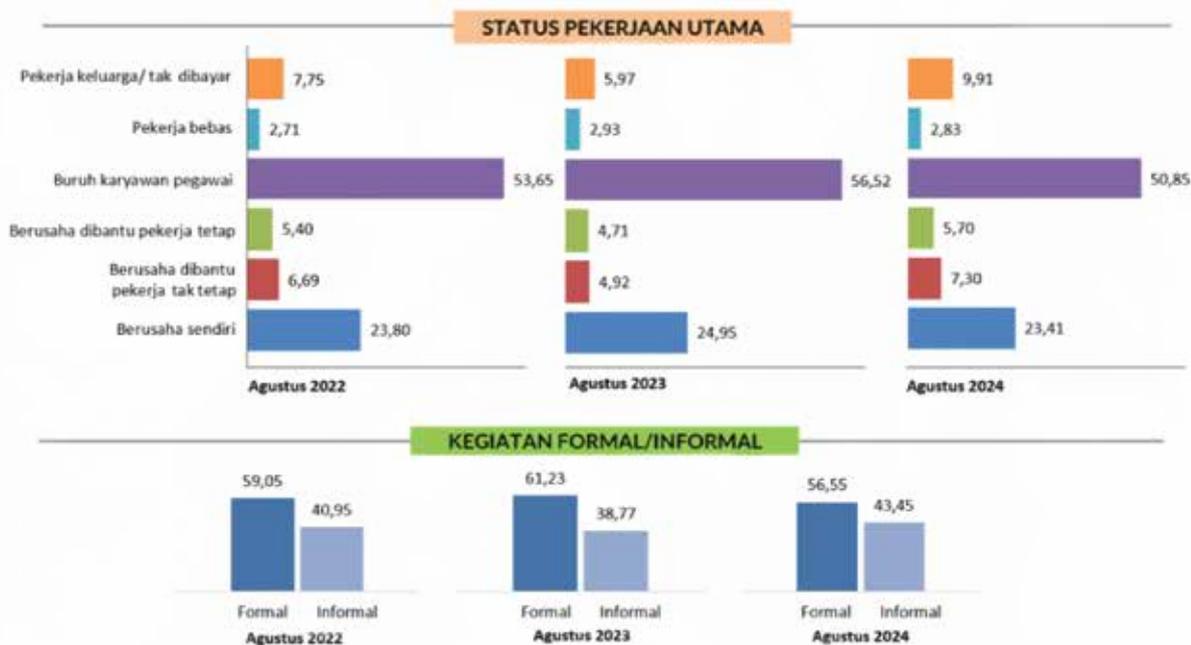
TREN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2024

Data di atas memperlihatkan tren pengangguran rentang waktu Tahun 2020 – 2024 terjadi penurunan yang signifikan di Tahun 2024. TPT mengalami penurunan sebesar 16,19 persen atau 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (8,83 persen). Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh sampai delapan orang penganggur. TPT pada tahun 2020 tercapai 11,19%, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 11,46% lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 11,08% atau capaian kinerja sebesar 96,57%. Karena sektor-sektor usaha belum membuka kembali usahanya secara normal. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka turun 9,55% mengalami penurunan sebesar 1,91 point atau capaian kinerja 112,06 %. Tahun 2023 turun kembali menjadi 8,83 % walaupun tidak signifikan dengan capaian kinerja 113,94% dan pada Tahun 2024 TPT mengalami penurunan sebesar 1,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 (8,83 persen). Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh sampai delapan orang penganggur. Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran pada tahun 2024 adalah 100.300 orang. Jika dibanding dengan tahun 2023 (116.400 orang) maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2024 berkurang 16.100 orang, sedangkan komposisi angkatan kerja Tahun 2024 terdiri dari 1.254.600 orang penduduk yang bekerja dan 100.300 orang pengangguran. Sedangkan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Angkatan Kerja pada Agustus 2024 berjumlah 1.354.900 orang dibandingkan Agustus 2023 (1.318.900) orang, naik 36.000 orang. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 709,4 ribu orang (56,55 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 545,1 ribu orang (43,45 persen). Dibandingkan Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 26,8 ribu orang, sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 78,9 ribu orang (BRS Kota Bandung 2024), data dari BPS sesuai dengan keterangan Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara “penurunan angka pengangguran tersebut merupakan hasil dari upaya Pemkot Bandung bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pembentukan wirausaha baru, berikut ini Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama :



Sumber: BRS Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,93 persen, naik 0,96 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,93 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 51,96 persen. Jika dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen poin (dari 83,22 persen menjadi 83,93 persen) sedangkan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,23 persen poin mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023. (BRS Kota Bnadung 2024) TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, berikut ini tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2020 – 2024.

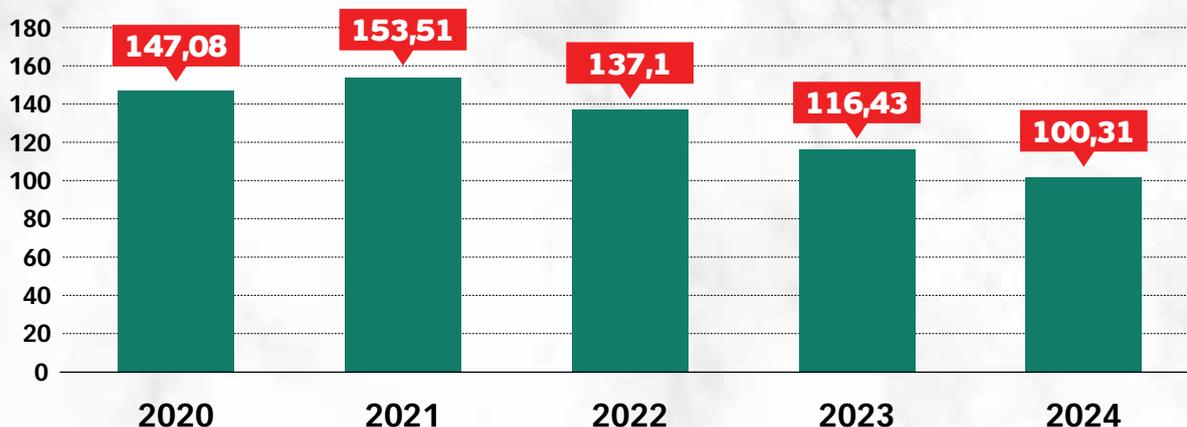
Grafik 2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber: BRS Tahun 2024

Apabila dilihat dari karakteristik pengangguran di Kota Bandung TPT laki-laki sebesar 7,23 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,68 persen. Jumlah pengangguran di Kota Bandung dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.15
Perbandingan Jumlah Pengaguran Tahun 2024-2026

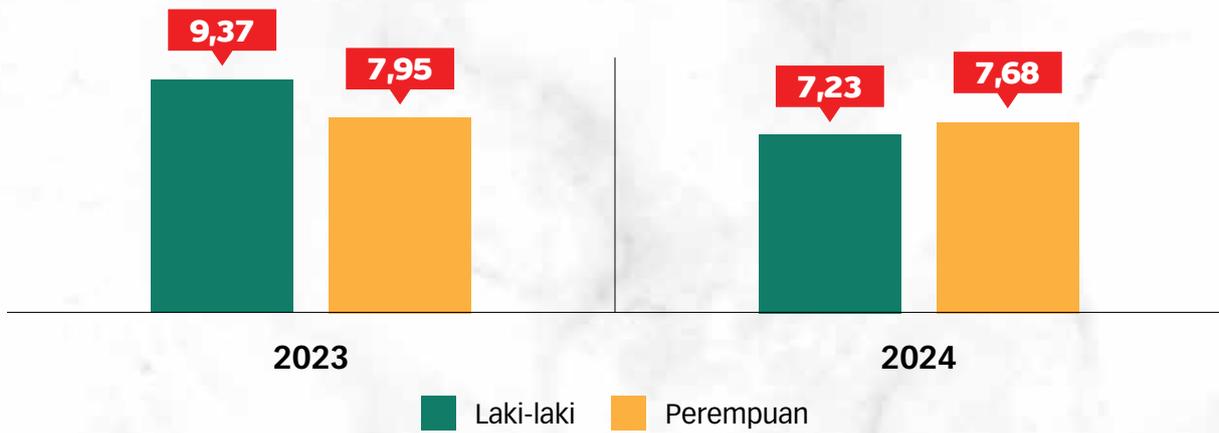


Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2024

Jika dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki maupun yang perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,14 persen poin dan 0,27 persen poin. (BPS 2024), seperti grafik tabel dibawah ini :

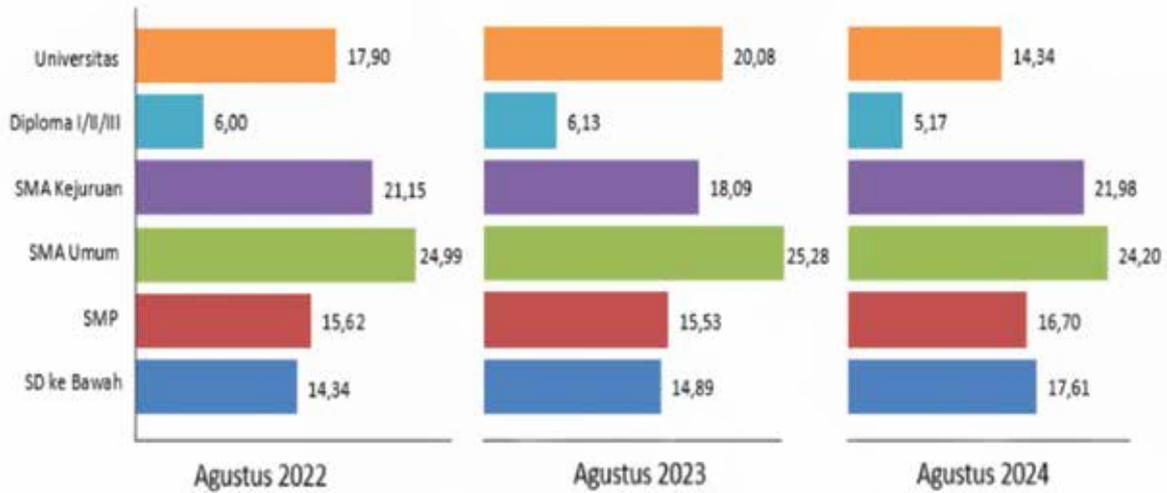


Grafik 2.16
Perbandingan Jumlah Pengaguran Tahun 2023-2024
PENGANGGURAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2024

Jumlah Pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja adalah sebagaimana berikut :



Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2024

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT Pada Agustus 2024 dari tamatan Sekolah Menengah Atas masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,94 persen. Sementara TPT yang paling rendah terjadi pergeseran yang pada Agustus 2023 di jenjang pendidikan Diploma I/II/III, sedangkan di Agustus 2024 menjadi pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 1,77 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan di jenjang pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami kenaikan TPT dalam setahun terakhir. Kenaikan TPT terbesar terjadi pada jenjang pendidikan Universitas yaitu sebesar 3,33 persen poin. Sedangkan penurunan TPT terbesar terjadi pada jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 7,93 persen poin.



Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Agt 2023–Agt 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen poin ¹⁾
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lapangan Usaha								
Pertanian	6,2	0,48	54	0,45	60	0,47	0,6	0,03
Industri	323,1	24,88	2806	23,34	3092	24,65	28,6	1,31
Jasa	969,3	74,64	9165	76,21	9394	74,88	22,9	-1,34
Jumlah	1298,5	100,00	12025	100,00	12546	100,00	52,1	-
Status Pekerjaan Utama								
Berusaha sendiri	309,0	23,80	3000	24,95	2937	23,41	-6,4	-1,55
Berusaha dihantu buruh tidak tetap	86,9	6,69	59,1	4,92	91,5	7,30	32,4	2,38
Berusaha dibantu buruh tetap	70,1	5,40	566	4,71	715	5,70	14,9	0,99
Buruh/karyawan/pegawai	696,7	53,65	6797	56,52	6379	50,85	-41,7	-5,67
Pekerja bebas	35,2	2,71	353	2,93	35,6	2,83	0,3	-0,10
Pekerja keluarga/tak dibayar	100,6	7,75	71,8	5,97	124,4	9,91	52,6	3,94
Jumlah	1298,5	100,00	12025	100,00	12546	100,00	52,1	-
Status Pekerjaan Formal/Informal								
Formal	766,8	59,05	7363	61,23	7094	56,55	-26,8	-4,68
Informal	531,8	40,95	4662	38,77	5451	43,45	78,9	4,68
Jumlah	1.298,5	100,00	12025	100,00	12546	100,00	52,1	-
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan								
SD ke Bawah	186,2	14,34	1790	14,89	2210	17,61	42,0	2,73
Sekolah Menengah Pertama	202,8	15,62	1867	15,53	2096	16,70	22,8	1,17
Sekolah Menengah Atas	324,6	24,99	3040	25,28	3036	24,20	-0,4	-1,08
Sekolah Menengah Kejuruan	274,6	21,15	2175	18,09	275,7	21,98	58,2	3,89
Diploma I/II/III	77,9	6,00	737	6,13	648	5,17	-8,9	-0,96
Universitas	232,4	17,90	2415	20,08	179,9	14,34	-61,7	-5,75
Jumlah	1298,5	100,00	12025	100,00	12546	100,00	52,1	-
Jenis Kelamin								
Laki-laki	788,1	60,69	742,5	61,75	775,6	61,82	33,1	0,07
Perempuan	510,5	39,31	460,0	38,25	479,0	38,18	19,0	-0,07
Jumlah	1298,5	100,00	12025	100,00	12546	100,00	52,1	-

Selanjutnya Indikator sasaran ketiga capaian ISU 3 Tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan target RPD akhir atau tahun 2024 dimana targetnya adalah 8,99% , maka kinerjanya tercapai seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.34
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Kota Bandung Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Akhir RPD 2026	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,99	7,40	117,68

Perbandingan Realisasi TPT Tahun 2024 dengan kinerja Kab/Kota di Jawa Barat.

Secara umum, tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2023 – 2024 mengalami penurunan. Tahun 2024 Kota Bandung mengalami penurunan 1,43 persen point, bila dibandingkan dengan daerah Bandung Raya seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang TPT Kota Bandung masih tinggi Kecuali dengan Kota Cimahi pengangguran terbuka di Kota Cimahi 8,97 persen Kota Bandung 7,40 atau lebih rendah 1,57 Persen poin, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota,
Agustus 2023 - Agustus 2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022–Ags 2023	Perubahan Ags 2023–Ags 2024
	persen	persen	persen	persen poin ¹⁾	persen poin ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bogor	10,64	8,47	7,34	-2,17	-1,13
Kabupaten Sukabumi	7,77	7,32	7,11	-0,45	-0,21
Kabupaten Cianjur	8,41	7,71	5,99	-0,70	-1,72
Kabupaten Bandung	6,98	6,52	6,36	-0,47	-0,16
Kabupaten Garut	7,60	7,33	6,96	-0,27	-0,37
Kabupaten Tasikmalaya	4,17	3,89	3,74	-0,29	-0,15
Kabupaten Ciamis	3,75	3,52	3,37	-0,23	-0,15
Kabupaten Kuningan	9,81	9,49	7,78	-0,32	-1,71
Kabupaten Cirebon	8,11	7,65	6,74	-0,46	-0,91
Kabupaten Majalengka	4,16	4,12	4,01	-0,04	-0,11
Kabupaten Sumedang	7,72	6,94	6,16	-0,78	-0,78
Kabupaten Indramayu	6,49	6,46	6,25	-0,03	-0,21
Kabupaten Subang	7,77	7,65	6,73	-0,12	-0,92
Kabupaten Purwakarta	8,75	7,72	7,34	-1,03	-0,38
Kabupaten Karawang	9,87	8,95	8,04	-0,91	-0,91
Kabupaten Bekasi	10,31	8,87	8,82	-1,44	-0,05
Kabupaten Bandung Barat	9,63	8,11	6,70	-1,52	-1,41
Kabupaten Pangandaran	1,56	1,52	1,58	-0,05	0,06
Kota Bogor	10,78	9,39	8,13	-1,38	-1,26
Kota Sukabumi	8,83	8,53	8,34	-0,30	-0,19
Kota Bandung	9,55	8,83	7,40	-0,72	-1,43
Kota Cirebon	8,42	7,66	6,29	-0,76	-1,37
Kota Bekasi	8,81	7,90	7,82	-0,91	-0,08
Kota Depok	7,82	6,97	6,27	-0,85	-0,70
Kota Cimahi	10,77	10,52	8,97	-0,26	-1,55
Kota Tasikmalaya	6,62	6,55	6,49	-0,06	-0,06
Kota Banjar	5,53	5,43	5,44	-0,10	0,01
Jawa Barat	8,31	7,44	6,75	-0,87	-0,69

Sumber: BPS Tahun 2024

Penyerapan pencari kerja menunjukkan kinerja sangat baik, secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Dari tahun sebelumnya, Tahun 2024 penempatan tenaga kerja 10914 orang naik 1914 orang dari Tahun 2023 (9000 orang) , tren penempatan tenaga kerja tahun 2020 ada penurunan penempatan yang sangat signifikan karena adanya pandemik Covid 19, Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 trennya meningkat, kenaikan yang cukup tinggi Tahun 2023 (9000)



orang naik sebanyak 3114 orang bila dibandingkan Tahun 2022 (5886) orang, dan Tahun 2024 (10914) orang naik 1914 orang, **faktor yang mendukung** kenaikan penempatan :

1. Ada peningkatan jumlah lowongan kerja dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 ada kegiatan job fair/bursa kerja luring dua kali dalam setahun, sebanyak 92 perusahaan dengan lowongan kerja (loker) yang tersedia 19868 Perusahaan yang paling banyak membuka loker berasal dari seperti Primafood Internasional, Lion Air, PT Mutualplus Global Resources, PT Circleka Indonesia Utama, PT Sudinar Artha, Kartika Sari Group, GroupIndomarco, Griya, Yogya, Circle K dan untuk kerja keluar negeri. dengan jumlah yang regristasi 14353 orang jumlah yang hadir 8249 orang.
2. Kesadaran perusahaan untuk melaporkan data penempatan melalui pencatatan PKWT semakin tinggi.
3. Para pencaker baru, dapat langsung melamar lewat media daring dan tidak mensyaratkan adanya pendaftaran pencaker di disnaker, untuk mendapatkan AK 1.
4. Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan telah adanya komitmen stakeholder (Dinas Ketenagakerjaan dan Perusahaan) dalam memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan secara optimal melalui aplikasi New Bima.
5. Sebagian perusahaan memberlakukan masa kontrak kerja yang pendek pada tahun ini sehingga mengakibatkan turn over pegawai yang tinggi dan perusahaan memasang loker yang sama secara berulang kali dalam 1 tahun
6. Peningkatan kapasitas dan pelayanan informasi serta konsultasi kerja melalui MASTER (Mobil Anjungan Sahabat Ketenagakerjaan) yang setiap Jum'at jemput bola ke tiap kecamatan di Kota Bandung, media daring, dimana pencari kerja tidak perlu datang tapi bisa melalui media online, pelaksanaan Job Fair Online, dan Bursa kerja Khusus BKK melalui IG, twitter, youTube dan Aplikasi New Bima.
7. Pelayanan job fair untuk perusahaan penyedia lowongan kerja telah difasilitasi di New Bima sehingga perusahaan dapat mendaftarkan lowongan kerja di New Bima dan dapat di akses langsung Pencaker.

Sedangkan untuk penyerapan berdasarkan loker masih belum optimal dari 19868 loker yang tersedia hanya 10979 loker yang terisi atau 55,26 persen, hal tersebut dikarenakan :

1. Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja tidak **Link and Match**.
2. Masih ada perusahaan yang mensyaratkan kualifikasi jabatan mempunyai pengalaman kerja 5 tahun.
3. Selain itu terjadi **perubahan lanskap pasar tenaga kerja akibat krisis ekonomi** dan pandemik Covid 19 pendorong terjadinya perubahan lanskap terhadap pasar tenaga kerja . Perusahaan hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan multitasking persyaratan ini akan semakin dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen pekerja.
4. Sebagian perusahaan sulit diminta data penempatan tenaga kerja sehingga data penempatan kerja yang ada di disnaker kota bandung belum merepresentasikan kondisi real penempatan kerja di Kota Bandung
5. Kurangnya atau belum optimalnya kinerja dari pengurus bursa kerja khusus untuk laporan penempatan, tidak adanya sanksi yang berat terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan wajib lapor.
6. Pelaksanaan job fair masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang setiap tahun meningkat, job fair sebagai sarana dan prsarana mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja.
7. Belum optimalnya penempatan kerja dari hasil pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh LPK Swasta.



Alternatif solusi yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan angka penyerapan Tenaga Kerja di pasar kerja formal maupun di sektor informal adalah melalui :

1. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Sistem Bursa Kerja On-line, yaitu dengan memperbaiki layanan sistem ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah dan murah. Untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya informasi yang cepat mengenai lowongan pekerjaan. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi dan dapat diatasi dengan adanya website Disnaker dan aplikasi New Bimma yang tidak hanya menyediakan layanan bursa kerja, tetapi hampir 30 layanan ketenagakerjaan dapat diakses secara online.
2. Terobosan inovasi Job Fair melalui New Bimma semakin ditingkatkan. Inovasi yang dilakukan dengan peningkatan pelayanan di New Bimma bagi perusahaan, sehingga perusahaan penyedia lowongan kerja dapat mendaftar lowongan kerja di New Bimma dan diakses langsung Pekerja.
3. Lebih pengoptimalkan pelatihan berbasis kompetensi dan bersertifikasi terutama di bidang teknologi IT dan Teknologi tepatguna atau yang berbasis kebutuhan industri. Serta mendorong Balai Latihan Kerja untuk memiliki sarana dan prasarana sehingga bisa lebih optimal dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi .Selain itu juga memfasilitasi pelatihan kerja yang berbasis masyarakat.
4. Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Seperti; pembinaan mental, taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik, memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur.
5. Dengan adanya transformasi digital semakin berkembang dalam memberikan pelayanan, perlu mengembangkan kemampuan pengantar kerja sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja.
6. Pengantar kerja harus aktif mengumpulkan data penempatan ke perusahaan-perusahaan

TUJUAN 4 : Meningkatkan Kelayakhunian Kota**SASARAN Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya**

Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya. Sasaran-sasarannya berupa **Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	7,81	8,33	106,66	7,88
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		106,66			

Sasaran **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “**Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya**” yaitu dari target tahun 2024 yaitu 7,81 tercapai melebihi target yaitu 8,33 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 106,66%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 7,88 tahun maka capaian kerjanya 105,71%.

Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya diukur melalui Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya. Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya dengan indikator Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya Kota Bandung Tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,81 poin pada RPD. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Liveable City Tahun 2024 terhadap aspek Sosial Budaya adalah sebesar 8,33 poin, meningkat 0,83 poin dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 7,5 poin atau dengan capaian sebesar 106,66% jika dibandingkan dengan target tahun 2024, namun bila dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaian kerjanya sebesar 103,73 % atau sangat baik.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya untuk memenuhi target pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 133 program pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman dan Urusan Sosial dengan total anggaran tahun 2024 untuk Sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya sebesar Rp. 412.151.849.966 dengan realisasi sebesar Rp. 354.813.852.743 dengan penyerapan 86,09%.

Tingkat capaian Indeks Liveable City Kota Aspek Sosial Budaya dihitung melibatkan indikator/variabel yang merupakan gabungan dari indikator subjektif dan indikator objektif. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya meliputi indikator atau Variabel Aspek Pendidikan, Variabel Aspek Kesehatan, Variabel Aspek Ketentraman dan Variabel Aspek Sosial.

1. Variabel Aspek Pendidikan terdiri dari hasil perhitungan indicator objektif sub sasaran dan program sebanyak 33 indikator dengan indikator subjektif yaitu persepsi kecukupan jumlah fasilitas pendidikan, persepsi kepuasan layanan fasilitas

pendidikan, persepsi keterjangkauan jarak fasilitas pendidikan dan indikator obyektif yaitu Pendidikan bermutu, aksesibilitas Pendidikan, berkurangnya anak tidak sekolah, serta budaya membaca.

Tabel 2.37
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Pendidikan Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Pendidikan			Nilai Obyektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Pendidikan
		Pendidikan Bermutu & Aksesibilitas Pendidikan	Berkurangnya anak tidak sekolah	Budaya Baca			
1	Andir	2.69	6.92	0	9.61	9.08	9.34
2	Antapani	2.69	6.92	0	9.61	8.28	8.94
3	Arcamanik	2.69	6.92	0	9.61	7.56	8.59
4	Astanaanyar	2.69	6.92	0	9.61	7.96	8.79
5	Babakan Ciparay	2.69	6.92	0	9.61	7.27	8.44
6	Bandung Kidul	2.69	6.92	0	9.61	7.39	8.50
7	Bandung Kulon	2.69	6.92	0	9.61	7.22	8.41
8	Bandung Wetan	2.69	6.92	0	9.61	6.93	8.27
9	Batununggal	2.69	6.92	0	9.61	7.55	8.58
10	Bojongloa Kaler	2.69	6.92	0	9.61	7.05	8.33
11	Bojongloa Kidul	2.69	6.92	0	9.61	7.44	8.52
12	Buahbatu	2.69	6.92	0	9.61	7.28	8.45
13	Cibeunying Kaler	2.69	6.92	0	9.61	7.86	8.73
14	Cibeunying Kidul	2.69	6.92	0	9.61	7.57	8.59
15	Cibiru	2.69	6.92	0	9.61	8.13	8.87
16	Cicendo	2.69	6.92	0	9.61	8.17	8.89
17	Cidadap	2.69	6.92	0	9.61	7.13	8.37
18	Cinambo	2.69	6.92	0	9.61	8.01	8.81
19	Coblong	2.69	6.92	0	9.61	6.77	8.19
20	Gedebage	2.69	6.92	0	9.61	8.44	9.03
21	Kiaracondong	2.69	6.92	0	9.61	7.57	8.59
22	Lengkong	2.69	6.92	0	9.61	7.09	8.35
23	Mandalajati	2.69	6.92	0	9.61	7.04	8.33
24	Panyileukan	2.69	6.92	0	9.61	7.89	8.75
25	Rancasari	2.69	6.92	0	9.61	7.38	8.50
26	Regol	2.69	6.92	0	9.61	6.15	7.88
27	Sukajadi	2.69	6.92	0	9.61	8.23	8.92
28	Sukasari	2.69	6.92	0	9.61	7.29	8.45
29	Sumur Bandung	2.69	6.92	0	9.61	6.50	8.06
30	Ujung Berung	2.69	6.92	0	9.61	8.14	8.87
Rerata		2.69	6.92	0	9.61	7.54	8.58

Sumber: Diskominfo, 2024



Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek pendidikan sebesar 8.58 poin. Hasil ini sudah melampaui target tahun 2024 di mana target nilai LCI Aspek Pendidikan pada tahun 2024 adalah 7.9 poin. Perolehan nilai LCI aspek pendidikan tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 9.34 dan nilai LCI aspek pendidikan terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 7.88. poin.

2. Variabel Aspek Kesehatan merupakan perhitungan yang melibatkan indikator subjektif yaitu persepsi kecukupan jumlah fasilitas kesehatan, persepsi kepuasan layanan fasilitas kesehatan, persepsi keterjangkauan jarak fasilitas kesehatan, dan indikator objektif sasaran program yaitu kualitas kesehatan, ketahanan pangan, pengendalian penduduk, kampung keluarga berkualitas, serta kebugaran fisik masyarakat. Data subjektif untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data objektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Tabel 2.38
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Kesehatan Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Kesehatan					Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Kesehatan
		Kualitas Kesehatan	Ketahanan Pangan	Pengendalian Penduduk	Kampung Keluarga Berkualitas	Kebudayaan Fisik Masyarakat			
1	Andir	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	8.80	9.17
2	Antapani	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.88	8.71
3	Arcamanik	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.46	8.49
4	Astanaanyar	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.87	8.70
5	Babakan Ciparay	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.32	8.43
6	Bandung Kidul	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.22	8.37
7	Bandung Kulon	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.34	8.44
8	Bandung Wetan	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	6.82	8.18
9	Batununggal	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.72	8.62
10	Bojongloa Kaler	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	6.95	8.24
11	Bojongloa Kidul	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.93	8.73
12	Buahbatu	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.16	8.35
13	Cibeunying Kaler	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.70	8.61
14	Cibeunying Kidul	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.86	8.70
15	Cibiru	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.72	8.63
16	Cicendo	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.91	8.72
17	Cidadap	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.84	8.68
18	Cinambo	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	8.00	8.77
19	Coblong	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.19	8.36
20	Gedebage	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	8.14	8.83
21	Kiaracondong	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.94	8.73
22	Lengkong	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	6.78	8.15
23	Mandalajati	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.57	8.55
24	Panyileukan	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.95	8.74
25	Rancasari	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.16	8.35
26	Regol	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	5.32	7.42
27	Sukajadi	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	8.10	8.81
28	Sukasari	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.65	8.59
29	Sumur Bandung	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	6.41	7.97
30	Ujung Berung	7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.80	8.67
Rerata		7.48	0.76	0.37	0.46	0.46	9.53	7.52	8.52

Sumber: Diskominfo, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek kesehatan sebesar 8.52 poin. Hasil ini belum melampaui target tahun 2024 di mana target nilai LCI aspek Kesehatan pada tahun 2024 adalah 8,88 poin. Perolehan nilai LCI aspek kesehatan tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 9.17 dan nilai LCI aspek kesehatan terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 7.42.

3. Variabel Aspek Ketentraman merupakan perhitungan yang melibatkan indikator objektif sub sasaran program Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi; Ketenteraman Masyarakat; Kualitas Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan; Serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana, Kepuasan Masyarakat Dalam Ketenteraman dan Kepentingan Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dan Subjektif Yang Terdiri dari kualitas kesatuan bangsa dan demokrasi, ketentraman masyarakat, kualitas pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan, ketahanan daerah terhadap bencana.



Tabel 2.39
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Ketenteraman Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Ketenteraman				Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Keamanan
		Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Ketenteraman Masyarakat	Kualitas Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana			
1	Andir	3	0	4	1.63	8.63	8.07	8.35
2	Antapani	3	0	4	1.63	8.63	7.88	8.26
3	Arcamanik	3	0	4	1.63	8.63	7.43	8.03
4	Astanaanyar	3	0	4	1.63	8.63	7.46	8.04
5	Babakan Ciparay	3	0	4	1.63	8.63	7.06	7.84
6	Bandung Kidul	3	0	4	1.63	8.63	7.06	7.84
7	Bandung Kulon	3	0	4	1.63	8.63	6.97	7.80
8	Bandung Wetan	3	0	4	1.63	8.63	6.55	7.59
9	Batununggal	3	0	4	1.63	8.63	7.31	7.97
10	Bojongloa Kaler	3	0	4	1.63	8.63	6.65	7.64
11	Bojongloa Kidul	3	0	4	1.63	8.63	7.49	8.06
12	Buahbatu	3	0	4	1.63	8.63	6.77	7.70
13	Cibeunying Kaler	3	0	4	1.63	8.63	7.24	7.93
14	Cibeunying Kidul	3	0	4	1.63	8.63	7.46	8.05
15	Cibiru	3	0	4	1.63	8.63	7.32	7.97
16	Cicendo	3	0	4	1.63	8.63	7.35	7.99
17	Cidadap	3	0	4	1.63	8.63	7.26	7.94
18	Cinambo	3	0	4	1.63	8.63	7.38	8.01
19	Coblong	3	0	4	1.63	8.63	6.97	7.80
20	Gedebage	3	0	4	1.63	8.63	7.25	7.94
21	Kiaracondong	3	0	4	1.63	8.63	7.03	7.83
22	Lengkong	3	0	4	1.63	8.63	6.66	7.64
23	Mandalajati	3	0	4	1.63	8.63	7.69	8.16
24	Panyileukan	3	0	4	1.63	8.63	7.43	8.03
25	Rancasari	3	0	4	1.63	8.63	6.63	7.63
26	Regol	3	0	4	1.63	8.63	5.57	7.10
27	Sukajadi	3	0	4	1.63	8.63	7.80	8.22
28	Sukasari	3	0	4	1.63	8.63	7.41	8.02
29	Sumur Bandung	3	0	4	1.63	8.63	6.32	7.48
30	Ujung Berung	3	0	4	1.63	8.63	6.45	7.54
Rerata		3.00	0.00	4.00	1.63	8.63	7.13	7.88

Sumber: Diskominfo, 2024



Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek ketenteraman sebesar 7.88 dari target sebesar 6,68 poin. Perolehan nilai LCI aspek ketenteraman tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 8.25 dan nilai LCI aspek ketenteraman terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 7.10.

4. Variabel Aspek Sosial terdiri dari indikator objektif sub sasaran program berupa Peran Pemuda Dalam Pembangunan; Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan; Kualitas Keluarga; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan Perempuan; Pemajuan Kebudayaan; Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan dan indikator subjektif berupa persepsi hubungan sosial dengan masyarakat di lingkungan; persepsi keaktifan kegiatan di lingkungan;. Data untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Tabel 2.40
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Sosial Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Sosial							Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Sosial
		Peran Pemuda dalam Pembangunan	Kese-taraan Gender dan Keber-dayaan Perempuan	Kua-litas Kelu-arga	Perlin-dung-an dan Peme-nuhan Hak Anak	Perlin-dung-an Pe-rem-puan	Pema-juan Ke-buda-yaan	Keman-dirian Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin dan Ren-tan			
1	Andir	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.70	8.82
2	Antapani	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.08	8.51
3	Arcamanik	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.80	8.37
4	Astanaanyar	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.06	8.00
5	Babakan Ciparay	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.49	8.21
6	Bandung Kidul	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.53	8.23
7	Bandung Kulon	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.71	8.32
8	Bandung Wetan	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	6.41	7.67
9	Batununggal	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.00	8.47
10	Bojongloa Kaler	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.84	8.39
11	Bojongloa Kidul	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.38	8.16
12	Buahbatu	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.41	8.17
13	Cibeunying Kaler	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.47	8.21
14	Cibeunying Kidul	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.69	8.31
15	Cibiru	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.76	8.85
16	Cicendo	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.02	8.48
17	Cidadap	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.69	8.32
18	Cinambo	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.00	8.47
19	Coblong	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.05	7.99
20	Gedebage	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	9.14	9.04
21	Kiaracondong	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.94	8.44
22	Lengkong	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	6.94	7.94
23	Mandalajati	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.88	8.41
24	Panyileukan	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.03	8.48
25	Rancasari	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.71	8.33
26	Regol	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.61	8.27
27	Sukajadi	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	8.18	8.56
28	Sukasari	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.29	8.11
29	Sumur Bandung	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	6.41	7.67
30	Ujung Berung	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.60	8.27
	Rerata	1.25	1.25	0.16	1.24	0.67	0.00	4.38	8.94	7.69	8.32

Sumber: Diskominfo, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek sosial sebesar 8.32 dari target sebesar 7,61 poin. Perolehan nilai LCI aspek sosial tertinggi berada pada Kecamatan Gedebage dengan skor 9.04 dan nilai LCI aspek sosial terendah berada pada Kecamatan Sumur Bandung dan Bandung Wetan dengan skor 7.67 poin

Capaian Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya didukung dengan faktor pendukung, penghambat dan rekomendasi serta solusi dalam pencapaian sebagai berikut :

1. Aspek Kesehatan

Penghambat : -

Pendukung : Persepsi terhadap aspek Kesehatan sudah baik. Mayoritas responden setuju dan puas dengan kecukupan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Bandung.

Rekomendasi : -

2. Aspek Pendidikan

Penghambat : -

Pendukung : Persepsi terhadap aspek Pendidikan sudah baik. Mayoritas responden setuju dan puas dengan kecukupan jumlah, kualitas layanan, dan keterjangkauan fasilitas pendidikan di Kota Bandung.

Rekomendasi : -

3. Aspek Ketenteraman

Penghambat : Persepsi baik terhadap layanan ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih dibawah 50%.

Pendukung : Persepsi terhadap aspek ketentraman sudah baik. Mayoritas responden setuju dan puas bahwa Kota Bandung dapat menyediakan menjamin keamanan tempat tinggal dari kejahatan dan bahaya bencana, serta memberikan pelayanan keamanan yang baik.

Rekomendasi : Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang berkaitan erat dengan curah hujan. Banjir di Kota Bandung akan semakin parah, seiring dengan perubahan iklim yang mendorong peningkatan intensitas dan frekuensi curah hujan. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan strategi mitigasi banjir yang komprehensif seperti pengoptimalan jaringan drainase, dan mempersiapkan daerah resapan air di perkotaan.

4. Aspek Sosial

Penghambat : -

Pendukung : Persepsi terhadap aspek sosial di Kota Bandung sudah baik. Mayoritas responden setuju dan puas terhadap kehidupan sosial di Kota Bandung terutama keaktifan dalam kegiatan Bersama warga di sekitar tempat tinggal.

Rekomendasi :

SASARAN Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Sasaran-sasarannya berupa **Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.** Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan
Hidup dan Infrastruktur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7,66	7,78	101,57	7,86
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,57			

Sasaran **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator “**Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur**” yaitu dari target tahun 2024 yaitu 7,66 tercapai melebihi target yaitu 7,78 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 101,57%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 7,86 tahun maka capaian kerjanya 98,98%.

Sasaran Tujuan Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur diukur melalui Indeks Liveable City Aspek tata ruang, aspek lingkungan hidup, aspek transportasi dan aspek Infrastruktur Utilitas. Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur dengan indikator Indeks Liveable City Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung Tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,67 poin yang tertera pada Dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Liveable City Tahun 2024 terhadap aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur adalah sebesar 7,90 poin, yaitu meningkat 0,31 poin dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 7,59 poin, capaiannya sebesar 102,99%, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 yaitu sebesar 7,88%, maka capaian kerjanya sebesar 100,25% artinya, Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur untuk memenuhi target pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 32 program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup dengan total anggaran tahun 2024 untuk Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan Infrastruktur sebesar Rp. 993.870.127.372,00 dengan realisasi sebesar Rp. 897.695.666.595,00 dengan penyerapan 90,40%.

Tingkat capaian Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur dihitung melibatkan indikator/variabel yang merupakan gabungan dari indikator subjektif dan indikator objektif yang meliputi Indikator sasaran urusan Aspek

Tata Ruang, Aspek Lingkungan Hidup, Aspek Transportasi dan Aspek Infrastruktur-Utilitas. Untuk indikator obyektif meliputi indikator sasaran strategis urusan dan indikator sasaran program. Namun yang akan dielaborasi pada bab ini adalah terkait indikator sasaran strategis urusan sedangkan indikator sasaran program dielaborasi selanjutnya pada bagian Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Berikut adalah penjelasan dari variabel Kelayakhunian Kota untuk indikator sasaran strategis urusan dalam perhitungan capaian Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, yaitu meliputi :

1. Variabel Aspek Tata Ruang

Variabel aspek tata ruang terdiri dari indikator subjektif yaitu persepsi kerapian penataan bangunan/Kawasan dan Indikator obyektif sub sasaran program terdiri dari 1)meningkatnya perencanaan bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis, 2) meningkatnya kualitas penataan ruang, 3) meningkatnya kualitas penataan RTH Publik. Data subjektif untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data obyektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, tingkat capaian Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek tata ruang sebesar 7.37 poin yang terdiri dari nilai subjektif sebesar 6,47 dan nilai obyektif sebesar 8,26 poin. Jika dibandingkan dengan target aspek Tata Ruang pada tahun tersebut sebanyak 8,26 poin, maka capaian nilai ini masih belum memenuhi target. Namun secara umum, skor kelayakhunian kota aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur melampaui target. Perolehan nilai LCI aspek tata ruang tertinggi berada pada Kecamatan Panyileukan dengan skor 7.98 dan nilai LCI aspek tata ruang terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 6.39 poin.



Tabel 2.42
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Tata Ruang Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Tata Ruang			Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Tata Ruang
		Meningkatnya Perencanaan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penataan RTH Publik (Pemukiman)			
1	Andir	1.41	2.22	4.63	8.26	7.24	7.75
2	Antapani	1.41	2.22	4.63	8.26	7.38	7.82
3	Arcamanik	1.41	2.22	4.63	8.26	6.97	7.61
4	Astanaanyar	1.41	2.22	4.63	8.26	7.02	7.64
5	Babakan Ciparay	1.41	2.22	4.63	8.26	6.01	7.13
6	Bandung Kidul	1.41	2.22	4.63	8.26	6.92	7.59
7	Bandung Kulon	1.41	2.22	4.63	8.26	5.92	7.09
8	Bandung Wetan	1.41	2.22	4.63	8.26	5.37	6.82
9	Batununggal	1.41	2.22	4.63	8.26	5.82	7.04
10	Bojongloa Kaler	1.41	2.22	4.63	8.26	6.00	7.13
11	Bojongloa Kidul	1.41	2.22	4.63	8.26	6.52	7.39
12	Buahbatu	1.41	2.22	4.63	8.26	6.58	7.42
13	Cibeunying Kaler	1.41	2.22	4.63	8.26	7.09	7.67
14	Cibeunying Kidul	1.41	2.22	4.63	8.26	6.94	7.60
15	Cibiru	1.41	2.22	4.63	8.26	6.66	7.46
16	Cicendo	1.41	2.22	4.63	8.26	5.85	7.05
17	Cidadap	1.41	2.22	4.63	8.26	6.47	7.36
18	Cinambo	1.41	2.22	4.63	8.26	6.26	7.26
19	Coblong	1.41	2.22	4.63	8.26	6.26	7.26
20	Gedebage	1.41	2.22	4.63	8.26	7.01	7.64
21	Kiaracondong	1.41	2.22	4.63	8.26	6.16	7.21
22	Lengkong	1.41	2.22	4.63	8.26	6.50	7.38
23	Mandalajati	1.41	2.22	4.63	8.26	6.93	7.60
24	Panyileukan	1.41	2.22	4.63	8.26	7.70	7.98
25	Rancasari	1.41	2.22	4.63	8.26	6.55	7.40
26	Regol	1.41	2.22	4.63	8.26	4.51	6.39
27	Sukajadi	1.41	2.22	4.63	8.26	6.07	7.17
28	Sukasari	1.41	2.22	4.63	8.26	6.80	7.53
29	Sumur Bandung	1.41	2.22	4.63	8.26	5.13	6.70
30	Ujung Berung	1.41	2.22	4.63	8.26	7.57	7.91
Rerata		1.41	2.22	4.63	8.26	6.47	7.37

Sumber: Diskominfo, 2024



1. Sasaran Meningkatnya Perencanaan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis Persentase Perencanaan Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis, Indikator Sasaran Strategi Urusan Persentase Perencanaan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis.

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Bangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung adalah sebagai upaya untuk mengimplementasikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah baru Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dalam rangka melaksanakan percepatan pelayanan publik khususnya dalam pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dalam aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) yang langsung terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR-RI). Dan sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tingkat Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung diukur dari Jumlah Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis, dibagi dengan Jumlah Seluruh Objek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar Sesuai Persyaratan.

Tabel 2.43
Data Persetujuan Bangunan Gedung yang Terdaftar melalui Aplikasi SIMBG

No	Deskripsi	Jumlah
1	Data Permohonan Persetujuan bangunan Gedung yang berasal dari Konversi IMB	0
2	Data Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berasal dari Pemohon yang telah memiliki RTBG	0
3	Data Pemohon Baru Persetujuan Bangunan Gedung	2.381
Jumlah Seluruh Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar pada SIMBG		2.381

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang, diolah 2024

Tabel 2.44
Data Persetujuan Bangunan Gedung melalui Aplikasi SIMBG

No	Deskripsi	Jumlah
1	Data Permohonan Persetujuan bangunan Gedung yang berasal dari Konversi IMB (yang terverifikasi sesuai dengan standar Teknis)	1.512
2	Data Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berasal dari Pemohon yang telah memiliki RTBG (yang terverifikasi sesuai dengan standar Teknis)	433
3	Data Pemohon Baru Persetujuan Bangunan Gedung (Proses Terverifikasi sesuai dengan standar teknis)	1.945
Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis		1945

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang, diolah 2024

Target kinerja sebesar 81%. Pada tahun 2024, dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 81,69%. Maka capaian kinerja indikator sebesar 100,85%, Target Kinerja ini pada akhir RPD Tahun 2024-2026 adalah sebesar 83%, sehingga capaian kinerja mencapai 98,42%. Berdasarkan data di atas, Indikator Tingkat kepatuhan pembangunan terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan Gedung dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar Sesuai Persyaratan = $1.945/2.381 = 81,69\%$. Sehingga capaian indikatornya dari target sebesar 81%, dapat direalisasikan sebesar 81,69% atau persentase capaian sebesar 100,85%.

Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung pada tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengembangan Perumahan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp142.936.861.509,- dengan realisasi sebesar Rp133.767.078.788 atau penyerapan sebesar 93,58%. dengan **strategi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dilakukan melalui program Penataan Bangunan Gedung dengan target dokumen penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis terealisasi sebesar 81,69%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 81% maka capaian kinerjanya sebesar 100,85% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2024-2026 sebesar 98,42%.
2. Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan dilakukan melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan target Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH Privat terealisasi sebesar 69,96%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2024-2026 sebesar 100% maka capaian kinerja telah mencapai 69,96%.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target dokumen RDTR dan dokumen perencanaan lainnya terealisasi hingga tahun 2024 sebanyak 2 dokumen. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2024-2026 sebesar 2 dokumen maka capaian kinerjanya sebesar 100%.
4. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten sebanyak 95% dengan realisasi sebesar 95% sehingga capaian kinerja sebesar 100 %. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2024-2026 adalah 95% maka capaian kinerja sebesar 100%.
5. Meningkatnya Kualitas RTH Pemakaman dengan target luasan RTH pemakaman yang tertata dan terpelihara sebesar 36% dan realisasi 36%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2024-2026 sebesar 38% maka capaian kinerja sebesar 94,73%.

Beberapa **hambatan atas program dan kegiatan** yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang :

1. Permasalahan pada sistem (SIMBG) yang tidak dapat diakses karena sedang maintenance atau pemutakhiran sistem. Hal ini menyebabkan permohonan pada Triwulan 4 berkurang;
2. Sebagian masyarakat/perencana belum memahami mengenai tata cara PBG dan SLF serta pemenuhan standar teknis untuk PBG dan SLF;
3. Belum optimalnya waktu layanan pemeriksaan oleh Tim Profesi Ahli (TPA);
4. Belum adanya turunan dari Peraturan Daerah No. 6 tentang Bangunan Gedung, sebagai payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di daerah;
5. Masih kurangnya pemahaman OPD yang menyelenggarakan bangunan gedung negara tentang aturan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung negara dimulai dari penganggaran, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengawasan;

Rekomendasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Mendata permasalahan-permasalahan pada SIMBG dan Konsultasi dengan Kementerian PUPR mengenai permasalahan pada SIMBG;
2. Secara berkala melakukan monitoring terhadap pemeriksaan dokumen teknis PBG;
3. Lanjutan Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Wali Kota tentang Bangunan Gedung;
4. Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung;
5. Meningkatkan kesadaran OPD tentang pentingnya pemahaman tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara agar sesuai standar teknis;

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Persentase Bangunan Gedung yang Terkonfirmasi akan Membangun yang sesuai Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), Indikator Sasaran Strategis: Persentase Bangunan Gedung yang Terkonfirmasi akan Membangun yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Target kinerja sebesar 45%. Pada tahun 2024, dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 45,82%. Maka capaian kinerja indikator sebesar 101,82%, Target Kinerja ini pada akhir RPD Tahun 2024-2026 adalah sebesar 47%, sehingga capaian kinerja mencapai 97,48%.

Hambatan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang diantaranya:

1. Pada tanggal 17 September 2024 sudah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024 – 2044. Namun demikian, Perwal ini belum dapat operasional pada sistem OSS karena masih dalam tahapan integrasi RDTR terhadap sistem OSS yang tahapannya telah mencapai proses Uji Titik Mandiri. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi RDTR kepada seluruh pemangku kepentingan dan dibutuhkan penyusunan pedoman pelaksanaan implementasi RDTR untuk memudahkan operasional muatannya;
2. Jumlah SDM yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bandung;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan bangunan gedung salah satunya dengan penolakan warga terhadap kegiatan inspeksi bangunan gedung.

Rekomendasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk percepatan proses integrasi RDTR terhadap sistem OSS;
2. Melakukan konsultasi dengan K/L terkait secara rutin agar kegiatan pengawasan dan inspeksi dapat dilakukan lebih optimal;
3. Melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang narasumber untuk meningkatkan kualitas SDM pengawasan dan penilik bangunan gedung



3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan RTH Publik (Pemakaman) Persentase Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Pemakaman, Indikator Sasaran Strategis: Persentase Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Pemakaman

Target kinerja sebesar 36%. Pada tahun 2024, dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 36%. Maka capaian kinerja indikator sebesar 100%, Target Kinerja ini pada akhir RPD Tahun 2024-2026 adalah sebesar 38%, sehingga capaian kinerja mencapai 94,73%.

Hambatan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang diantaranya : Nilai jual tanah di area yang ditetapkan sudah tinggi;

Rekomendasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan : Melakukan Appraisal terhadap bidang tanah pada area pengembangan sehingga diperoleh nilai jual tanah sesuai dengan anggaran yang tersedia

Sedangkan untuk indikator subyektif yaitu Persepsi Kerapian Penataan Bangunan/ Kawasan.

2. Variabel Aspek Lingkungan

Variabel aspek lingkungan terdiri dari indikator sub sasaran berupa Meningkatnya Kualitas Air dan Udara, Meningkatnya Layanan Persampahan dan indikator subyektif yaitu persepsi kualitas udara; persepsi kualitas air; persepsi kebersihan lingkungan dari sampah; persepsi ketersediaan penampungan sampah; persepsi pengelolaan sampah; dan indikator obyektif meningkatnya kualitas air dan udara; serta meningkatnya layanan persampahan. Data subjektif untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data obyektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, tingkat capaian Indeks Liveable City Aspek Lingkungan Kota Bandung memiliki nilai sebesar 8,20 poin yang terdiri dari nilai subjektif sebesar 9,38 dan nilai obyektif sebesar 7,03 poin. Jika dibandingkan dengan target aspek Lingkungan pada tahun tersebut sebanyak 6,78 poin, maka capaian nilai ini masih belum memenuhi target. Namun secara umum, skor kelayakhunian kota aspek Lingkungan Hidup melampaui target. Perolehan nilai LCI aspek lingkungan tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 8.74 dan nilai LCI aspek lingkungan terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 7.42.

Tabel 2.45
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Lingkungan Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Lingkungan		Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Lingkungan
		Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Meningkatnya Layanan Persampahan			
1	Andir	6.33	3.05	9.39	8.10	8.74
2	Antapani	6.33	3.05	9.38	7.51	8.45
3	Arcamanik	6.33	3.05	9.38	7.09	8.23
4	Astanaanyar	6.33	3.05	9.38	7.26	8.32
5	Babakan Ciparay	6.33	3.05	9.38	6.87	8.12
6	Bandung Kidul	6.33	3.05	9.38	6.05	7.71
7	Bandung Kulon	6.33	3.05	9.38	7.13	8.26
8	Bandung Wetan	6.33	3.05	9.38	6.02	7.70
9	Batununggal	6.33	3.05	9.38	7.48	8.43
10	Bojongloa Kaler	6.33	3.05	9.38	5.65	7.52
11	Bojongloa Kidul	6.33	3.05	9.38	7.23	8.30
12	Buahbatu	6.33	3.05	9.38	6.97	8.18
13	Cibeunying Kaler	6.33	3.05	9.38	7.70	8.54
14	Cibeunying Kidul	6.33	3.05	9.38	7.13	8.25
15	Cibiru	6.33	3.05	9.38	7.48	8.43
16	Cicendo	6.33	3.05	9.38	6.85	8.11
17	Cidadap	6.33	3.05	9.38	7.71	8.55
18	Cinambo	6.33	3.05	9.38	7.68	8.53
19	Coblong	6.33	3.05	9.38	7.00	8.19
20	Gedebage	6.33	3.05	9.38	7.48	8.43
21	Kiaracondong	6.33	3.05	9.38	7.39	8.39
22	Lengkong	6.33	3.05	9.38	6.48	7.93
23	Mandalajati	6.33	3.05	9.38	6.86	8.12
24	Panyileukan	6.33	3.05	9.38	7.48	8.43
25	Rancasari	6.33	3.05	9.38	6.78	8.08
26	Regol	6.33	3.05	9.38	5.47	7.42
27	Sukajadi	6.33	3.05	9.38	7.16	8.27
28	Sukasari	6.33	3.05	9.38	7.73	8.55
29	Sumur Bandung	6.33	3.05	9.38	5.67	7.53
30	Ujung Berung	6.33	3.05	9.38	7.46	8.42
Rerata		6.33	3.05	9.38	7.03	8.20

Sumber: Diskominfo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dielaborasi indikator kinerja dalam perhitungan nilai obyektif untuk sasaran pada aspek Lingkungan berikut ini:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara, Indikator Sasaran Strategis terdiri dari :

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air dan Udara tercakup dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan

formulasi baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27/2021, tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus pembobotan 0,376 pada Indeks Kualitas Air (IKA), 0,405 pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 0,219 pada Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung capaian IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 57,16 poin (termasuk kategori Sedang) dengan rincian capaian IKA sebesar 48,59 poin dikali 0,376 = 18,27 poin, capaian IKU sebesar 83,36 poin dikali 0,405 = 33,76 poin dan capaian IKL sebesar 23,42 poin dikali 0,219 = 5,13 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46
Target dan Capaian IKLH Kota Bandung 2024

INDIKATOR	TARGET/ BASELINE DATA (POIN) 2023	TARGET (POIN) 2024	CAPAIAN (POIN) 2024	Capaian Kinerja (%)
IKLH	56,32	55,80	57,16	102,44
IKA	48,32	48,44	48,59	100,31
IKU	79,63	80,70	83,36	103,30
IKL	26,94	-	23,42	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2024

A. Capaian Indikator Kualitas Air

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 adalah 48,59 poin bila dibandingkan dengan target sebesar 48,44 poin maka capaian kinerjanya sebesar 100,31%. Capaian ini menggambarkan kondisi air yang berada pada kategori “kurang” dan nilai ini didapat dari pengolahan 128 data pada 64 titik pantau selama 2 periode pemantauan. Hasil pengolahan data kualitas air tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 93% atau 119 data hasil pantau berada pada status cemar ringan dan sebanyak 7% atau 9 data berada pada status cemar sedang. Untuk selanjutnya, fokus intervensi akan diberikan kepada wilayah di sekitar ruas sungai dengan kategori “cemar sedang”. untuk dievaluasi penyebab pencemarannya dan dicarikan solusi untuk mengurangi tingkat pencemarannya.

Sementara itu untuk Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 adalah 83,36 poin bila dibandingkan dengan target pada tahun yang sama sebesar 80,70 poin, maka capaian kinerjanya sebesar 103,30%. Capaian ini menggambarkan kualitas udara Kota Bandung saat ini berada pada status “baik”. Nilai Indeks Kualitas Udara dihitung dari 16 data pada 8 titik pantau selama 2 periode pemantauan. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa kadar polutan SO₂ yang paling tinggi ternyata berada di lokasi pemantauan transportasi dan paling rendah di pemukiman. Kadar NO₂ pun sama, yaitu paling tinggi berada di wilayah yang mewakili transportasi dan yang paling rendah berada di pemukiman. Apabila dilihat dari data tersebut terlihat bahwa transportasi merupakan sumber pencemar udara parameter SO₂ dan NO₂ yang paling tinggi di Kota Bandung. Capaian kinerja IKLH tahun 2024 sebesar 57,16 poin bila dibandingkan dengan target sebesar 55,80 poin maka capaian kinerjanya sebesar 102,44%, bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024-2026 sebesar 56,04 poin maka capaian kinerjanya sebesar 102,00%.

Capaian ini menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Bandung dalam kategori sedang. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup



secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Provinsi. Hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan harus secara region dan menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Kategori IKU "sedang" ini ditunjukkan dengan kualitas udara di 9 lokasi yang mewakili area permukiman, industri, transportasi, dan perkantoran, dengan capaian sebesar 83,36 poin yang termasuk dalam kriteria kualitas udara "baik". Meskipun untuk kualitas air di 64 titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir pada 24 sungai Kota Bandung, masih berada pada kategori "kurang" dengan capaian sebesar 48,59 poin.

Implementasi kebijakan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2024, dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pencemaran air akibat limbah domestik dan limbah industri, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Menurunkan tingkat pencemaran air limbah domestik yang tercapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup persentase sungai dengan capaian status indeks pencemaran "cemar ringan" dari target 92,19% tercapai 93,00% yang diukur dari 128 titik sampel air sungai di 24 sungai selama 2 periode dan mengacu pada 7 parameter pencemaran, maka sebanyak 119 titik sample atau sekitar 93,00% berada pada status Indeks Pencemaran "Cemar Ringan". Hasil ini dicapai melalui dukungan program Hasil ini dicapai melalui dukungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 82,55 % dari target 80,39%, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersedia dan mampu mengakses sanitasi dasar yang layak dalam mewujudkan perilaku tidak Buang Air Besar Sembarangan. Hal

ini diperkuat dengan adanya deklarasi capaian persentase Kelurahan ODF Kota Bandung sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% atau 151 kelurahan /seluruh kelurahan di Kota Bandung. Hal ini tercapai selain berkat partisipasi masyarakat juga atas dukungan dari berbagai pihak dalam pemenuhan sarana sanitasi dari Perumda Tirta Wening, DPKP, Corporate Social Responsibility, Forum Bandung Sehat, Satgas Citarum Harum dan kewilayahan melalui anggaran PIPPK.

- b. Untuk mencapai penurunan pencemaran air sumber limbah industri dilakukan melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil Persentase Komponen Daya Dukung dan Daya Tampung yang Memenuhi Kapasitasnya terpenuhi sebesar 52,00% dari target sebesar 52,00%. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan hasil Persentase sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan” dengan capaian 93,00% dari target sebesar 92,19% serta Indeks SO₂ sebesar 0,49 poin dari target sebesar 0,54 poin. Nilai Indeks SO₂ yang semakin kecil menunjukkan tingkat pencemaran yang lebih rendah atau kualitas udara yang lebih baik. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah Dilakukan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 37,5% dari target 37,5%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian Persentase Kawasan Ekologi Kota yang Terkelola sebesar 100% dari target 100% (yaitu terpeliharanya dua kawasan konservasi di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru dan di mata air Cikendi Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap serta capaian Persentase Peningkatan Kampung Iklim sebesar 33,33% dari target sebesar 33,33%. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian Persentase Peningkatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Menerima Insentif sebesar 9,3% dari target 9,3%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian Persentase Penyelesaian Kasus Sesuai SOP sebesar 100% dari target 100%, dari 61 pengaduan yang diterima



Implementasi kebijakan strategis untuk memenuhi target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat emisi cerobong industri dan gas buang kendaraan, dalam upaya memenuhi target IKLH pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat emisi cerobong industri dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target Indeks SO₂ sebesar 0,54 poin dengan realisasi 0,49 poin. Hal ini didapat dari hasil pengukuran secara passive sampler sebesar 0,49 poin, yang memiliki arti bahwa kadar polutan SO₂ di udara serta kualitas udara secara umum berada dalam kondisi baik. Nilai Indeks SO₂ yang semakin kecil menunjukkan tingkat pencemaran yang lebih rendah atau kualitas udara yang lebih baik. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan hasil Persentase Komponen Daya Dukung dan Daya Tampung yang Memenuhi Kapasitasnya terpenuhi sebesar 52,00% dari target sebesar 52,00%. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Setelah Dilakukan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 37,5% dari target 37,5%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian Persentase Kawasan Ekologi Kota yang Terkelola sebesar 100% dari target 100% (yaitu terpeliharanya dua kawasan konservasi di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru dan di mata air Cikendi Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap serta capaian Persentase Peningkatan Kampung Iklim sebesar 33,33% dari target sebesar 33,33%. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian Persentase Peningkatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Menerima Insentif sebesar 9,3% dari target 9,3%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian Persentase Penyelesaian Kasus Sesuai SOP sebesar 100% dari target 100%, dari 61 pengaduan yang diterima.
- b. Untuk menurunkan tingkat pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor dilakukan dengan upaya pengendalian gas buang kendaraan umum melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan target 98,04% dan realisasi sebesar 97,5% yaitu kendaraan yang diuji sebanyak 73.722 kendaraan dan yang lulus uji 72.275 Kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, upaya pengendalian dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target Indeks SO₂ sebesar 0,54 poin dengan realisasi 0,49 poin melalui uji emisi kendaraan bermotor secara sukarela di 12 lokasi pengujian yang diselenggarakan di Kantor Gojek sebanyak 4 kali, RSHS, Balai Kota Bandung, Samsat Kawaluyaan, Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial, UNPAS Kampus IV Setiabudi, Jl. Soekarno-Hatta (EKUP), Jl. Buahbatu (EKUP), Jl. Pajajaran (EKUP), Kantor DLH Kota Bandung dan Biofarma sebanyak 5 kali dengan hasil 91,12% kendaraan lulus uji emisi.

2. Sasaran Meningkatnya Layanan Persampahan, Indikator Sasaran Strategis : Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Capaian Kinerja Indikator Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah didapat melalui capaian pengurangan sampah dari sumber dan capaian penanganan sampah di Kota Bandung. Data timbulan sampah pada tahun 2024 berdasarkan perhitungan Kebijakan Strategis Daerah Kota Bandung tahun 2017- 2025 adalah sebesar 655.726 ton dan ditargetkan terlayani sebesar 99,00%, dengan rincian target melalui capaian pengurangan sampah dari sumber sebesar 28% atau sebanyak 183.603,28 ton



dan capaian penanganan sampah sebesar 71% atau sebanyak 465.565,46 ton dan diperkirakan sebesar 1% atau sebanyak 6.557 ton belum terlayani.

Pada Tahun 2024, kondisi TPA Sarimukti sudah semakin kritis, sementara TPA Legoknangka akan beroperasi di Bulan Februari Tahun 2027 sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembatasan ritasi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti untuk memperpanjang masa pakai TPA. Kuota rata-rata pembuangan sampah untuk Kota Bandung ditetapkan sebesar 140 rit per hari. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk menurunkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA karena sebelumnya, ritasi rata-rata pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sari Mukti adalah sebesar 174 rit per hari.

Upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi kuota ritasi adalah dengan mengaktifasi sistem pengelolaan sampah di sumber, yang telah dibangun pada masa darurat sampah. Upaya aktivasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewajibkan setiap rumah untuk melakukan pemilahan sampah dan menerapkan aturan “tidak dipilah tidak diangkut”.
2. Sampah Organik yang sudah terpilah, didorong untuk diolah di setiap rumah menggunakan loseda, Takakura, komposter dan bentuk lainnya. Sedangkan sampah anorganik dikelola melalui Bank Sampah atau sedekah sampah. Sampah residu diangkut oleh Mamang Sampah ke TPS.
3. Dilakukan piket penjagaan TPS melibatkan seluruh perangkat daerah dan kewilayahan dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan hanya sampah residu yang masuk ke TPS
4. Sampah organik terpilah yang tidak terolah di rumah, diolah di pengolahan skala Kawasan atau diolah di rumah magot skala kelurahan.
5. Sampah yang sudah masuk ke TPS, diolah di TPS3R dan TPS terpadu yang saat ini berjumlah 17 Lokasi dan akan bertambah 3 Lokasi dari sumber pembiayaan APBN melalui KemenPUPR
6. Dibuat Perjanjian Kinerja Camat untuk menurunkan jumlah ritasi sampah dan dilakukan monitoring melalui Rapat Evaluasi Satgas.

7. Untuk mengantisipasi belum terbentuknya perubahan perilaku, kondisi cuaca buruk yang menyebabkan banjir serta masih adanya titik-titik pembuangan sampah liar, dilakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Garut untuk membuang ke TPA Pasir Baging hingga akhir Februari 2025.
8. Menyusun Perwal Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang memuat Teknis Pengurangan dan Penanganan sampah serta insentif dan disinsentif untuk pengintegrasian sistem hulu ke hilir pengelolaan sampah
9. Untuk pengendalian sampah yang dibuang ke TPS terutama dari para vendor yang illegal, diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Bandung nomor 159-DLH/2024 tanggal 26 November 2024 hal : Pengelolaan Sampah pada Kawasan/Area Kegiatan

Setelah adanya Aktivasi Sistem, Pengelolaan Sampah di Sumber terdapat peningkatan jumlah Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan Bank Sampah Unit. Hingga akhir tahun 2024 telah terdapat 414 RW KBS dan 519 Bank Sampah Unit di Kota Bandung. Meskipun RW KBS dan Bank Sampah Unit ini belum dapat menyelesaikan seluruh masalah sampah, tetapi telah menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat yang signifikan terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung. Dikarenakan berbagai upaya penanganan situasi darurat pengelolaan sampah di atas, maka pelayanan timbulan sampah terealisasi sebesar 99,21% dari target sebesar 99,00% atau capaian kinerjanya sebesar 100,21% bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024-2026 sebesar 100,0% maka capaian kinerjanya sebesar 99,21%. Capaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah, telah mencapai target yaitu sebesar 99,21% namun masih terdapat timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bandung yang belum tertangani, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.47

Kinerja Layanan Pengelolaan Sampah Kota pada Tahun 2024

No.	Uraian	Target Dari Total Timbulan Sampah	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Realisasi Terhadap Total Timbulan Sampah	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7 = 6/3*100
1	Capaian Pengurangan sampah dari sumber (rumus peningkatan)	28%	183.603,28	246,594	37,61%	134,32%
2	Capaian penanganan sampah Kota (rumus penurunan)	71%	465.565,46	403.949,15	61,60%	113,24%
3	Belum terlayani	1%	6.557,00	5.182,59	0,79%	-
Total Timbulan Sampah			655.725,74	655.725,74	100,00%	

Sumber: DLH Kota Bandung, 2024

Realisasi capaian penanganan sampah adalah sebesar 61,60% dari target sebesar 71,00% menggambarkan bahwa saat ini telah terjadi penurunan pengiriman sampah ke TPA. Di sisi lain, capaian kinerja pengurangan sampah dari sumber yang ditargetkan sebesar 28% dapat tercapai sebesar 37,61%, hal ini menggambarkan bahwa adanya pembatasan jumlah ritasi pengangkutan sampah ke TPA telah memaksa seluruh pihak untuk dapat mengelola sampahnya sejak dari sumber sampah, dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dengan berbagai metoda atau cara pengolahan.

Pengurangan sampah di sumber menjadi suatu keniscayaan, karena bukan hanya bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPA tetapi harus dipandang lebih jauh, yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengurangan sampah baik di sektor domestik maupun komersil harus terus dilakukan.

Untuk meningkatkan jumlah sampah yang dapat diolah dari sumber maka berbagai upaya yang selanjutnya akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memasifkan pembentukan RW KBS melalui edukasi pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik secara mandiri atau kawasan.
2. Memasifkan pembentukan Bank Sampah atau Sedekah Sampah agar sampah recycable dapat dimanfaatkan.
3. Mempercepat proses operasionalisasi fasilitas-fasilitas TPST yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat di tahun 2024

Sedangkan untuk indikator subyektif aspek lingkungan yaitu :

1. Persepsi Kualitas Udara
2. Persepsi Kualitas Air
3. Persepsi Kebersihan Lingkungan dari Sampah
4. Persepsi Ketersediaan Penampungan Sampah
5. Persepsi Pengelolaan Sampah

3. Variabel Aspek Transportasi

Variabel aspek transportasi terdiri dari indikator subyektif yaitu persepsi keterjangkauan transportasi public; persepsi kelayakan transportasi public; persepsi kemacetan; serta indikator obyektif sub sasaran program yaitu meningkatnya kualitas lalu lintas dan angkutan. Data subjektif untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data objektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek transportasi sebesar 8.03 dari target sebesar 7,85 poin yang terdiri dari nilai subjektif sebesar 9,41 dan nilai obyektif sebesar 6,65 poin. Jika dibandingkan dengan target aspek Transportasi pada tahun tersebut sebanyak 7,85 poin, maka capaian nilai ini masih belum memenuhi target. Namun secara umum, skor kelayakhunian kota aspek Transportasi melampaui target. Perolehan nilai LCI aspek transportasi tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 8.78 dan nilai LCI aspek transportasi terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 7.52.

Tabel 2.48
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Transportasi Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Transportasi	Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Transportasi
		Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan			
1	Andir	9.41	9.41	8.15	8.78
2	Antapani	9.41	9.41	6.50	7.95
3	Arcamanik	9.41	9.41	6.53	7.97
4	Astanaanyar	9.41	9.41	7.35	8.38
5	Babakan Ciparay	9.41	9.41	6.62	8.02
6	Bandung Kidul	9.41	9.41	5.74	7.58
7	Bandung Kulon	9.41	9.41	6.42	7.91
8	Bandung Wetan	9.41	9.41	6.02	7.72
9	Batununggal	9.41	9.41	6.71	8.06
10	Bojongloa Kaler	9.41	9.41	6.47	7.94
11	Bojongloa Kidul	9.41	9.41	6.86	8.14
12	Buahbatu	9.41	9.41	6.66	8.03
13	Cibeunying Kaler	9.41	9.41	7.13	8.27
14	Cibeunying Kidul	9.41	9.41	6.73	8.07
15	Cibiru	9.41	9.41	6.52	7.97
16	Cicendo	9.41	9.41	6.77	8.09
17	Cidadap	9.41	9.41	7.36	8.38
18	Cinambo	9.41	9.41	6.96	8.18
19	Coblong	9.41	9.41	6.95	8.18
20	Gedebage	9.41	9.41	6.71	8.06
21	Kiaracondong	9.41	9.41	6.42	7.91
22	Lengkong	9.41	9.41	5.95	7.68
23	Mandalajati	9.41	9.41	6.19	7.80
24	Panyileukan	9.41	9.41	6.91	8.16
25	Rancasari	9.41	9.41	6.09	7.75
26	Regol	9.41	9.41	5.09	7.25
27	Sukajadi	9.41	9.41	7.26	8.34
28	Sukasari	9.41	9.41	7.65	8.53
29	Sumur Bandung	9.41	9.41	5.75	7.58
30	Ujung Berung	9.41	9.41	7.01	8.21
Rerata		9.41	9.41	6.65	8.03

Sumber: Diskominfo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dielaborasi indikator kinerja dalam perhitungan nilai obyektif untuk indikator sasaran strategis urusan pada aspek Transportasi berikut ini:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan, Indikator Sasaran Strategis terdiri dari :

A. Persentase Penurunan Kemacetan

Kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Indikator ini dicapai dengan strategi meningkatnya pelayanan jalan dengan indikator Persentase tingkat pelayanan jalan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 115 ruas jalan berdasarkan fungsi (kolektor primer, kolektor sekunder dan arteri sekunder) yang menjadi kewenangan Kota Bandung. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat 79 ruas jalan dengan Level of Service (LOS) A, B dan C dengan kategori tidak macet.

Dengan tingkat pelayanan jalan eksisting LoS A,B,C sebesar 68,70% atau 79 ruas jalan telah terselesaikan kemacetannya (2023). Pada tahun 2024 ditargetkan meningkatkan pelayanan jalan di 8 ruas jalan dari LoS D dan E menjadi minimal C sehingga ruas jalan yang telah terselesaikan kemacetannya ditargetkan bertambah menjadi 87 ruas jalan atau tingkat pelayanannya ditargetkan sebesar 75,65%. Namun pada tahun 2024 hanya 6 ruas jalan yang berhasil teratasi sehingga ruas jalan yang terselesaikan kemacetannya bertambah menjadi 85 ruas jalan atau tingkat pelayanannya sebesar 73,91%. Adapun 6 ruas jalan yang dimaksud yaitu berada di Jalan Buah Batu (Sp Simpang Buah Batu- Simpang BKR, Jalan Braga, Jalan Naripan, Jalan WR. Supratman, Jalan Cihampelas dan Jalan Ciwastra. Sementara 2 ruas jalan yang tidak teratasi yaitu berada di Jalan Cikutra Barat dan Jalan Surya Sumantri.

Setelah dilakukan penanganan pada 8 ruas jalan tersebut dilakukan pengukuran dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.49
Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2024

No	Ruas Jalan	V/C Ratio		Kecepatan Rata2	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Jalan BUAH BATU (Sp.4 PELAJAR PEJUANG 45 - Sp.4 SOEKARNO HATTA)	0,82	0,68	16,31	21,09
2	Jalan Braga	0,82	0,57	15,18	21,02
3	Jalan Naripan	0,82	0,50	17,32	22,45
4	Jalan WR. Supratman	0,81	0,43	17,68	28,63
5	Jalan Cihampelas	0,81	0,64	15,21	24,50
6	Jalan Cikutra Barat	0,91	0,84	14,64	15,30
7	Jalan Surya Sumantri	0,82	0,83	15,42	15,90
8	Jalan Ciwastra	0,81	0,70	15,30	21,4

Sumber: Dinas Perhubungan, diolah 2024



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa v/c ratio dapat diturunkan dari semula $>0,8$ (kondisi macet) menjadi $< 0,8$ (kondisi tidak macet) demikian pula dengan kecepatan rata-rata tempuh dari semula < 21 km/jam menjadi > 21 km/jam, sehingga kedelapan ruas jalan tersebut dapat dikategorikan tidak macet.

Pada tahun 2023 terdapat 36 ruas jalan yang belum tertangani kemacetannya dari 115 ruas jalan, sedangkan tahun 2024 menjadi 30 ruas jalan lagi yang belum tertangani kemacetannya dari total 115 ruas jalan di Kota Bandung. Dengan demikian persentase penurunan kemacetan tahun 2024 adalah sebesar 26,09% yaitu terdapat 30 ruas jalan dengan Level of Service D,E atau F yang belum meningkat pelayanannya dari 115 ruas jalan pengamatan.

Strategi meningkatkan pelayanan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan akan dicapai dengan kebijakan:

1. Meningkatkan kemantapan jalan indikator tingkat kemantapan jalan;
2. Meningkatkan kualitas trotoar dengan indikator luas trotoar dengan kondisi baik; dan
3. Meningkatkan cakupan PJU menyala dengan indikator cakupan PJU menyala

Strategi tersebut dijalankan melalui kebijakan untuk mendukung meningkatnya pelayanan jalan dan kebijakan untuk menurunkan aspek penyebab kemacetan baik urusan perhubungan dan non perhubungan. Berikut adalah aspek-aspek penyebab kemacetan yang termasuk ke dalam :

1. Aspek perhubungan : “Ngetem” Angkutan umum, Parkir liar on street, Pejalan kaki yang tidak pada tempatnya, Pengaturan waktu siklus traffic light/lampu lalu lintas, Disiplin Pengemudi Angkutan Umum, Marka Jalan belum ada / kurang / pudar, dan Rambu lalu lintas belum ada / kurang / rusak.
2. Aspek Non Perhubungan : Aksesibilitas gang/jalan, Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan/pendidikan, Pasar Tumpah, PKL, Banjir/Genangan, Kualitas/Kondisi Infrastruktur Jalan, Perlintasan Sebidang KA, Pola Pergerakan Commuter dan Volume Lalu Lintas yang Tinggi.

Mulai tahun 2022 pembangunan dan pemeliharaan PJU yang semula menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berubah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, begitu pula PJJ yang semula menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Target cakupan Alat Penerangan Jalan (APJ) menyala pada Tahun 2024 adalah sebesar 91%. Realisasi cakupan APJ menyala pada Tahun 2024 adalah 100.35%, yang terdiri dari 5398 Titik APJ Menyala dari total 5379 titik APJ yang ada. Dengan demikian realisasi cakupan APJ menyala pada tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar $100.35\%/91\% = 110.27\%$.

Implementasi kebijakan strategis meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas pada tahun 2024 khususnya yang terkait dengan persentase penurunan kemacetan dilaksanakan melalui strategi yaitu dengan menurunkan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang menghasilkan berkurangnya aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 7,70% dari target 7,58%. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah didukung oleh tingkat konektivitas jalan dan tingkat konektivitas angkutan umum. Tingkat konektivitas



jalan dan tingkat konektivitas angkutan umum digunakan untuk melihat tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi. Pada tahun 2023, keseluruhan total jalan di kota Bandung adalah sepanjang 1480,8 km, panjang jalan yang sudah terlayani dengan angkutan umum antara lain angkot, TMB, dan DAMRI sepanjang 536,7 km, dengan jumlah trayek angkutan kota sebanyak 39 trayek, jumlah koridor Trans Metro Bandung sebanyak 5 koridor, maka jumlah trayek angkutan umum di wilayah Kota Bandung adalah 44 trayek. Dari data tersebut didapatkan tingkat konektivitas angkutan umum di Kota Bandung adalah sebesar $536,7 : 1.480,8 = 36,24\%$.

Keselamatan transportasi merupakan sesuatu yang mutlak dalam transportasi agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan. Sebagian besar dari pengukuran kinerja keselamatan transportasi jalan bertujuan untuk mengurangi fatalitas. Tingkat fatalitas (Case Fatality Rate/ CFR) adalah perbandingan antara jumlah korban meninggal dunia terhadap jumlah kejadian kecelakaan. tinggi rendahnya Tingkat fatalitas menunjukkan baik buruknya keselamatan transportasi jalan. Semakin rendah tingkat fatalitas maka menunjukkan semakin baiknya keselamatan transportasi jalan, begitu sebaliknya. Semakin tingginya tingkat fatalitas maka semakin buruk keselamatan transportasi jalan. Fatalitas tertera pada Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.

Indikator untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan yaitu :

Tingkat Fatalitas = $Fk \times 10000 / (LHRT \times n \times 365)$

Fk : Frekuensi Fatalitas selama n tahun

n : jumlah tahun

L : Panjang segmen (km)

(Satuan Tingkat fatalitas adalah kecelakaan per tahun per 10.000 kend-km)

Pada tahun 2024 target tingkat fatalitas per 100.000 penduduk adalah sebesar 6,500 indeks dan realisasi sebesar 8,800 indeks atau capaian kinerja sebesar 64,62% dari target sedangkan target tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan adalah sebesar 0,885 indeks dan realisasi sebesar 1,000 indeks atau capaian kinerja sebesar 87,01%. Rumus diatas digunakan untuk menghitung persentase capaian kinerja yang memiliki indikator negatif. Dimana semakin kecil nilainya maka semakin baik kinerjanya

B. Rasio Pengguna Angkutan Umum vs Angkutan Pribadi

Target Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi pada Tahun 2024 adalah sebesar 1 : 3,601 Realisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 1 : 3,350 Dengan demikian realisasi Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi pada tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar 106,97.

Tabel 2.50
Jumlah Penumpang Kendaraan Umum dan Pribadi

NO.	SWK	NAMA RUAS	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)	
			ANGKUTAN UMUM (Angkot, Bus, Travel)	KEND. PRIBADI (Sepeda Motor, Mobil Penumpang)
1	BOJONEGARA	JL. DR. DJUNJUNAN	4,420	12,727
2	BOJONEGARA	JL. SUKAJADI	2,031	6,447
3	BOJONEGARA	JL. CIPAGANTI	1,214	8,762
4	BOJONEGARA	JL. PADJAJARAN	1,197	5,127
5	BOJONEGARA	JL. SETIABUDI	2,188	6,255
6	TEGALEGA	JL. CARINGIN	1,468	4,351
7	TEGALEGA	JL. MOH. TOHA	3,582	7,653
8	TEGALEGA	JL. KOPO	1,506	8,004
9	TEGALEGA	JL. TERS. PASIRKOJA	953	5,643
10	CIBEUNYING	JL. CICENDO	1,672	3,040
11	CIBEUNYING	JL. CIPAGANTI	1,994	8,299
12	CIBEUNYING	JL. PHH MUSTOFA	3,075	11,254
13	CIBEUNYING	JL. LL. MARTADINATA	3,725	23,813
14	CIBEUNYING	JL. SUPRATMAN	505	8,980
15	KAREES	JL. BUAH BATU	3,700	7,938
16	KAREES	JL. PELAJAR PEJUANG	3,767	8,752
17	KAREES	JL. LASWI	5,728	5,701
18	KAREES	JL. AHMAD YANI (SP. LASWI - SUPRATMAN)	4,006	6,094
19	KAREES	JL. BKR	7,527	6,709
20	KORDON	JL. CIWASTRA	870	2,467
21	KORDON	JL. MARGACINTA	5,163	10,232
22	KORDON	JL. LOGAM	1,818	9,986
23	KORDON	JL. IBRAHIM ADJIE	840	5,013
24	KORDON	JL. BUAH BATU	5,669	9,831
25	ARCAMANIK	JL. TERUSAN JAKARTA	1,604	8,862
26	ARCAMANIK	JL. AH NASUTION (CICAHEUM - SINDANGLAYA)	1,233	5,016
27	ARCAMANIK	JL. GOLF RAYA	3,744	17,577
28	ARCAMANIK	JL. ARCAMANIK	2,712	9,831
29	ARCAMANIK	JL. PARAKAN SAAT	2,721	8,987
30	UJUNGBERUNG	JL. RUMAH SAKIT	2,958	9,876
31	UJUNGBERUNG	JL. AH NASUTION (SINDANGLAYA - CIBIRU)	1,380	9,990
32	UJUNGBERUNG	JL. SOEKARNO HATTA	977	4,804
33	UJUNGBERUNG	JL. GEDEBAGE SELATAN	1,299	8,965
34	GEDEBAGE	JL. DERWATI	792	3,482
35	GEDEBAGE	JL. CIPAMOKOLAN	416	2,318
36	GEDEBAGE	JL. GEDEBAGE	1,057	8,742
37	GEDEBAGE	JL. CIMINCRANG	1,164	9,640
38	GEDEBAGE	JL. RANCANUMPANG	2,014	9,311
JUMLAH PENUMPANG			92,689	310,479

Implementasi kebijakan strategis yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menangani kemacetan yaitu melalui pengembangan transportasi publik, penataan manajemen rekayasa lalu lintas, penataan parkir, dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur seperti JPO dan Halte.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan tidak tercapai disebabkan oleh 3 faktor utama penyebab kemacetan di Kota Bandung, antara lain Volume lalu lintas yang tinggi menunjukkan bahwa kapasitas jalan tidak mampu menampung jumlah kendaraan, akseibilitas keluar masuk pendidikan/pertokoan, dan Disiplin pengemudi angkutan umum dengan berhenti sembarangan yang turut memperparah kemacetan. Kemudian, Indeks fatalitas dan konektivitas Dinas Perhubungan Kota Bandung juga tidak tercapai karena tingginya jumlah kendaraan pribadi, keterbatasan transportasi publik, pelanggaran lalu lintas,



serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam hal ini dibutuhkan sinergi antar dinas untuk mengatasi masalah transportasi secara menyeluruh di Kota Bandung, antara lain seperti :

1. Dinas Sumber Daya Air dan Mineral (DSDABM) Bertanggung jawab atas infrastruktur jalan, drainase, dan perbaikan jalan berlubang yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas.
2. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Berperan dalam perencanaan tata kota agar transportasi publik lebih terintegrasi dengan kawasan permukiman.
3. Dinas Pendidikan Berperan dalam edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar agar meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini.
4. Satlantas Polrestabes Bandung Berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan peningkatan disiplin pengguna jalan.

Upaya-upaya meningkatkan penanganan kemacetan yang dilakukan dinas perhubungan sebagai berikut :

1. Dalam hal penanganan kemacetan dan pendidikan keselamatan lalu lintas telah dilakukan penderekan kendaraan dilakukan sesuai SOP, dan sosialisasi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan untuk tingkat PAUD dan SD. Namun, beberapa fasilitas pendukung masih terkendala anggaran.
2. Melakukan pelatihan, sosialisasi, pengawasan, dan optimalisasi pelayanan transportasi seperti TMB, Bandros, Boleh, dan parkir elektronik untuk peningkatan kinerja BLUD.
3. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas.
4. Melakukan Pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan umum di sepanjang rute BIUTR baik persimpangan maupun ruas jalan, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

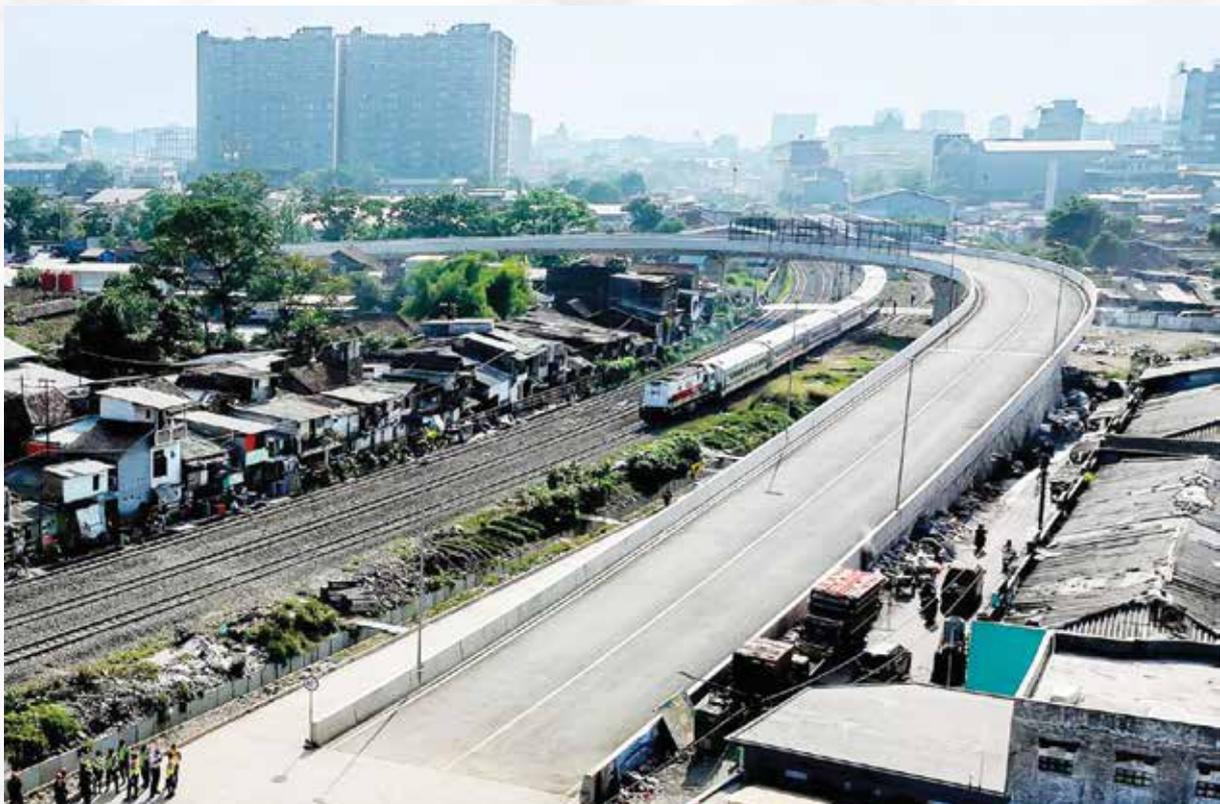
Sedangkan untuk indikator subyektif aspek Transportasi yaitu

1. Persepsi Keterjangkauan Transportasi Publik
2. Persepsi Kelayakan Transportasi Publik
3. Persepsi Kemacetan

4. Variabel Aspek Infrastruktur dan Utilitas

Variabel Aspek Infrastruktur Utilitas terdiri dari indikator subjektif yaitu persepsi kondisi jalan; persepsi kecukupan layanan air bersih; persepsi pengelolaan air limbah; persepsi kelayakan trotoar; persepsi kelancaran aliran pada drainase; persepsi kecukupan layanan Listrik; persepsi kestabilan layanan Listrik; persepsi jumlah RTH; persepsi kelayakan RTH; persepsi kepuasan dan keterjangkauan RTH; dan indikator obyektif sub sasaran program yaitu Meningkatnya kualitas jalan, berkurangnya genangan; menurunnya luasan Kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas permukiman; meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian layak di perumahan dan Kawasan permukiman; meningkatnya pelayanan air bersih; meningkatnya pelayanan air limbah; meningkatnya kuantitas RTH public; serta meningkatnya kualitas RTH Publik terpelihara. Data subjektif untuk analisis diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data obyektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian indikator yang didapatkan dari berbagai OPD.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek infrastruktur dan utilitas sebesar 7,50, dari target sebesar 7,74 poin yang terdiri dari nilai subjektif sebesar 8,09 dan nilai obyektif sebesar 6,91 poin. Jika dibandingkan dengan target aspek infrastruktur dan utilitas pada tahun tersebut sebanyak 7,74 poin, maka capaian nilai ini memenuhi target. Perolehan nilai LCI aspek infrastruktur-utilitas tertinggi berada pada Kecamatan Andir dengan skor 8.09 dan nilai LCI aspek infrastruktur-utilitas terendah berada pada Kecamatan Regol dengan skor 6.77.



Tabel 2.51
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Infrastruktur dan Utilitas
Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Infrastruktur dan Utilitas								Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI
		Meningkatnya Kualitas Jalan	Berkurangnya Genangan	Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Kualitas Perumahan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hunian Layak di Perumahan dan Kawasan Perumahan	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	Meningkatnya Kualitas RTH Publik Terpelihara			
1	Andir	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	8.09	8.09
2	Antapani	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.47	7.78
3	Arcamanik	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.97	7.53
4	Astanaanyar	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.33	7.71
5	Babakan Ciparay	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.69	7.39
6	Bandung Kidul	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.61	7.35
7	Bandung Kulon	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.84	7.46
8	Bandung Wetan	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	5.78	6.93
9	Batununggal	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.23	7.66
10	Bojongloa Kaler	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.19	7.14
11	Bojongloa Kidul	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.04	7.56
12	Buahbatu	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.92	7.50
13	Cibeunying Kaler	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.19	7.64
14	Cibeunying Kidul	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.86	7.47
15	Cibiru	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.25	7.67
16	Cicendo	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.62	7.35
17	Cidadap	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.31	7.70
18	Cinambo	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.44	7.76
19	Coblong	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.71	7.40
20	Gedebage	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.43	7.76
21	Kiaracondong	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.12	7.60
22	Lengkong	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.44	7.26
23	Mandalajati	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.53	7.31
24	Panyileukan	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.58	7.83
25	Rancasari	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.55	7.32
26	Regol	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	5.45	6.77
27	Sukajadi	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.08	7.58
28	Sukasari	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.61	7.85
29	Sumur Bandung	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	5.80	6.94
30	Ujung Berung	1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	7.13	7.61
Rerata		1.60	2.38	0.59	0.59	0.59	0.59	1.18	0.58	8.09	6.91	7.50

Sumber: Diskominfo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dielaborasi indikator kinerja dalam perhitungan nilai obyektif untuk indikator sasaran strategis urusan pada aspek Infrastruktur-utilitas berikut ini:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Indikator sasaran Strategis Urusan:

A. Tingkat Kemantapan Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Perkembangan kondisi jalan di Kota Bandung dari tahun ke tahun ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Kondisi Jalan Kota Bandung

Kondisi Jalan (%)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Baik	(1)	75.50	77.01	79.55	80.64	73,35	78,81	74,65	69,41	81,86
Kondisi Sedang	(2)	15.24	14.85	12.79	11.74	18,52	16,00	19,36	25,86	13,15
Kondisi Rusak Ringan	(3)	7.49	6.76	6.38	6.12	0,30	2,09	2,77	0,42	0,41
Kondisi Rusak Berat	(4)	1.78	1.38	1.27	1.49	7,83	3,09	3,23	4,31	4,58
Kondisi Mantap	(5) = (1)+(2)	90.74	91.86	92.34	92.38	91,87	94,81	94,01	95,28	95,01
Kondisi Tidak Mantap	(6) = (3)+(4)	9.27	8.14	7.65	7.61	8,13	5,19	5,99	4,72	4,99

Sumber: DSDABM Kota Bandung, 2024

Target tingkat kemantapan jalan pada Tahun 2024 adalah sebesar 95,00%. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan yang telah dilaksanakan, jalan dengan kondisi mantap adalah sepanjang 686.386 m dari 722.441 m panjang jalan yang disurvei atau sebesar 95,01%. Dengan demikian realisasi tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar 95,01/95,00 = 100,01%.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tingkat kemantapan jalan adalah:

- a. Lingkup survey kondisi jalan secara keseluruhan tidak memiliki kecocokan angka dengan jumlah jalan yang terdapat di SK Jalan Wali Kota, sehingga harus ada sinkronisasi data supaya bisa menghasilkan data yang lebih valid.
- b. Survei kondisi jalan dilakukan dengan sampel perwilayah, tidak mencakup seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Kota Bandung.
- c. Curah hujan yang ekstrim serta kapasitas drainase yang tidak memadai menimbulkan limpasan air ke jalan, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan yang masif pada ruas jalan.

Sehubungan kendala tersebut di atas, akan **dilakukan upaya-upaya mencapai target** tingkat kemantapan jalan antara lain:

- a. Melakukan survei kondisi jalan berdasarkan ruas jalan yang menjadi kewenangan Kota Bandung sesuai Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:

620/Kep.1770-DSDABM/2024 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bandung.

- b. Melaksanakan preservasi kondisi jalan secara strategis dengan menyusun skala prioritas preservasi kondisi jalan;
- c. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi sudah mantap dan trotoar dalam kondisi baik;
- d. Mensinergikan pembangunan jalan dengan pembangunan saluran drainase jalan yang memadai dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun;
- e. Melakukan survey kondisi jalan yang menyeluruh, mensurvey seluruh jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung, agar memperoleh tingkat kemantapan secara lengkap

B. Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif

Target persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif pada Tahun 2024 adalah sebesar 18,85%, yang merupakan perhitungan dari target panjang trotoar inklusif sepanjang 180.901 m dibagi panjang jalan kewenangan Kota Bandung sepanjang 959.689 m. Realisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 19,05%, atau terdapat trotoar inklusif sepanjang 182.788 m dari panjang jalan kewenangan Kota Bandung 959.689 m. Dengan demikian persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif pada tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar $19,05/18,85 = 101,06\%$.

2. Sasaran Berkurangnya Genangan, Indikator Sub Sasaran Urusan Persentase Pengurangan Titik Genangan

Persentase Pengurangan Titik Genangan diperoleh dari perbandingan jumlah titik genangan yang sudah memenuhi kriteria keberhasilan terhadap 68 titik genangan yang sudah ditetapkan. Kriteria keberhasilan yang digunakan sesuai RPD Kota Bandung Tahun 2024- 2026 adalah Tinggi Genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Target kinerja persentase pengurangan titik genangan pada tahun 2024 adalah sebesar 91,18%, artinya dari 68 titik genangan target sebanyak 62 titik dapat diselesaikan pada tahun 2024. Realisasinya, pada tahun 2024, jumlah titik genangan yang terselesaikan atau memenuhi kriteria keberhasilan adalah sebanyak 61 titik genangan, dengan demikian realisasi kinerja persentase pengurangan titik genangan pada tahun 2024 adalah sebesar $61/68 = 89,71\%$. Maka kinerja indikator persentase pengurangan titik genangan tidak mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar $89,71/91,18 = 98,39\%$. Data lokasi titik genangan berikut statusnya berdasarkan kriteria keberhasilan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
Data Lokasi Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2024

NO	LOKASI GENANGAN	TINGGI (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS
TITIK GENANGAN BELUM MEMENUHI KRITERIA (7 TITIK)				
1.	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	120	Tinggi > 30 cm Waktu surut > 60 menit
2.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol	50	120	
3.	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	40	180	
4.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	40	150	
5.	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	40	120	
6.	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	50	120	
7.	Terminal Leuwipanjang	40	120	
TITIK GENANGAN DALAM BATAS KRITERIA (9 TITIK)				
1.	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	30	50	DALAM BATAS KRITERIA
2.	S. Cipagalo	30	60	DALAM BATAS KRITERIA
3.	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	25	60	DALAM BATAS KRITERIA
4.	Jl. Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (Sal. Cikutra Barat)	20	60	DALAM BATAS KRITERIA
5.	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	20	60	DALAM BATAS KRITERIA
6.	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisolatri)	20	60	DALAM BATAS KRITERIA
7.	Jl. Plered Sal. Antapani	20	60	DALAM BATAS KRITERIA
8.	Jl. Pagarsih - S. Citepus	20	40	DALAM BATAS KRITERIA
9.	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	20	40	DALAM BATAS KRITERIA
TITIK GENANGAN YANG TELAH TERTANGANI (52 TITIK)				
1.	Sal. Lebak larang - UNPAD	-	-	SELESAI
2.	Jl. Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	-	-	SELESAI
3.	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	-	-	SELESAI
4.	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	-	-	SELESAI
5.	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	SELESAI
6.	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	-	-	SELESAI
7.	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	-	-	SELESAI
8.	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	-	-	SELESAI
9.	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	-	-	SELESAI
10.	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	-	-	SELESAI
11.	S. Cikapundung Kolot - Belakang TSM	-	-	SELESAI
12.	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	-	-	SELESAI
13.	S. Ciroyom Jl. Kopo	-	-	SELESAI
14.	Jl. Cibodas - antapani	-	-	SELESAI
15.	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (Depan Hotel Topaz & BTC)	-	-	SELESAI
16.	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	SELESAI

17.	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	SELESAI
18.	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	SELESAI
19.	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	SELESAI
20.	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	-	-	SELESAI
21.	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	SELESAI
22.	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	-	-	SELESAI
23.	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	SELESAI
24.	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	SELESAI
25.	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	SELESAI
26.	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	SELESAI
27.	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	SELESAI
28.	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	SELESAI
29.	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	-	-	SELESAI
30.	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	SELESAI
31.	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	-	-	SELESAI
32.	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	SELESAI
33.	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	SELESAI
34.	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	-	-	SELESAI
35.	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	SELESAI
36.	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (Depan Hotel Lingga)	-	-	SELESAI
37.	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	SELESAI
38.	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	-	-	SELESAI
39.	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	-	-	SELESAI
40.	S. Cipariuk	-	-	SELESAI
41.	Perumahan Riung Bandung	-	-	SELESAI
42.	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	-	-	SELESAI
43.	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	SELESAI
44.	Jl. Nilem	-	-	SELESAI
45.	Terusan Jl. Kiaracandong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	SELESAI
46.	S. Cirangrang	-	-	SELESAI
47.	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	SELESAI
48.	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	SELESAI
49.	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	SELESAI
50.	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	-	-	SELESAI
51.	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	-	-	SELESAI
52.	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	SELESAI

Sumber: DSDABM Kota Bandung, 2025

Implementasi kebijakan strategis menurunnya genangan pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 135.075.482.307 dengan realisasi sebesar Rp. 125.055.903.573 atau penyerapan sebesar 92,58 %, dengan hasil sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas resapan air, aliran sungai, dan parkir air menghasilkan:
 - a. persentase pengurangan titik genangan sebesar 89,71% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 98,39% dari target 91,18%;
 - b. persentase kapasitas resapan air sebesar 8,17% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 127,28% dari target 5,47%;
 - c. persentase kapasitas aliran sungai sebesar 100,00% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 100,00% dari target 100,00%;
 - d. persentase kapasitas parkir air (kolam retensi) sebesar 56,55% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 99,37% dari target 56,91%;

2. Peningkatan kapasitas saluran drainase jalan menghasilkan persentase Kapasitas saluran drainase sebesar 29,01% sehingga capaian kinerjanya pada tahun 2024 sebesar 94,50% dari target 30,7%.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penanganan permasalahan genangan adalah perlunya keterlibatan perangkat daerah lainnya dalam penyelesaian akar masalah genangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

AKAR MASALAH GENANGAN	INSTANSI TERKAIT (CROSSCUTTING)
Belum adanya pembagian wewenang pengelolaan sungai secara formal	DSDABM, DSDA JABAR, BBWS CITARUM
Belum adanya pembagian wewenang yang jelas terkait pemeliharaan drainase lingkungan	DPKP, KEWILAYAHAN
Belum optimalnya pengawasan pembangunan pada kawasan pemukiman	DICIPTABINTAR, DPMPTSP
Belum optimalnya pengawasan pembangunan pada kawasan perkotaan	DICIPTABINTAR, DPMPTSP
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang pada Kawasan resapan / hulu	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, LINTAS KABUPATEN / KOTA
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang pada Kawasan sempadan sungai	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, BBWS CITARUM
Belum optimalnya pengendalian penataan ruang terkait fungsi resapan pada Kawasan pemukiman	DICIPTABINTAR, DPMPTSP, DLHK, DPKP
Belum optimalnya penyediaan lahan hunian untuk relokasi warga di sempadan sungai	DICIPTABINTAR
Belum tertatanya pemanfaatan saluran drainase untuk utilitas	DSDABM, DPMPTSP
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di badan jalan	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di badan sungai	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di hulu sungai	DLHK, SATPOL PP, KEWILAYAHAN, LINTAS KABUPATEN / KOTA

Kurangnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah di saluran drainase	DLHK, PERUMDA PASAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Praktik penutupan sebagian atau seluruh badan saluran oleh pemilik / penyewa persil	DSDABM, DPKP, DICIPTABINTAR, SATPOL PP, KEWILAYAHAN
Terbatasnya SDM untuk pemantauan tali-tali air secara intensif	DSDABM, DPKP
Terbatasnya SDM untuk pengangkatan sampah saluran drainase secara intensif	DSDABM, DPKP, DLHK, PERUMDA PASAR, KEWILAYAHAN
Terbatasnya SDM untuk pengangkatan sampah sungai secara intensif	DSDABM, DLHK, PERUMDA PASAR, BBWS CITARUM
Tingginya deforestasi kawasan resapan / hulu	DKPP (D/H DISPANGTAN), DICIPTABINTAR, LINTAS KABUPATEN / KOTA
Terbatasnya anggaran pemeliharaan jalan untuk overlay jalan dilengkapi pengupasan lapis perkerasan	DSDABM, DBMPR JABAR, BPJN

Lebih lanjut, **faktor-faktor yang menghambat** pencapaian target persentase pengurangan titik genangan adalah:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.
2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat.
3. Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran.
4. Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan jumlah titik genangan adalah sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan daya rusak air pada kawasan hulu dengan memperbaiki lahan kritis untuk meningkatkan daya resap air dan membuat tampungan air seperti embung dan kolam retensi
2. Upaya pencegahan daya rusak air pada kawasan hilir dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui pembangunan saluran dan normalisasi sungai/saluran
3. Upaya penanggulangan dampak genangan/banjir dengan melakukan rehabilitasi tanggul sungai dan saluran
4. Upaya inovasi dengan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi untuk giat menanam, membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah ke sungai/saluran.

3. Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Kualitas Permukiman, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Persentase Luas Kawasan Kumuh

Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,61% dari target sebesar 1,62% atau capaian kinerjanya sebesar 100,62% bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 1,11% maka capaian kinerjanya sebesar 45,04%.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi luasan Kawasan kumuh adalah

melalui peremajaan kawasan kumuh serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas diukur dari 7 aspek ke kumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tentang 1) Bangunan gedung 2) Jalan lingkungan 3) Penyediaan Air Minum 4) Drainase Lingkungan 5) Pengelolaan air limbah 6) Pengelolaan Persampahan 7) Proteksi Kebakaran, serta didukung dan berkolaborasi stakeholder terkait.

Perhitungan persentase luasan kawasan permukiman kumuh dihitung berdasarkan rumus luas permukiman kumuh di Kota Bandung dibagi luas wilayah area Kota Bandung atau sebesar $(269,489 \text{ Ha} : 16.729,65 \text{ Ha}) \times 100\% = 1,61\%$.

Indikator persentase luasan kawasan kumuh dihitung berdasarkan kawasan permukiman yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung dimana pada tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung seluas 491,95 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.54

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020 (per Kecamatan)

NO	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN	LUAS KUMUH	
				[Ha]	[M ²]
1	ANDIR	1	KEBON JERUK	2,8100	28,100
2	ANTAPANI	2	ANTAPANI KIDUL	6,4910	64,910
		3	ANTAPANI TENGAH	1,8400	18,400
3	ASTANA ANYAR	4	CIBADAK	5,3701	53,701
		5	NYENGSERET	9,5300	95,300
		6	PELINDUNG HEWAN	2,7100	27,100
4	BABAKAN CIPARAY	7	BABAKAN	17,4100	174,100
		8	BABAKAN CIPARAY	16,6200	166,200
		9	CIRANGRANG	7,0810	70,810
		10	SUKAHAJI	30,8500	308,500
5	BANDUNG KIDUL	11	KUJANG SARI	5,4000	54,000
		12	WATES	4,7670	47,670
6	BANDUNG KULON	13	CARINGIN	4,3930	43,930
		14	CIGONDEWAH KALER	4,6700	46,700
		15	CIGONDEWAH RAHAYU	9,1200	91,200
		16	CIJERAH	18,0280	180,280
		17	WARUNG MUNCANG	4,8600	48,600
7	BANDUNG WETAN	18	CITARUM	0,3500	3,500
8	BATUNUNGGAL	19	CIBANGKONG	10,2000	102,000
		20	GUMURUH	6,6700	66,700
		21	KACAPIRING	1,2400	12,400
		22	MALEER	1,3400	13,400
		23	SAMOJA	0,7500	7,500

9	BOJONGLOA KALER	24	BABAKAN ASIH	10,1927	101,927
		25	BABAKAN TAROGONG	4,9800	49,800
		26	JAMIKA	10,4100	104,100
		27	KOPO	13,7821	137,821
		28	SUKAASIH	6,4482	64,482
10	BOJONGLOA KIDUL	29	CIBADUYUT	6,1700	61,700
		30	CIBADUYUT KIDUL	3,7800	37,800
		31	MEKAR WANGI	2,1500	21,500
11	CIBEUNYING KALER	32	CIGADUNG	2,2800	22,800
12	CIBEUNYING KIDUL	33	CIKUTRA	7,2800	72,800
		34	PASIRLAYUNG	4,2800	42,800
13	CICENDO	35	ARJUNA	4,0400	40,400
		36	HUSEIN SASTRANEGARA	3,3545	33,545
		37	PAJAJARAN	19,9100	199,100
		38	PASIR KALIKI	0,7600	7,600
		39	SUKARAJA	37,4300	374,300
14	CIDADAP	40	CIUMBULEUIT	34,1100	341,100
15	CINAMBO	41	BABAKAN PENGHULU	9,8000	98,000
16	COBLONG	42	SADANG SERANG	10,2200	102,200
17	GEDEBAGE	43	CISARANTEN KIDUL	6,2300	62,300
		44	RANCABOLANG	2,2500	22,500
18	KIARACONDONG	45	KEBON JAYANTI	10,2636	102,636
		46	KEBON KANGKUNG	7,3310	73,310
19	LENGKONG	47	BURANGRANG	5,8600	58,600
		48	CIJAGRA	2,7300	27,300
		49	CIKAWAO	1,5100	15,100
		50	MALABAR	1,9453	19,453
		51	TURANGGA	8,0000	80,000
20	MANDALAJATI	52	SINDANG JAYA	1,9300	19,300
21	PANYILEUKAN	53	CIPADUNG KULON	8,8100	88,100
		54	CIPADUNG WETAN	8,0400	80,400
22	REGOL	55	CIATEUL	3,6947	36,947
		56	CISEUREUH	8,1544	81,544
		57	PASIRLUYU	6,8226	68,226
23	SUKAJADI	58	SUKABUNGAH	10,3600	103,600
24	SUMUR BANDUNG	59	KEBON PISANG	0,3100	3,100
		60	MERDEKA	3,4300	34,300
25	UJUNG BERUNG	61	PASANGGRAHAN	9,4300	94,300
		62	PASIR ENDAH	9,2100	92,100
		63	PASIRWANGI	11,7567	117,567
Total				491,9459	4.919,459

Hasil perhitungan pengurangan luasan kumuh berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Bandung Nomor TU.06/374A/Bid.Kp/DPKP/2024, tercapai sisa luasan kumuh seluas 269,489 Ha atau berkurang sebesar 45,848 Ha, sebagaimana tabel berikut ini

:

Tabel 2.55

Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2024 Kota Bandung

No	Kecamatan	Kelurahan	Sisa Luasan Kumuh 2023 (Ha)	Pengurangan Kumuh (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2024 (Ha)
1	Andir	Kebon Jeruk	0,920	0,000	0,920
2	Antapani	Antapani Kidul	3,341	1,078	2,263
3	Antapani	Antapani Tengah	0,450	0,450	0,000
4	Astana Anyar	Cibadak	2,701	0,560	2,141
5	Astana Anyar	Nyengseret	3,380	3,380	0,000
6	Astana Anyar	Pelindung Hewan	1,470	0,000	1,470
7	Babakan Ciparay	Babakan	14,680	0,000	14,680
8	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	15,820	0,740	15,080
9	Babakan Ciparay	Cirangrang	4,271	0,000	4,271
10	Babakan Ciparay	Sukahaji	26,050	0,000	26,050
11	Bandung Kidul	Kujangsari	2,800	0,500	2,300
12	Bandung Kidul	Wates	0,970	0,000	0,970
13	Bandung Kulon	Caringin	4,393	0,000	4,393
14	Bandung Kulon	Cigondewah Kaler	4,670	1,970	2,700
15	Bandung Kulon	Cigondewah Rahayu	5,690	0,000	5,690
16	Bandung Kulon	Cijerah	17,528	2,280	15,248
17	Bandung Kulon	Warung Muncang	4,860	0,000	4,860
18	Batununggal	Cibangkong	5,930	1,750	4,180
19	Batununggal	Gumuruh	4,670	0,000	4,670
20	Batununggal	Samoja	0,750	0,000	0,750
21	Bojongloa Kidul	Cibaduyut	6,170	1,510	4,660
22	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul	3,610	0,710	2,900
23	Bojongloa Kidul	Mekarwangi	2,150	0,000	2,150
24	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	9,933	0,000	9,933
25	Bojongloa Kaler	Babakan Tarogong	4,980	0,890	4,090
26	Bojongloa Kaler	Jamika	10,290	1,360	8,930
27	Bojongloa Kaler	Kopo	9,313	0,350	8,963
28	Bojongloa Kaler	Sukaasih	2,901	0,338	2,563
29	Cibeunying Kidul	Cikutra	3,040	1,600	1,440
30	Cibeunying Kidul	Pasirlayung	1,200	0,700	0,500
31	Cidadap	Ciumbuleuit	21,110	2,990	18,120
32	Cicendo	Arjuna	0,000	0,000	0,000
33	Cicendo	Husein Sastranegara	0,868	0,399	0,469
34	Cicendo	Pajajaran	9,390	1,340	8,050
35	Cicendo	Pasirkaliki	0,230	0,000	0,230
36	Cicendo	Sukaraja	20,410	0,000	20,410
37	Cinambo	Babakan Penghulu	5,900	2,000	3,900
38	Coblong	Sadang Serang	5,060	0,000	5,060
39	Gedebage	Cisaranten Kidul	4,610	0,480	4,130

40	Gedebage	Rancabolang	2,250	0,820	1,430
41	Kiaracondong	Kebon Jayanti	6,984	0,100	6,884
42	Kiaracondong	Kebon Kangkung	1,650	0,400	1,250
43	Lengkong	Burangrang	4,390	1,600	2,790
44	Lengkong	Cijagra	2,030	0,000	2,030
45	Lengkong	Cikawao	0,800	0,610	0,190
46	Lengkong	Malabar	1,030	0,000	1,030
47	Lengkong	Turangga	4,000	0,000	4,000
48	Panyileukan	Cipadung Kulon	7,750	0,400	7,350
49	Panyileukan	Cipadung Wetan	7,640	5,790	1,850
50	Regol	Ciateul	1,895	0,000	1,895
51	Regol	Cisureuh	3,222	0,000	3,222
52	Regol	Pasirluyu	5,257	0,707	4,550
53	Sukajadi	Sukabungah	3,340	0,000	3,340
54	Sumur Bandung	Kebon Pisang	0,310	0,000	0,310
55	Sumur Bandung	Merdeka	0,000	0,000	0,000
56	Ujungberung	Pasanggrahan	5,850	3,896	1,954
57	Ujungberung	Pasir Endah	5,480	0,000	5,480
58	Ujungberung	Pasirwangi	4,950	4,150	0,800
Jumlah			315,337	45,848	269,489

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2024

Implementasi kebijakan strategis untuk sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh dan memenuhi target indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh pada tahun 2024 dilaksanakan dengan kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk mengintervensi luasan Kawasan Kumuh yang sehat dan nyaman sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria bangunan Gedung dengan indikator persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung dilakukan melalui Program Kawasan Permukiman yang menangani perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 2.036 unit, untuk penanganan rutilahu di kawasan kumuh sebanyak 278 unit pada 44 Kelurahan.
2. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria penyediaan air minum berupa peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses air minum dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman yang menyediakan prasarana dan sarana air minum. Pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 2.060 SR (Sambungan Rumah) pada 103 lokasi diantaranya 240 SR untuk akses air minum di Kawasan kumuh di 12 lokasi pada 12 Kelurahan.
3. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan air limbah pada tahun 2024 berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dan Pekerjaan Pembangunan Septic Tank Individual pada Program Kawasan Permukiman yang terlaksana sebanyak 121 unit (296 SR) pada 58 lokasi, dimana sebanyak 141 SR pada 27 lokasi di 8 Kelurahan berada pada kawasan kumuh.
4. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria jalan lingkungan yaitu melakukan perbaikan jalan lingkungan di Kawasan permukiman dimana pada tahun 2024 terlaksana di 150 lokasi dengan capaian 75.114 M2 dimana



21 lokasi di 16 Kelurahan diantaranya berada pada kawasan kumuh dengan capaian seluas 11.687 M². Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria drainase lingkungan terlaksana sebanyak 116 lokasi dengan capaian 13.470 M dan 18 lokasi dan 19 lokasi diantaranya pada kawasan kumuh, seluas 1.973 M di 17 Kelurahan.

5. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria drainase lingkungan terlaksana sebanyak 116 lokasi dengan capaian 13.470 M dan 18 lokasi dan 19 lokasi diantaranya pada kawasan kumuh, seluas 1.973 M di 17 Kelurahan.
6. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria pengelolaan persampahan Pengelolaan Sampah di kawasan kumuh dilaksanakan pada 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Gumuruh, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Babakan Tarogong, Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cicendo dan Kelurahan Kujangsari berupa penataan TPS menjadi TPS 3R/TPST.
7. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran tahun 2023 dilakukan penghitungan terhadap ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran yang dihitung di 42 titik Springkler warga pada 11 kelurahan yang telah tersedia Sumber air. Selain itu, jumlah kendaraan unit, mobil tangga, dan jangkauan response time ke Kawasan kumuh dengan radius 2,5 KM yang dilakukan oleh wilayah manajemen kebakaran Diskar PB melalui 4 (empat) UPT yaitu UPT Timur, Barat, Selatan, dan Utara.
8. Meningkatkan kualitas hunian permukiman kriteria ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran tahun 2023 tercakup pada ketersediaan prasarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran dan atau data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan telah tersedia 2.548 orang relawan diantaranya yang telah terlatih sebanyak 525 orang yang tersebar di 151 Kelurahan sedangkan yang terdapat di wilayah kumuh pada 58 Kelurahan sebanyak 870 orang terlatih dan belum terlatih.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Kualitas Permukiman terkait mengurangi luasan kumuh pada tahun 2024 adalah terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota di wilayah penerima manfaat. Selain itu, padatnya permukiman menyulitkan pembangunan sarana pengolahan air limbah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/masalah adalah penggunaan kode rekening belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang merupakan kode rekening barang/jasa sehingga tidak mengharuskan status lahan milik Pemerintah Kota Bandung

4. Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hunian Layak di Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Persentase Kepala Keluarga MBR Menempati Hunian Layak

Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 86,59% dari target sebesar 85,21% atau capaian kinerja sebesar 101,62%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 84,57% maka capaian ini meningkat 2,02 % dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 89,39% maka capaian kinerjanya sebesar 96,87%. Jumlah kepala keluarga MBR yang menempati hunian yang layak dihitung dari jumlah total rumah layak huni sampai tahun 2023 ditambah realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024.

Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.036 unit yang terdiri dari 1.888 unit dari APBD Kota Bandung, 100 unit dari APBD Provinsi Jabar dan 48 unit bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan asumsi 1 (satu) kepala keluarga MBR menempati 1 (satu) unit hunian yang layak, maka jumlah kepala keluarga MBR menempati hunian yang layak di luar kawasan kumuh pada tahun 2024 sama dengan jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Dengan data eksisting jumlah rumah layak huni pada akhir tahun 2023 sebanyak 85.298 unit, diperoleh total jumlah rumah layak huni sebanyak 87.334 unit. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah kepala keluarga MBR di Kota Bandung adalah sebanyak 100.861 kepala keluarga sehingga persentase kepala keluarga MBR menempati hunian yang layak dapat dihitung sebesar 86,59%. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah adanya rumah tidak layak huni yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan yang sah seperti bukti kepemilikan lahan/sertifikat hak milik.

5. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 91,68% dari target sebesar 91,36% atau capaian kinerja sebesar 100,35%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 91,30% maka capaian ini meningkat 0,38 % dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 91,94% maka capaian kinerjanya sebesar 99,71%.

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 91,68% dengan realisasi penambahan sebanyak 6.657 Sambungan Baru. Yaitu terdiri dari Sambungan Baru Perpipaan sebanyak 4.597 Sambungan Perpipaan atau 69,05% dengan akumulasi sambungan langganan (SL) hingga tahun 2024 sebanyak 169.373 SL. Sedangkan untuk Non

Perpipaan sebanyak 2.060 Sambungan Rumah atau 30,95%. Data sambungan perpipaan sesuai dari data Mutasi Pelanggan Perumda Tirtawening sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.56
Data Sambungan Langganan Tahun 2024

Tahun	Pasangan Baru	Pemutusan	Total Jumlah SL	Keterangan
2019	6.279	4.173	177.014	Pemutusan sambungan karena pelanggan menunggak lebih dari satu tahun.
2020	1.618	1.689	176.943	
2021	1.492	3.373	175.062	
2022	1.923	3.354	173.955	
2023	3.317	6.179	169.373	
2024	4.597			
TOTAL	19.326	18.768		

Sumber: Perumda Tirtawening, 2024

Jumlah Sambungan Langganan (SL) secara keseluruhan merupakan penambahan SL dari pasangan baru dan pembukaan kembali dari pelanggan yang menunggak (PK SPT) . Data sambungan non perpipaan di Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.57
Data Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Tahun 2019-2024

No	Sumber Pendanaan	Unit	Sambungan Rumah (SR)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APBD	116*	430	-	800	1140	2320	2060
2	KOTAKU	-	4090	-	-	-	-	-
3	APBN SPAM Padat Karya	-	-	190	450	-	-	-
Jumlah			4520	190	1250	1140	2.320	2060

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2024

**Capaian pada tahun 2024*

Implementasi kebijakan strategis pelayanan air bersih pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses air minum melalui layanan non perpipaan yang dilaksanakan oleh DPKP melalui Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 2.060 sambungan rumah dari APBD.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan dengan menambah supply air bersih serta pembangunan jaringan distribusi melalui kerja sama B to B, baik dengan skema jual beli air curah maupun skema terintegrasi (Hulu-Hilir) yang telah diimplementasikan melalui erjasama Perumda Tirtawening dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dengan kapasitas 3.500/l/dt.



Menurunkan tingkat kehilangan air dari 40% menjadi 38,52% melalui skema kerja sama B to B dengan berbasis kontrak kinerja yang telah diimplementasikan melalui Kerjasama Perumda Tirtawening dengan PT Adaro.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah keterbatasan sumber air baku pada pelayanan air minum perpipaan juga keterbatasan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur air minum sedangkan untuk pelayanan air minum non perpipaan adalah terkendala status lahan lokasi yang akan dibangun. Selain itu akses air minum masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan.

Upaya-upaya meningkatkan cakupan layanan air minum yang dilaksanakan Tahun 2024 antara lain:

- a. Untuk menata kawasan mata air dan mengembangkan ruang publik yang telah dilaksanakan pada mata air Cikendi, Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap.
- b. Pengujian kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 64 titik secara rutin untuk dicek kualitas air berkolaborasi Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Perumda Tirta Wening Kota Bandung sebagai laboratorium pengujinya.
- c. Pembangunan SPAM Gedebage dengan kapasitas 700 L/det yang mana saat ini IPA, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sudah selesai dibangun, dan pembangunan Jaringan Distribusi Langsung (JDL) serta DMA (District Meter Area) berikut sambungan rumah akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan target 30.000 SL.
- d. Tindak lanjut kerjasama Perumda Tirtawening dan Perumda Jasa Tirta II terkait penyediaan air curah sebanyak 3500 L/detik dan pembangunan jaringan distribusi di 16 kecamatan dimana sampai tahun 2023 dokumen studi kelayakan, evaluasi studi kelayakan dari BPKP dan review studi kelayakan dari Ahli UNPAD sudah selesai dilaksanakan, untuk kemudian dilakukan tahap penunjukan Pemrakarsa serta dilanjutkan dengan tahap pemilihan badan usaha pelaksana.
- e. Tindak lanjut kerja sama B to B berbasis kinerja dengan PT Adaro Tirtawening telah sampai pada tahap pelaksanaan sesuai ruang lingkup yaitu pekerjaan infrastruktur serta pekerjaan pemeliharaan dan perawatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.58
Rekapitulasi Pekerjaan Kerja Sama B to B PT Adaro

No	Ruang Lingkup	Capaian Tahun 2023
Pekerjaan Infrastruktur		
1	Pembentukan Zona Pelayanan	7 Zona
2	Pembentukan DMA	29 DMA
3	Pengadaan Peralatan Pendeteksi Kebocoran	5 Unit
4	Rehabilitasi Jaringan Perpipaan	Pemasangan Pipa HDPE 1.869 m, Pemasangan air valve 14 unit dan blow off 4 unit
5	Pemasangan Smart Water Meter	Pemenuhan Hak Cipta dan perijinan
6	Penggantian water meter pelanggan	2.554 Unit
Pekerjaan Operasional dan Perawatan		
1	Perbaikan kebocoran pipa	992 Titik
2	Aplikasi AWS	Aplikasi berfungsi sebagian
3	Penggantian sambungan ACP	36 Titik

- f. Kerja sama jual beli air curah antara Perumda Tirtawening dengan PT Tirta Gemah Ripah (SPAM Regional) baru dapat dimanfaatkan sebesar 35 L/det dari target 45 L/det pada Tahun 2023. Adapun kendala pencapaian target disamping akibat dari pipa transmisi TGR yang masih terkendala teknis dalam meningkatkan kapasitas pendistribusiannya adalah kesulitan dalam pemasaran disebabkan penggunaan air bawah tanah/sumur bor baik yang dikelola oleh kompleks perumahan, peyediaan melalui program KOTAKU serta perorangan.
- g. Untuk kerja sama dengan PT.BII terkait pengembangan IPA Pakar sedang dalam proses persetujuan KPM (Kuasa Pemilik Modal).
- h. Telah dilaksanakan perubahan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.

6. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Limbah, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Cakupan Pelayanan Air Limbah

Pelayanan air limbah di Kota Bandung terbagi menjadi dua yaitu dengan sistem terpusat dengan pengaliran air limbah skala kawasan (SPALD-T) yaitu IPAL Bojongsoang dan pengolahan air limbah dengan sistem komunal/individual (SPALD-S). Sistem terpusat (SPALD-T) adalah sistem dengan pengaliran air limbah dari rumah melalui jaringan perpipaan dan atau air limbah yang melalui penyedotan layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) yang dimasukkan ke dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah skala Kawasan (SPALD-T) yaitu IPAL Bojongsoang. Sistem setempat (SPALD-S) adalah sistem pengolahan air limbah yang lokasinya tidak terlayani oleh jaringan pipa Perumda Tirtawening.

Sampai dengan tahun 2024 cakupan layanan air limbah di Kota Bandung sebesar 82,55% dari target sebesar 80,39% atau capaian kinerja sebesar 102,69%, bila



dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 80,38% maka capaian ini meningkat 2,17% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 82,59% maka capaian kinerjanya sebesar 99,95%.

Pada tahun 2024, cakupan layanan air limbah meliputi :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan septic tank individual sebanyak 121 unit.
2. Perumda Tirtawening mendapat bantuan dari Kementerian PUPR untuk Program Hibah Air Limbah (PIU) dari Kementerian PUPR sebanyak 577 SL senilai 4,616 Milyar.

Implementasi kebijakan strategis pelayanan air limbah pada tahun 2024 sebagai berikut :

Meningkatkan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh DPKP melalui Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 91 SR dari APBD Kota Bandung dan 205 SR dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran cakupan layanan air limbah adalah :

Padatnya permukiman sehingga menyulitkan pembangunan sarana pengolahan air limbah

Upaya-upaya meningkatkan cakupan layanan air limbah yang dilaksanakan Tahun 2024 antara lain :

Telah dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Septic Tank Individual

7. Sasaran Meningkatnya Kuantitas RTH Publik, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Persentase Luasan RTH Publik

Pada tahun 2024 Tercapai Persentase Luasan RTH Publik sebesar 6,83% dari target 6,78% atau capaian kinerja sebesar 100,74%, bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 6,87% maka capaian kinerjanya sebesar 99,42%. Indikator Persentase Luasan RTH Publik dihitung dengan menjumlahkan luas RTH Publik kondisi awal dengan penambahan lahan RTH Publik tahun berikutnya. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandung sampai tahun 2024 adalah sebesar 1.143,34 Ha atau 6,83% dari total luas wilayah keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha.

Penambahan lahan RTH Publik tahun 2024 diperoleh dari serah terima PSU seluas 111.817,15 M² (11,18 Ha); pembangunan taman RW seluas 945 M² (0,094 Ha); pengadaan lahan untuk taman bermain dan RTH seluas 5.638 M² (0,56 Ha) serta pengadaan lahan untuk makam oleh Diciptabintang seluas 4.549 M² (0,45 Ha). Sehingga luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bandung adalah seluas 1.143,34 Ha atau sebesar 6,83% dari total luas wilayah keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha.

Peningkatan kuantitas RTH Privat dengan meningkatkan kepatuhan penyediaan RTH Privat dan verifikasi validasi RTH Privat dengan pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Ujung Berung melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 670.897,32 m² (67,09 Ha). Untuk memperoleh baseline data RTH privat di Kota Bandung, Dinas Cipta Bintang telah melakukan pengambilan data RTH dengan metode pengukuran digitasi pada foto udara (citra satelit). Pada tahun 2021, terdata RTH privat di SWK Cibeunying seluas 8,810,173 m² (881,02 Ha). Pada tahun 2022, terdata RTH privat di SWK Arcamanik seluas 597.092,26 m² (59,71 Ha). Terakhir pada tahun 2023, terdata RTH privat di SWK Ujung Berung seluas 670.897,32 m² (67,09 Ha). Adapun total luas RTH privat dari ketiga SWK tersebut berdasarkan hasil pengukuran digitasi foto udara sebesar 10.078.162,58 (1007,82 Ha). Proporsi luas RTH privat pada Tahun 2023 terhadap luas wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha) adalah 6,03%. Sedangkan pada tahun 2024 ada penambahan hasil pengukuran digitasi foto udara pada dua SWK yaitu : SWK Bojonegara dan SWK Tegalega seluas 4768,11 Hektar. Dengan demikian persentase luas RTH Privat terdata berdasarkan hasil pengukuran digitasi tersebut sebesar 69,76% dari luas wilayah Kota Bandung.

Berikut adalah tabel dan grafik yang merupakan rincian data luas RTH di Kota Bandung sebagaimana yang diuraikan diatas:



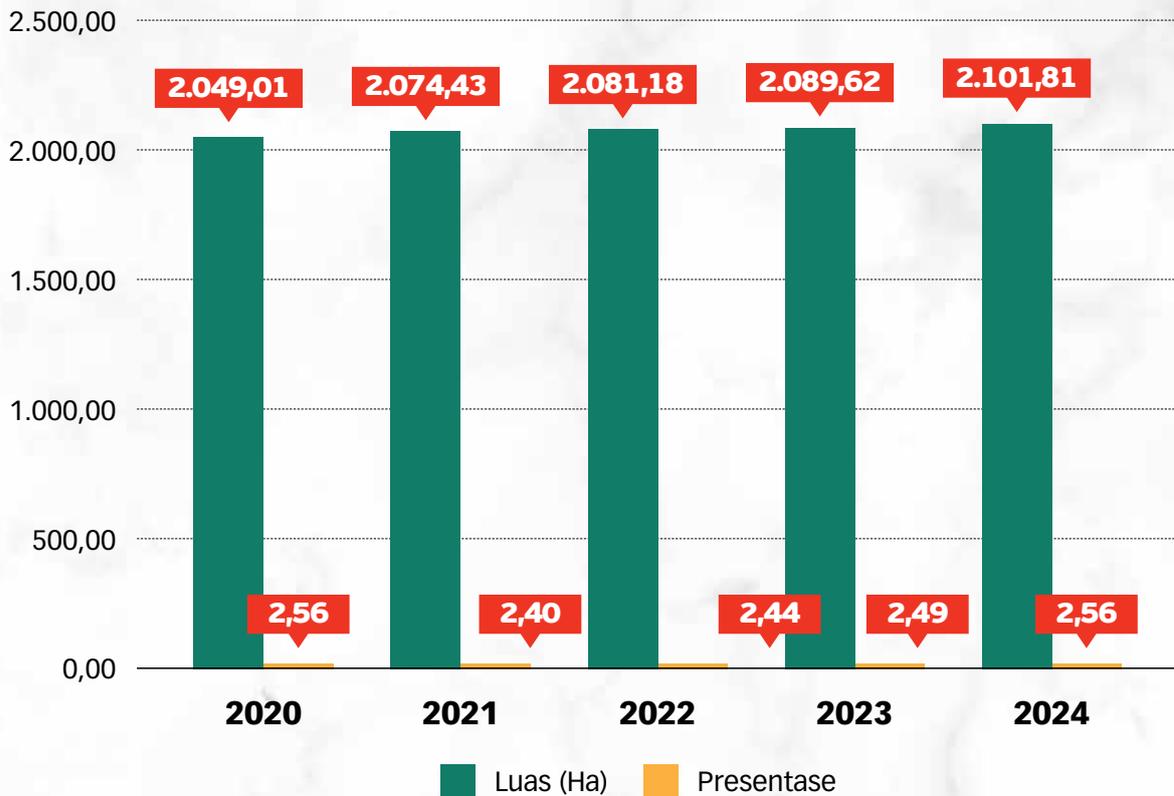
Tabel 2.59
Rekapitulasi RTH di Kota Bandung Sampai dengan Tahun 2024

No	RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
1	Taman Kota/Taman Lingkungan	255,13	1,52%	Penambahan tahun 2020 dari pembangunan Taman RW seluas 0,0366 Ha.
				Penambahan tahun 2020 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,45 Ha.
				Penambahan tahun 2021 dari pembangunan Taman RW seluas 2.430,28 M2 (0,24 Ha).
				Penambahan tahun 2021 lahan RTH dari serah terima PSU untuk RTH seluas 5,5 Ha.
				Penambahan tahun 2022 dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha).
				Penambahan tahun 2022 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 63.152,37 M2 (6,31 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari pembangunan Taman RW seluas 3.811 M2 (0,38 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 45.438,87 M2 (4,54 Ha).
				Penambahan tahun 2023 dari Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati seluas 46.570 M2 (4,66 Ha).
				Penambahan tahun 2024 dari pembangunan Taman RW seluas 945 M2 (0,094 Ha).
				Penambahan tahun 2024 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 111.817,15 M2 (11,18 Ha).
2	Kebun Bibit	1,69	0,01%	
3	RTH Pemakaman	153,51	0,92%	Pada Tahun 2019 ada penambahan lahan makam sebesar 5.664 M2 (0,57 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2020 ada penambahan lahan makam sebesar 2.811 M2 (0,29 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2021 ada penambahan lahan makam sebesar 7.275 M2 (0,73 Ha) dari serah terima PSU.
				Pada Tahun 2023 ada pemutakhiran data lahan makam seluas 1.535.141 M2 (153,51 Ha) pada 13 TPU sehingga ada penambahan dari pengadaan lahan makam sebesar 4.440 m2 (0,44 Ha).
4	Tegangan Tinggi	10,17	0,06%	
5	Sempadan Sungai	23,26	0,14%	
6	Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%	
7	Sempadan KA	6,42	0,04%	
8	Hutan Konservasi	4,12	0,02%	Tahura Djuanda
9	Penanganan Lahan kritis	416,92	2,49%	

10	Aset Potensi RTH Pemkot Bandung	95,21	0,57%	Inventarisasi data RTH Bidang Aset BPKA Tahun 2019=100,11 Ha
				Pengurang=penambahan taman RW tahun 2020 dan 2021 serta PSU lahan makam= $0,0366+0,24+1,59=1,86$ Ha sehingga aset RTH Pemkot Bandung berkurang menjadi $100,11-1,86=98,25$
				Pada Tahun 2022 ada penambahan lahan makam seluas 4.440 M2 (0,44 Ha) dari pengadaan lahan serta penambahan dari pengadaan lahan untuk taman bermain seluas 4.197 M2 (0,42 Ha).
				Pengurangan tahun 2022 seluas 1.462,15 M2 (0,15 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW.
				Penambahan tahun 2023 dari pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain seluas 8.116 M2 (0,81 Ha).
				Pengurangan tahun 2023 seluas 3.811 M2 (0,38 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW.
				Pengurangan tahun 2023 seluas 4.440 M2 (0,44 Ha) berasal dari Pengadaan lahan untuk makam berdasarkan hasil pemutakhiran data lahan pemakaman di 13 TPU.
				Pengurangan tahun 2023 seluas 46.570 M2 (4,66 Ha) dari Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati.
				Penambahan tahun 2024 dari pengadaan lahan untuk pemakaman seluas 4.549 M2 (0,45 Ha).
				Penambahan tahun 2024 dari pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain seluas 5.638 M2 (0,56 Ha).
				Pengurangan tahun 2024 seluas 945 M2 (0,094 Ha) berasal dari pembangunan Taman RW.
Jumlah RTH Publik		1.143,34	6,83%	
11	RTH Privat	958,47	5,73%	
Jumlah RTH Privat		958,47	5,73%	
Jumlah I + II ..		2.101,81	12,56%	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Bintang Kota Bandung, Tahun 2024

Grafik 2.17
Perkembangan Luas RTH Kota Bandung 2018-2024



Sumber: DPKP Kota Bandung dan Dinas Cipta Bintang, diolah 2024

Implementasi kebijakan strategis untuk memenuhi target Persentase Luasan RTH Publik pada tahun 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas RTH publik dengan menambah ketersediaan lahan melalui serah terima PSU Perumahan yang berpotensi RTH, pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain serta pembangunan taman RW yang menjadi RTH Publik menghasilkan penambahan luasan RTH publik seluas 117.455,14 M2 atau sekitar 11,74 Ha.
- b. Persentase Luasan RTH Privat tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Ujung Berung melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 670.897,32 m² (67,09 Ha).

Permasalahan/kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator persentase luasan RTH Publik, yaitu meliputi:

- a. Keterbatasan lahan untuk RTH publik yang tersedia di Kota Bandung dan masih banyak Pengembang Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Kota Bandung.
- b. Kesulitan dalam pendataan RTH privat :
 1. Peta dasar yang digunakan masih merupakan peta citra tahun 2016 dan belum terupdate;
 2. Kesulitan memperoleh akses ke beberapa lokasi pendataan, misalnya perumahan elite.
 3. Kesulitan mendapatkan informasi tentang IMB/PBG saat survey.



4. Kesulitan mendapatkan data sekunder terkait dengan lahan.
5. Responden yang ditemui dilapangan terkadang bukan pemilik bangunan dan tidak memiliki info lengkap tentang bangunan.

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran indikator persentase luasan RTH Publik, yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Menetapkan kebijakan tentang Penyerahan PSU Perumahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting agar dapat memberikan kontribusi luasan RTH Publik berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 berupa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan, serta pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran untuk Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan.
- b. Sejak tahun 2019, DPKP telah melakukan pendataan Perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung dan saat ini masih dilakukan pemanggilan kepada para Pengembang yang membangun Perumahan di Kota Bandung agar segera menyerahkan lahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2024 telah terlaksana penyerahan PSU berupa RTH Publik dari 37 Perumahan dengan total luas 11,18 Ha;
- c. Pengadaan lahan dan penambahan RTH Publik dari perumahan yang diserahkan oleh pengembang minimal 0,20 Ha setiap tahun;
- d. Melakukan Inventarisasi pengembalian fungsi RTH Publik yang telah beralih fungsi;
- e. Melakukan Inventarisasi lahan luas sempadan sungai, sempadan SUTET, sempadan rel kereta api yang berpotensi sebagai bagian dari RTH Publik;
- f. Mencari data sekunder dari instansi terkait seperti data IMB/PBG dan PBB

- agar kegiatan pendataan RTH Privat dapat berjalan dengan baik dan akurat;
- g. Berkoordinasi dengan petugas kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan untuk memudahkan proses pendataan RTH Privat
- h. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Kewilayahan mengenai adanya kegiatan pendataan RTH privat.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas RTH Publik Terpelihara, Indikator Sasaran Strategis Urusan: Persentase Luasan RTH Publik Terpelihara (Taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara)

Pada tahun 2024 tercapai Persentase Luasan RTH Publik terpelihara yang sebesar 26,38% dari target sebesar 26,38% atau capaian kinerja sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 26,88% maka capaian kinerjanya sebesar 98,14%. Indikator Persentase Luasan RTH Publik terpelihara dihitung dengan menjumlahkan luas RTH Publik terpelihara kondisi awal dengan penambahan lahan RTH Publik tahun berikutnya. Pada tahun 2024 telah terlaksana pemeliharaan RTH publik (taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota) sebanyak 511 lokasi dengan luas sekitar 672.920 M² (67,29 Ha) dari luas RTH Publik (taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota) di Kota Bandung seluas 2.551.323,28 M² (255,13 Ha).

Permasalahan/kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator persentase luasan RTH Publik terpelihara adalah masih terdapat aksi vandalisme pada taman- taman di Kota Bandung.

- a. Meningkatkan Kualitas RTH Publik dengan meningkatkan penataan pemakaman dan meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui :



- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;
- (2) Melakukan kegiatan rumputisasi terhadap areal pemakaman yang masih memungkinkan dilaksanakan rumputisasi;
- (3) Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyiangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Pengembangan Permukiman dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 35,00% dari target 35,00%;
- (4) Meningkatkan pemeliharaan taman, median, jalur hijau jalan dan Hutan Kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Indikator Subjektif

1. Persepsi Kondisi Jalan
2. Persepsi Kecukupan Layanan Air Bersih
3. Persepsi Pengelolaan Air Limbah
4. 3 Persepsi Kelayakan Trotoar
5. Persepsi Kelancaran Aliran pada Drainase
6. Persepsi Kecukupan Layanan Listrik
7. Persepsi Kestabilan Layanan Listrik
8. Persepsi Jumlah RTH
9. Persepsi Kelayakan RTH
10. Persepsi Kepuasan dan Keterjangkauan Ruang Terbuka Publik

Pemerintah Kota Bandung dalam hal mencapai Indikator Kinerja Indek Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur terdapat factor pendukung , penghambat serta rekomendasi atau Solusi sebagai berikut :

5. Aspek Tata Ruang

Penghambat : -

Pendukung : Persepsi terhadap aspek tata ruang di Kota Bandung sudah baik terutama tentang kerapian penataan ruang bangunan/Kawasan di Kota Bandung.

Rekomendasi : -

6. Aspek Lingkungan

Penghambat : -

Pendukung : Persepsi terhadap kualitas lingkungan, terutama kualitas udara dan air, dan kebersihan lingkungan, serta layanan persampahan di Kota Bandung sudah baik.

Rekomendasi : Permasalahan pengelolaan sampah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah. Hal tersebut mengancam kualitas lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Perencanaan kota harus mencakup manajemen limbah yang berkelanjutan, dengan peningkatan dalam pengolahan dan daur ulang. sampah.



7. Aspek Transportasi

Penghambat : Persepsi terhadap kemacetan Kota Bandung buruk.

Pendukung : Persepsi terhadap kelayakan dan keterjangkauan transportasi public sudah baik.

Rekomendasi : Perlunya penyelesaian masalah lalu lintas di Kota Bandung, terutama saat akhir pekan (weekend) dan jam sibuk (peak-hour). Untuk mengatasi permasalahan kemacetan diperlukan perencanaan yang lebih baik terkait infrastruktur sistem jaringan transportasi, layanan transportasi umum, dan meningkatkan daya tarik angkutan umum.

8. Aspek Infrastruktur-Utilitas

Penghambat : Persepsi terhadap ruang terbuka hijau di Kota Bandung dan keamanan berjalan kaki di malam hari tidak baik.

Pendukung : Persepsi yang baik dalam menilai kelayakhunian Kota Bandung, terutama dari aspek infrastruktur dan utilitas. Mayoritas responden setuju dan puas dengan kondisi jalan, layanan air bersih, kelayakan trotoar, kelancaran aliran drainase, layanan Listrik.

Rekomendasi : Perlunya Ketersediaan dan keterjangkauan ruang terbuka hijau. Selain untuk kualitas hidup masyarakat, ruang terbuka hijau juga berperan penting dalam upaya mitigasi bencana banjir yang sering terjadi di Kota Bandung saat musim hujan. Selain itu perlunya peningkatan keamanan di malam hari.

SASARAN Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi

Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi. Sasaran-sasarannya berupa **Indeks Liveable City Aspek Ekonomi.** Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama RPD Kota Bandung 2024-2026, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2026
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Liveable City Aspek Ekonomi	7,15	6,73	94,13	7,34
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		94,13			

Sasaran **Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi** dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator **“Indeks Liveable City Aspek Ekonomi”** yaitu dari target tahun 2024 yaitu 7,15 realisasi 6,73 atau tidak tercapai dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 94,13%.

Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPD tahun 2026 sebesar 7,34 maka capaian kerjanya 91,69%.

Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi diukur melalui Indeks Liveable City Aspek Ekonomi. Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi dengan indikator Indeks Liveable City Aspek Ekonomi Kota Bandung Tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,15 poin pada RPD. Berdasarkan hasil perhitungan indeks Liveable City Tahun 2024 terhadap aspek Ekonomi adalah sebesar 6,73 poin, belum memenuhi target sebesar 0,42 poin dengan demikian capaian kinerja dibanding dengan target 2024 sebesar 94,13% bila dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaian kerjanya sebesar 91,69% atau baik.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi untuk memenuhi target pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 40 program pada urusan kebudayaan, kepariwisataan, perdagangan, perindustrian dan penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, koperasi, UKM serta ketenagakerjaan dengan total anggaran tahun 2024 untuk Sasaran Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek ekonomi sebesar Rp. 188.997.148.480 dengan realisasi sebesar Rp. 178.435.345.283 dengan penyerapan 94,41%.

Tingkat capaian Indeks Liveable City Aspek Ekonomi dihitung melibatkan indikator/ variabel yang merupakan gabungan dari indikator subjektif dan indikator objektif sub sasaran program Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Meningkatnya Daya Saing Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota, Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian, Meningkatnya Penanaman Modal, Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Jumlah Pendapatan Pajak Daerah, Meningkatnya Kesehatan Koperasi, Meningkatnya Keberlanjutan Usaha Mikro, Meningkatnya Pencari Kerja yang Bekerja dan data subjektif diperoleh dari hasil survey primer berupa kuesioner kepada masyarakat dan sedangkan data objektif merupakan hasil perhitungan ketercapaian

indikator yang didapatkan dari berbagai Perangkat Daerah.

Tabel 2.61
Hasil Perhitungan Nilai LCI Aspek Ekonomi Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Aspek Ekonomi										Nilai Objektif	Nilai Subjektif	Skor LCI Ekonomi
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya daya saing ekosistem ekonomi	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan	Meningkatnya Penanaman Modal	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Peternakan	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatnya Kesehatan Koperasi	Meningkatnya Skala Usaha	Meningkatnya Keberlanjutan Usaha Mikro	Meningkatnya Pencari Kerja yang Berkerja			
1	Andir	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.53	7.19
2	Antapani	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.41	6.63
3	Arcamanik	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.60	6.72
4	Astanaanyar	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.60	6.72
5	Babakan Ciparay	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.10	6.47
6	Bandung Kidul	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.78	6.81
7	Bandung Kulon	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	5.88	6.36
8	Bandung Wetan	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.00	6.42
9	Batununggal	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.93	6.88
10	Bojongloa Kaler	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.37	6.60
11	Bojongloa Kidul	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.34	6.59
12	Buahbatu	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.77	6.80
13	Cibeunying Kaler	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.41	7.13
14	Cibeunying Kidul	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.83	6.83
15	Cibiru	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.63	6.74
16	Cicendo	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.41	6.63
17	Cidadap	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.65	6.75
18	Cinambo	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.72	7.28
19	Coblong	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.15	6.49
20	Gedebage	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.53	7.18
21	Kiaracondong	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.27	6.56
22	Lengkong	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.45	6.65
23	Mandalajati	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	5.84	6.34
24	Panyileukan	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.63	7.24
25	Rancasari	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.52	6.68
26	Regol	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.11	6.47
27	Sukajadi	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.57	6.71
28	Sukasari	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	7.44	7.14
29	Sumur Bandung	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	5.50	6.17
30	Ujung Berung	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.81	6.83
	Rerata	0.89	0.00	0.49	0.48	2.01	0.10	0.55	0.33	0.11	1.88	6.84	6.63	6.73

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2024, Kota Bandung memiliki nilai LCI aspek ekonomi sebesar 6.73, dari target sebesar 7,15 poin yang terdiri dari nilai subjektif sebesar 6,84 dan nilai obyektif sebesar 6,63 poin. Jika dibandingkan dengan target aspek ekonomi pada tahun tersebut sebanyak 7,15 poin, maka capaian nilai ini belum memenuhi target. Perolehan nilai LCI aspek ekonomi tertinggi berada pada Kecamatan Cinambo dengan skor 7.28 dan nilai LCI aspek ekonomi terendah berada pada Kecamatan Sumur Bandung dengan skor 6.17.

Hasil perhitungan, aspek ekonomi memiliki nilai objektif yang paling kecil. Nilai objektif didapatkan berdasarkan penjumlahan masing-masing sub sasaran/indicator



untuk aspek ekonomi. Nilai yang kecil dipengaruhi oleh ketersediaan data pada saat hasil perhitungan dan sub indicator yang digunakan pada setiap sub sasaran/indicator. Nilai 0 pada perhitungan menandakan tidak adanya data yang diperoleh dalam perhitungan sub indicator.

Berdasarkan nilai subjektif yang diperoleh melalui kuesioner pada masyarakat Kota Bandung, aspek ekonomi tergolong masih di bawah rata-rata dibandingkan dengan aspek lainnya.

Ketidakpastian ekonomi global saat ini menyebabkan fase pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya optimal. Tingkat Inflasi yang tinggi menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat dunia menurun. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan barang-barang ekspor dari Indonesia secara keseluruhan termasuk dari Kota Bandung khususnya Tekstil dan Produk Tekstil. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksinya bahkan menutup usahanya. Akibatnya banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kehilangan pendapatan akibat PHK berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, ini menjadi salah satu tantangan utama upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun berdasarkan data BPS pengeluaran per kapita mengalami peningkatan, tapi peningkatan konsumsi tersebut ternyata cukup signifikan untuk mendorong atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktanya konsumsi merupakan komponen yang berkontribusi paling besar mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Konsumsi berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang paling dominan. Ketika

kemampuan daya beli masyarakat melemah maka secara otomatis kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi akan menurun. Multiplier efek dampaknya akan terasa pada berbagai sektor, termasuk lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, melemahnya permintaan terhadap produk barang dan jasa akan menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Sementara kerja terus bertambah tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Jika diakumulasikan dengan tenaga kerja yang terkena PHK maka akan menimbulkan angka tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi. Untuk mencegah hal tersebut maka harus ada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar kemampuan daya belinya semakin tinggi. Sehingga permintaan terhadap barang dan jasa bertambah besar, yang pada gilirannya mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Idealnya peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dampaknya tercipta lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Walaupun demikian, tingkat kepuasan di atas rata-rata terlihat di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Gedebage, Panyileukan, Cinambo, dan Andir. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Kota Bandung belum sepenuhnya merasakan terpenuhinya indikator kelayakhunian pada aspek ekonomi. Hal tersebut terlihat dari jawaban terhadap pertanyaan terkait pekerjaan atau penghidupan yang layak di Kota Bandung, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta biaya hidup di kota ini.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator subjektif dan objektif yang meliputi 9 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenteraman, sosial, tata ruang, lingkungan, transportasi, dan ekonomi, didapatkan bahwa Skor Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2024 adalah 7.90 Nilai LCI pada tahun 2024 memiliki nilai yang sudah melampaui target dengan target nilai LCI berdasarkan RPD Kota Bandung tahun 2024-2026, yaitu 7.67. Hasil perhitungan nilai akhir LCI sangat dipengaruhi oleh nilai indikator objektif.





Walaupun nilai kelayakhunian Kota Bandung sudah melampaui target, aspek-aspek penilaian yang digunakan, aspek-aspek kelayakhunian Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai indikator objektif cenderung memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai indikator subjektif. Dalam arti lain, Masyarakat Kota Bandung masih memiliki harapan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelayakhunian Kota Bandung yang lebih baik. Dengan dihitungnya indeks ini, pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan nilai untuk merencanakan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk memperbaiki dan mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang nyaman.

Untuk mendukung capaian Indikator Liveable City Aspek Ekonomi terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

Persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan atau penghidupan yang layak, biaya hidup yang layak, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan masih dibawah 50%. Aspek ekonomi menjadi aspek dengan skor paling rendah dibanding aspek lainnya.

Faktor Pendukung :

Mayoritas dari responden memiliki persepsi yang netral dan cukup baik terhadap aspek ekonomi.

Rekomendasi :

Perencanaan kota harus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung pelatihan keterampilan, dan mendiversifikasi sektor ekonomi.

KESIMPULAN

Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 merupakan capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2024-2026 yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau Good Governance Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.

Pembuatan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

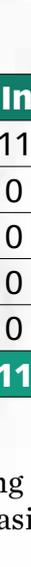
Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai. Selain itu, dilaporkan juga hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dari setiap sasaran kinerja.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung yang telah ditetapkan pada tahun 2024, seluruh Indikator dengan kategori Sangat Baik dengan jumlah 11 atau 100%.

Predikat	Kode Warna	Jumlah Indikator
Sangat Baik		11
Baik		0
Cukup		0
Kurang		0
Sangat Kurang		0
Total		11

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Sasaran. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

1. Indikator dengan kriteria Melebihi Target dengan jumlah 8 atau 73%
2. Indikator dengan kriteria Sesuai Target atau Tercapai dengan jumlah 1 atau 9%
3. Indikator dengan kriteria Tidak Mencapai Target dengan jumlah 2 atau 18%

Rata-Rata % Capaian	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
<100%	Tidak Tercapai	
=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	
N/A	Tidak Diukur	

Tahun Anggaran 2024, untuk pencapaian kinerja 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Sasaran pada RPD Tahun 2024-2026 Kota Bandung termasuk 11 (sebelas) Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Bagian serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar

Rp.8.133.180.000.136,00 dengan capaian realisasi Rp.7.067.211.608.536,00, atau 86,89%.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran, masih terdapat beberapa Indikator Kinerja yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Bandung menyikapi hal tersebut dengan mempersiapkan beberapa langkah sebagai upaya tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya. Beberapa upaya atau Solusi dalam memperbaiki kinerja tahun 2024 dari setiap Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

Berdasarkan capaian kinerja PDRB ADHK yang tidak tercapai di tahun 2024, maka perlu ada perbaikan terhadap pencapaian kinerja di tahun berikutnya, berikut beberapa rekomendasi atau solusi perbaikan :

Rekomendasi:

- **Meningkatkan Diversifikasi Ekonomi:** Fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat, misalnya sektor teknologi dan industri kreatif, untuk meningkatkan kontribusi PDRB.
- **Optimalisasi Infrastruktur:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti perbaikan jalan, transportasi, dan penyediaan energi yang lebih efisien.
- **Peningkatan Investasi:** Upaya menarik lebih banyak investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui kebijakan yang lebih ramah investasi dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi.
- **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):** Fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sektor-sektor produktif dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.





b. Indeks Liveable City Aspek Ekonomi

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Liveable City Aspek Ekonomi yang tidak tercapai di tahun 2024, maka perlu ada perbaikan terhadap pencapaian kinerja di tahun berikutnya, berikut beberapa rekomendasi atau solusi perbaikan :

Perencanaan kota harus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung pelatihan keterampilan, dan mendiversifikasi sektor ekonomi.

Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandung maupun Perangkat Daerah harus memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi ketercapaian atau tidak tercapainya kinerja organisasi dan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya, hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, dapat dilihat beberapa target kinerja yang harus dilakukan reuiu, dimana capaian tahun 2024 telah melebihi target kinerja tahun 2025 dan 2026 yang ditetapkan didalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Contoh :

- a. Umur Harapan Hidup realisasi tahun 2024 sudah mencapai 75,83 sementara target 2025 pada RPD sebesar 75,49.
- b. Angka Kemiskinan realisasi tahun 2024 sudah mencapai 3,87 sementara target 2025 pada RPD sebesar 3,960.
- c. Indeks Reformasi Birokrasi realisasi tahun 2024 sudah mencapai 87,30 sementara target 2025 pada RPD sebesar 78,65.



- d. Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi tahun 2024 sudah mencapai 7,4 sementara target 2025 pada RPD sebesar 9,13.
 - e. Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya realisasi tahun 2024 sudah mencapai 8,33 sementara target 2025 pada RPD sebesar 7,92.
2. Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi tidak dapat dihitung karena Anggaran pada Indikator Indeks Liveable City Aspek Ekonomi sesuai dengan Program tercantum pada Sasaran 1.3, Sasaran 3.1 dan Sasaran 3.2, sehingga apabila dihitung akan melebihi pagu anggaran Pemerintah Kota Bandung, sumber data RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada Lampiran II halaman 146.
 3. Anggaran Indeks Liveable City Aspek Ekonomi sesuai dengan Program tercantum pada Sasaran 1.3, Sasaran 3.1 dan Sasaran 3.2, sumber data RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 pada Lampiran II halaman 146

Guna mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bandung menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum, Akuntabilitas Kinerja artinya jawaban transparan terkait keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Jawaban tentang dua hal itu, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga: Perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif.

Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat.

Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026, RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO.2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

Bandung, 18 Maret 2025

Nomor : TL.02/ 303 -Bagor/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Tindak lanjut atas hasil
revisi LKIP Kota
Bandung Tahun 2024**

Kepada :
Yth. Inspektur Daerah Kota
Bandung

di
BANDUNG

Berdasarkan hasil revisi Inspektorat Kota Bandung atas Dokumen LKIP atau Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, ada beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Setda Kota Bandung sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada Tahun 2024 dan Indeks Liveable City Aspek Ekonomi yang tidak mencapai target di Tahun 2024;
2. Agar dilakukan perbaikan terhadap Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang tertera pada LKIP Kota Bandung 2024;
3. Substansi LKIP pada BAB II agar menyesuaikan dengan SE No. 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang merujuk pada PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bagian Organisasi Setda Kota Bandung melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator dan target yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja

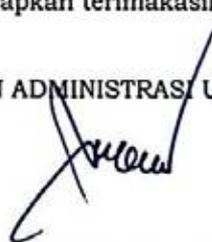
Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2026 terdapat *gap* atau perbedaan data, pada target Angka Kemiskinan Tahun 2024 pada RPD sebesar 4,2 sedangkan pada Kepwal IKU sebesar 3,964.

2. Bagian Organisasi telah menyampaikan Surat Asisten Administrasi Umum Nomor : B/TL.02/209-Bagor/II/2025 Hal : Reviu terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki target kinerja yang capaian atau realisasi pada tahun 2024 sudah melebihi target kinerja tahun 2025 pada RPD dan Kepwal IKU.
3. Bagian Organisasi telah melakukan penyesuaian terhadap perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dan.
4. Penyusunan LKIP atau Laporan Capaian Akuntabilitas sudah menyesuaikan kepada Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
 - b. Sistematika format penyusunan LPPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dimana informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat pada LPPD mencakup perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam BAB II.
 - c. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan memenuhi 7 (tujuh) informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah pada BAB II LPPD meliputi :
 - Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Demikian laporan tindak lanjut atas rekomendasi kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Dr. H. Tono Rusdiantono Hendroyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651118 198603 1 005



PEMERINTAH
KOTA BANDUNG